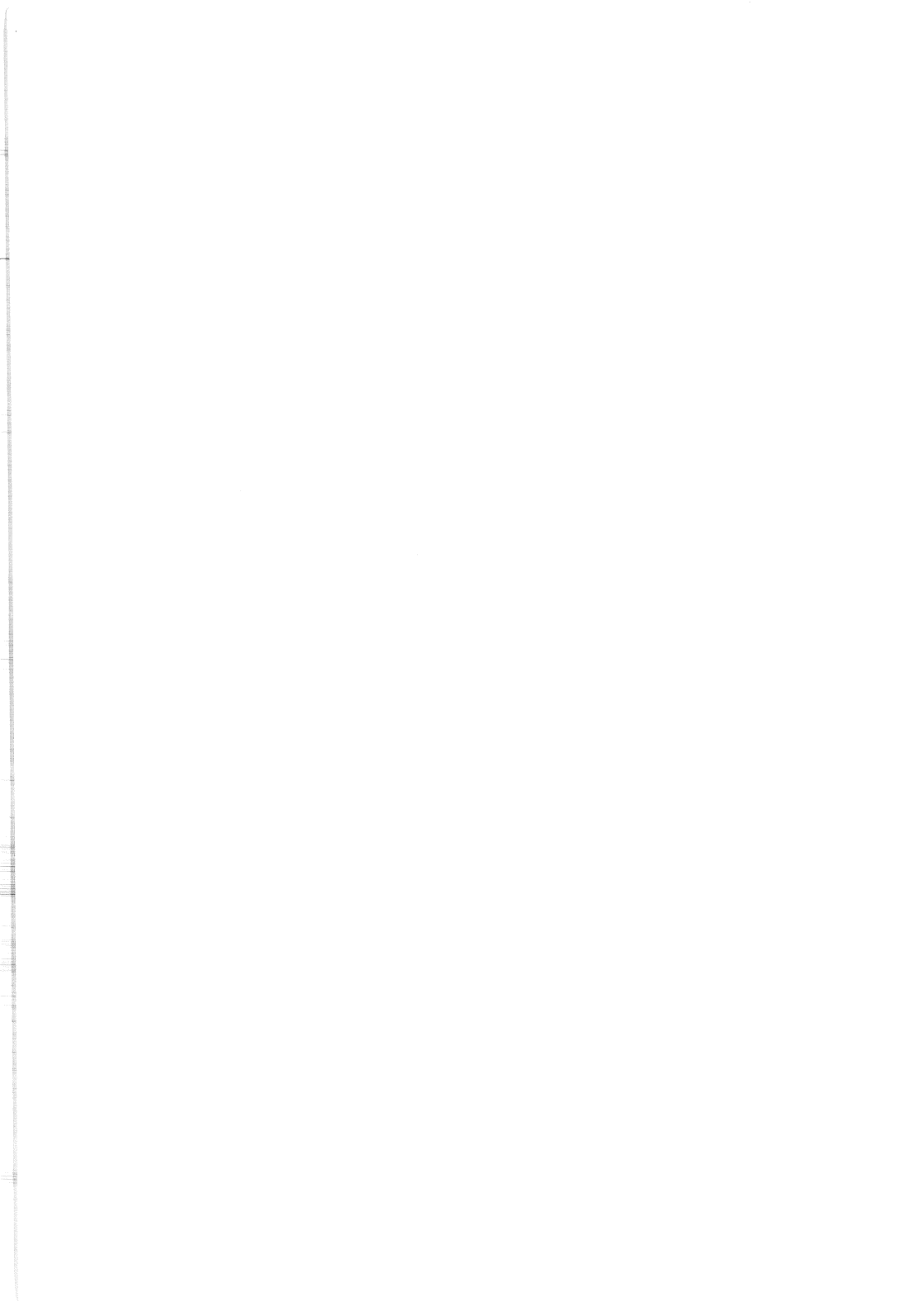


Kelas Menengah Muda:

Pola dan Arah
Perubahan Sosial Politik
di Daerah Perkotaan



Kelas Menengah Muda:

Pola dan Arah
**Perubahan Sosial Politik
di Daerah Perkotaan**

Penulis:

**Henny Warsilah
Riwanto Tirtosudarmo**

Editor :

Henny Warsilah



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

©2008 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog dalam Terbitan

Kelas Menengah Muda: Pola dan Arah Perubahan Sosial Politik di
Daerah Perkotaan/Henny Warsilah, Riwanto Tirtosudarmo, Jakarta: LIPI
Press, 2008

vi + 147 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-351-1

1. Sosial Politik - Perkotaan

361. 25

Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota IKAPI



L I P I

*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232 Fax.: 021-5701232

== P R A K A T A ==

Buku yang berjudul *Kelas Menengah Muda, Perubahan Sosial Politik di Perkotaan* ditulis oleh saudara Henny Warsilah dan Riwanto Tirtosudarmo atas dasar penelitian lapangan di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan analisa sosio-antropologis yang cukup dalam. Buku ini terbagi dalam empat bagian yang saling terkait dan saling mengisi, bagian pertama dari buku ini ditulis oleh Henny Warsilah membahas peran orang muda secara konseptual, terutama kelompok kelas menengah dalam menentukan arah dan pola perubahan sosial politik di daerah. Kelas menengah muda sebagai bagian dari *civil society* Lombok memegang peran penting dalam proses demokratisasi di daerah karena dengan kemampuan kapital sosial yang mereka miliki mampu mengubahnya menjadi kapital politik. Seperti halnya kelompok kelas menengah muda di daerah perkotaan lain mendasarkan setiap aktivitas mereka pada demokrasi dan mampu menjadikan perjuangan gerakan sosial mereka sebagai agen pembaharuan dan agen perubahan sosial bagi masyarakat. Dilanjutkan dengan bagian kedua yang mengupas tentang konstruksi terbentuknya penduduk golongan muda dan kelas menengah di Lombok yang sebetulnya hanya merupakan lapisan tipis dari struktur piramida penduduk. Persoalan yang dihadapi penduduk kelompok muda adalah persoalan yang sangat mendasar, terutama rendahnya pendidikan, tingginya angka perkawinan usia muda dan angka perceraian, tingginya angka pengangguran dan pencari kerja. Produktivitas penduduk golongan muda Lombok-NTB berada pada

tahap rendah karena keterbatasan akses terhadap sumberdaya sosial, ekonomi dan politik. Maka tidaklah mengherankan jika angka IPM NTB berada pada level 32, atau urutan kedua dari yang paling buncit (Provinsi Papua), selain itu provinsi Lombok-NTB terkenal sebagai daerah asal TKI dan TKW terbesar di kawasan Indonesia Timur. Namun, dibalik keterpurukan itu masih terlihat semangat kelas menengah muda untuk memperjuangkan hak-hak rakyat daerah secara strategis dan berkesinambungan.

Bagian ketiga yang ditulis oleh Henny Warsilah mendiskusikan tentang peran Kelas menengah muda dalam penentuan Arah dan Pola Perubahan Sosial Politik di daerah Lombok-NTB. Arah yang digagas oleh kelompok ini untuk suatu perubahan sosial politik di Lombok adalah dengan cara mewajibkan Negara untuk melakukan pemenuhan hak-hak konstitusional warganegara, menjalankan demokrasi untuk mewujudkan masyarakat yang adil secara hukum, makmur dan sejahtera secara ekonomi, demokratis secara politik dan partisipatif secara sosial budaya. Dan pola perubahan sosial politik daerah Lombok akan tercapai jika terwujudnya peningkatan partisipasi politik rakyat, lahirnya kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan tetap terpeliharanya pranata-pranata lokal dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Bagian terakhir ditulis oleh Riwanto Tirtosudarmo yang mengulas tentang Buruh migran, Pemuda dan Gerakan Sosial secara lebih luas. Ulasannya tidak hanya memotret kondisi mikro daerah tetapi menjangkau hal-hal makro yang terkait dengan peran dunia luar terhadap permasalahan *migran worker*. Dengan asumsi bahwa pemuda selalu mengambil peranan yang penting dalam perubahan sosial dan politik melalui keterlibatannya dalam berbagai gerakan sosial. Pertumbuhan LSM yang ada di Mataram dan perkembangan kiprahnya selain merupakan tanggapan dari kaum muda setempat terhadap berbagai isu yang bersifat lokal juga terbukti adanya pengaruh yang besar dari jaringan LSM yang bersifat nasional dan global

Proses penelitian buku ini melibatkan banyak narasumber baik dari aktivis LSM, NGOs, akademisi, profesional maupun birokrat dan masyarakat umum, tanpa partisipasi aktif mereka niscaya kedalam data yang coba digali peneliti tidaklah akan terpenuhi. Untuk itu kami menghaturkan terimakasih yang tak terhingga atas partisipasi para narasumber dan bantuan pendalaman data-data mereka. Secara khusus terimakasih kami sampaikan kepada Bang Eryvn Kaffah dan Yudhi dari LSM Somasi NTB yang telah membiarkan kami ikut dalam diskusi-diskusi mereka terutama dengan para jurnalis media dan telah membiarkan kami ikut menggunakan ruang di Somasi. Terimakasih banyak kepada Bang Suhaimi dan Mbak Milta-nya dari LSM LSBH yang secara cerdas dan menggebu mendiskusikan proses transformasi dan demokrasi di daerah dan memperkenalkan kami pada aktivis lainnya. Juga kepada Mas Dwi Swarsono dari LSM Samanta yang telah memberi pencerahan kepada peneliti, terutama tentang kedudukan LSM dan ulama *Tuan Guru* pada proses demokrasi di Lombok. Tak lupa terima kasih pada Santi dari LSM Koalisi Perempuan yang pada hari liburnya masih sempat berbincang dan membiarkan peneliti menelusuri data-data yang berguna. Kepada adik Aditya Bagus dari BEM Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang secara bebas memaparkan keterlibatan mahasiswa dalam proses demokrasi, dan kepada Erni Budiwanti (PSDR-LIPI) yang mau berbagi informasi dan buku penting sebagai kelengkapan penelitian kami haturkan terimakasih banyak. Juga terimakasih kami haturkan kepada Saudara Rusdi Cordova dari LSM Koslata yang berkenan membahas draft laporan buku ini sebelum naik cetak.

Tentunya masih banyak yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya demi keberhasilan penelitian ini, secara rendah hati kami sampaikan apresiasi kami yang tinggi kepada Wahid (LSM Syarikat Tani), Taufik Budiman (LSM Amapi), Endang (LSM Kaukus Perempuan), Hasan Masak (LSM Lesa Demokrasi), Beauty Herawati) dan Yuni Rianati (Solidaritas Perempuan), saudara Yudhi dari BPS. Dan terimakasih kepada sahabat baru kami Yudhis yang dengan kepiawaiannya mengantar keliling Lombok. Terlaksananya penelitian

ini atas kebijakan Puslit PMB-LIPI dan selesainya buku laporan ini juga atas dedikasi saudara Djoko Kristijanto untuk itu kami hanya bisa berterimakasih.

Jakarta, Desember 2008

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan-LIPI

Ttd.

Drs. Abdul Rachman Patji, MA

DAFTAR ISI

PRAKATA i

DAFTAR ISI v

BAGIAN I PENDAHULUAN: KONSEPSI PERAN ORANG MUDA DALAM PERUBAHAN SOSIAL POLITIK DI DAERAH PERKOTAAN INDONESIA

Oleh *Henny Warsilah*

| | | |
|-------|---|----|
| 1.1. | Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| 1.2. | Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian..... | 4 |
| 1.3. | Fokus Penelitian | 5 |
| 1.4. | Tujuan dan Sasaran Penelitian..... | 5 |
| 1.5. | Pendekatan Konseptual | 6 |
| 1.6. | Definisi Operasional..... | 16 |
| 1.7. | <i>Roadmap</i> Penelitian..... | 18 |
| 1.8. | Metodologi | 20 |
| 1.9. | Resiko Keberhasilan..... | 21 |
| 1.10. | Aspek Strategis..... | 22 |
| 1.11. | Kepustakaan | 22 |

BAGIAN II KONSTRUKSI TERBENTUKNYA PENDUDUK GOLONGAN MUDA DAN KELAS MENENGAH LOMBOK

Oleh *Henny Warsilah*

| | | |
|------|---|----|
| 2.1. | Pengantar | 27 |
| 2.2. | Modal Sosial Penduduk Muda: Produktivitas atau Permasalahan? | 28 |
| 2.3. | Konstruksi Terbentuknya Golongan Muda di Lombok, NTB..... | 37 |

| | | |
|------|---|----|
| 2.4. | Penutup: Formasi Kelas Menengah Muda Indonesia vs Kelas Menengah Lombok dalam Konstruksi Sejarah Sosial | 45 |
| 2.5. | Kepustakaan | 59 |

BAGIAN III
KELAS MENENGAH MUDA DAN
PERUBAHAN SOSIAL POLITIK
DI LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT

Oleh Henny Warsilah

| | | |
|--------|--|----|
| 3.1. | Pengantar | 63 |
| 3.2. | Gerakan Sosial Kelas Muda Lombok: <i>Tuan Guru</i> vs LSM Dalam Perspektif Sejarah | 64 |
| 3.2.1. | Kompetisi Kultural Kelas Menengah dari Kelompok Ulama ‘Tuan Guru’ dan Kelompok Bangsawan ‘Perwangsa’ | 70 |
| 3.2.2. | Kompetisi Intelektualitas Kelas Menengah Muda dari Unsur LSM dan Ulama | 74 |
| 3.3. | Koalisi LSM, <i>Tuan Guru</i> , Pondok Pesantren dan Perubahan Sosial Politik Daerah..... | 90 |
| 3.4. | Penutup: Peran Kelas Menengah Muda dalam Menentukan Arah dan Pola Perubahan Sosial Politik di Daerah..... | 96 |
| 3.5. | Kepustakaan | 99 |

BAGIAN IV
BURUH MIGRAN, PEMUDA DAN GERAKAN
SOSIAL KRITIS DI PERKOTAAN:
Advokasi Buruh Migran di Mataram, Lombok, dan
Transnational Advocacy Networks

Oleh Riwanto Tirtosudarmo

| | | |
|------|--|-----|
| 4.1. | Pengantar | 103 |
| 4.2. | Lombok: Penduduk dan Kemiskinan..... | 108 |
| 4.3. | Buruh Migran: Absennya Jaminan Sosial dan Perlindungan | 113 |
| 4.4. | Buruh Migran dan Ketidakadilan Global | 120 |
| 4.5. | Pembangunan, LSM dan Jaringan Gerakan Kritis..... | 128 |
| 4.6. | Advokasi Buruh Migran di Lombok dan Gerakan Sosial Transnasional | 137 |
| 4.7. | Penutup..... | 145 |
| 4.8. | Kepustakaan | 147 |

BAGIAN SATU

PENDAHULUAN :

KONSEPSI PERAN ORANG MUDA DALAM PERUBAHAN SOSIAL POLITIK DI DAERAH PERKOTAAN INDONESIA

Henny Warsilah

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Proses demokratisasi tengah berlangsung di tengah-tengah kita sekarang ini, dari proses tersebut yang penting dicatat adalah mulai berubahnya hubungan antara *Negara* (baca: pemerintah) dan masyarakat. Keduanya, kini tidak tampak lagi sebagai dua entitas yang dalam hubungannya satu sama lain bersifat superordinat atau subordinat. Kelompok orang muda, terutama dari unsur LSM, NGOs, Jurnalis, Profesional dan mahasiswa melalui keterlibatannya dalam berbagai macam demonstrasi untuk menyuarakan kritik sosial, keterlibatan dalam partai politik, partisipasinya dalam pemilihan-pemilihan umum, baik untuk anggota parlemen maupun pemilihan presiden langsung, memperlihatkan mereka tampak mulai mempunyai akses pada negara. Kenyataan tersebut, pada gilirannya, bisa ditafsirkan sebagai tengah berlangsungnya suatu perubahan sosial. *Negara*, kini mulai kelihatan lebih sebagai sebuah arena bagi pasar politik, sehingga tawar-menawar terjadi di antara beraneka ragam kepentingan masyarakat.

Proses demokrasi juga terjadi di tingkat daerah beriringan dengan berhasilnya tekanan-tekanan yang diarahkan kepada pemerintah pusat untuk mengakhiri politik sentralisme dan penyeragaman yang menjadi penghambat utama proses perkembangan daerah-daerah. Dan beriringan dengan dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan sampai tingkat tertentu, kebebasan dalam mengatur daerah-daerahnya sendiri

menurut kondisi-kondisi aktualnya masing-masing. Proses demokratisasi di daerah bahkan terlihat menyerupai proses demokratisasi pada level nasional, karena undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah (*pilkada*) yang menetapkan kepala daerah akan dipilih langsung diberlakukan di seluruh daerah Indonesia secara bersamaan.

Keterlibatan orang muda dari unsur LSM, NGOs, jurnalis, kelompok profesional dan mahasiswa dalam perjalanan demokrasi di Indonesia memegang peranan penting. Menurut sejarawan Onghokham (lihat Onghokham dalam Ridwan Saidi, 1998:52-53) sejak tahun 1908 gerakan mahasiswa yang dikelompokkan sebagai angkatan 1908 telah memperjuangkan kebangkitan nasional, diteruskan oleh angkatan 1928 yang terkenal dengan sumpah pemuda. Bahkan sejarawan barat B.Anderson melihat revolusi tahun 45 sebagai "*pemuda revolution*" yang didorong oleh kesadaran pemuda. Jauh ke depan, gerakan mahasiswa angkatan 66 yang terdiri dari pemuda intelektual dan aktivis mahasiswa atau biasa disebut sebagai "angkatan muda" (KAPPI, KAMI) berhasil menentang komunisme. Kelompok pemuda 66 ini lebih digambarkan sebagai kelompok elitis yang tidak ikut kehidupan partai-partai dengan sayap-sayap kaum tani dan buruh. Gerakan mahasiswa setelah tahun 66, seperti dikatakan aktivis mahasiswa Lukman Hakim bukan merupakan gerakan politik, namun merupakan gerakan intelektual yang menuntut adanya perubahan gradual (Lukman Hakim, 1998: 28). Status mahasiswa pada masa lalu menyandang status elite, dengan jumlah pemuda yang terbatas berasal dari status elite masyarakat dengan tradisi kelas yang memerintah, ambisi, dan kesadaran untuk berinvestasi - sehingga membuat golongan muda menjadi resah, terutama ketika golongan elite mereka digeser dan digantikan dengan munculnya elite baru. Munculnya gerakan mahasiswa ini dapat dipandang sebagai gejala kegoncangan masyarakat dan perlawanan terhadap nilai-nilai konservatif.

Seperti dianalisis oleh Arbi Sanit, kesadaran politis mahasiswa dan pemuda pada masa lalu yang direalisasikan lewat

organisasi masyarakat ternyata memberikan pengaruh terhadap kebangkitan nasional. Disepanjang periode perjuangan kemerdekaan, mahasiswa mendominasi pergerakan itu, mereka bukan saja memulai kontruksi ideologi yang kemudian dikenal sebagai *marhaenisme*, *pendidikan nasional*, *sosialisme*, mereka juga berperan sebagai organisator pengembang kesadaran nasional (Arbi Sanit, pengantar, 1998:20). Ide-ide pergerakan mahasiswa pada masa lalu tidak saja bersifat nasional tetapi juga telah masuk ke ranah internasional. Pertumbuhan pergerakan mahasiswa setelah tahun 1974 hingga awal tahun 1980-an mulai memunculkan isu globalisasi akibat dominasi ekonomi oleh negara adikuasa seperti Jepang dan Amerika.

Pergerakan mahasiswa setelah sempat vakum selama sepuluh tahun karena diberlakukannya sistem normalisasi kampus (NKK-BKK) oleh pemerintahan Orde Baru, pada masa kevakuman itu kelompok mahasiswa lebih memilih mengaktualisasikan diri dalam kelompok-kelompok diskusi dan kelompok studi. Walau bobot diskusi mereka berbeda, namun semua menuju kepada kristalisasi pemikiran yang baik di balik silang pendapat sebagai bentuk dinamika *civitas academica*, dalam iklim kampus, mahasiswa menjelma dengan ciri itelegensia yang kreatif. Isyu-isyu yang diusung mahasiswa tidak dapat diabaikan begitu saja karena sarat bobot sosial politik. Pergerakan mahasiswa dan pemuda pada masa pasca Orde Baru tidak kalah pentingnya dengan para pendahulu mereka, berkat bantuan perjuangan mereka pemerintahan Orde Baru dapat dilesengserkan, dan sekarang ini mereka mengisi pergerakan sosial politik dengan menyuarakan isyu-isyu lokal yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dan berjalannya demokrasi di Indonesia. Umumnya para mahasiswa dan pemuda saat ini menilai lemahnya penyelenggaraan pemerintahan daerah karena tidak menerapkan prinsip *clean and good governance* sebagai prasyarat terwujudnya demokrasi. Timbul pertanyaan dalam benak kita, apakah keresahan para mahasiswa dan pemuda itu mungkin merupakan gejala konflik-konflik dalam masyarakat yang lebih mendalam dan luas?-atau apakah struktur negara dan masyarakat kita telah sedemikian rupa

memberangus, sehingga hanya kelompok pemuda ini yang terlihat gelisah menyuarakan konflik-konflik dalam masyarakat?

Kegusaran dan keprihatinan penduduk kelompok muda terdidik, telah mendorong mahasiswa di daerah perkotaan memulai suatu pergerakan sosial baru, *new social movement*, yang bersifat populis demi memperbaiki kehidupan masyarakat dengan berbagai cara. Salah satu unjuk rasa yang paling populer adalah demonstrasi menentang salah urus kebijakan, tindak korupsi yang dilakukan para anggota dewan, pejabat Pemda atau pejabat pada salah satu institusi perbankan, hingga demonstrasi dalam menentang kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik. Strategi-strategi pergerakan yang mereka bangun memiliki dua ciri. *Pertama*, bersifat populis dengan menyertakan seluruh elemen masyarakat sehingga mereka memiliki kekuatan untuk melakukan *bargaining* politik. *Kedua*, isu yang mereka usung berada di sekitar ruang demokrasi, seperti akuntabilitas publik, transparansi anggaran, pelibatan partisipasi publik, hak asasi manusia, keadilan sosial dan kesejahteraan sosial. Apa yang digagas kelompok orang muda ini, sedikit banyak tampak telah mampu menekan pemerintah untuk melakukan perubahan dari peran sentralnya sebagai *government* menjadi *governance*, yang tidak hanya berperan aktif sebagai pengelola negara dan agen regulator bagi masyarakat tetapi juga pemerintah dapat berperan sebagai sebagai agen administrator dengan cara pemerintah memberi ruang bagi pelibatan masyarakat untuk ikut terlibat mengelola negara. Dengan demikian *social movement* yang digagas kelompok orang muda ini pada beberapa bagian telah mampu ikut mengarahkan pola perubahan sosial politik di Indonesia, terutama di daerah perkotaan.

1.2. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan penelitian ini berkisar pada peran kelompok orang muda pada perubahan sosial politik di daerah perkotaan. Sedangkan pertanyaan utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana perwujudan arah dan pola perubahan sosial politik di daerah perkotaan? - Apa sumbangan penduduk golongan muda dalam pembentukan kelas kritikal intelektual guna mendorong perubahan sosial politik untuk mencapai demokrasi? – dan dengan cara bagaimana *social movement* yang mereka gagas dapat ikut menentukan arah dan pola perubahan sosial politik?.

1.3. Fokus Penelitian

Pertanyaan utama dalam penelitian di atas menuntun peneliti untuk mendeskripsikan fokus penelitian seperti berikut ini:

- (1) Arah dan pola perubahan sosial politik di daerah melalui gerakan sosial yang digagas kelompok orang muda, terutama mahasiswa, LSM dan NGOs di daerah perkotaan.
- (2) Pengalaman dan sumbangan *social movement* (gerakan sosial) kelompok orang muda terdidik sebagai kelompok kritikal intelektual Indonesia dalam mendorong proses demokrasi.
- (3) Konstruksi terbentuknya *social movement* kelompok muda perkotaan, terutama dari unsur mahasiswa, LSM dan NGOs dan sumbangannya terhadap arah dan pola perubahan sosial politik di daerah.

1.4. Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.4.1. Tujuan

- (1) Mengkaji pola dan arah perubahan sosial politik di daerah perkotaan pasca pemerintahan Orde Baru melalui gerakan sosial kelompok orang muda dalam memperjuangkan demokrasi.
- (2) Mengkaji konstruksi terbentuknya kelompok orang muda dari unsur mahasiswa, LSM dan NGOs dengan cara memetakan berbagai corak kehidupan orang muda di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, budaya dan kewarganegaraan.
- (3) Mengkaji pengalaman orang muda dalam berkeaktivitas dan berenergisitas sebagai dasar gerakan dalam proses perubahan sosial.

- (4) Mengkaji kesuksesan peran orang muda dalam mempengaruhi dan mendorong pertumbuhan kelas kritikal intelektual di kota-kota Indonesia.

1.4.2. Sasaran Penelitian

- (1) Konstruksi arah dan pola perubahan sosial politik di daerah perkotaan Indonesia.
- (2) *Overview study* kelompok kritikal intelektual dari unsur mahasiswa, LSM dan NGOs di daerah perkotaan Indonesia dalam kapasitasnya melakukan perubahan sosial politik.
- (3) Formulasi rekomendasi bagi pemerintah tentang peran orang muda dalam mempengaruhi dan mendorong pertumbuhan kelas kritikal intelektual dan perubahan sosial politik Indonesia.
- (4) *Academic paper* tentang gerakan sosial orang muda untuk melakukan perubahan sosial dan mendorong percepatan proses demokrasi di Indonesia.

1.5. Pendekatan Konseptual

Saat ini, bangsa Indonesia sedang menghadapi permasalahan serius yang berkaitan dengan masalah pembangunan bangsa serta disintegrasi sosial dan nasional, dalam kondisi demikian peran kelompok orang muda akan menjadi sangat penting sebagai penyeimbang antara negara dengan masyarakat. Sekurang-kurangnya ada tiga persoalan yang harus segera dipecahkan dalam konteks integrasi sosial dan nasional di Indonesia, yakni:

- (1) *Problema historis*, yang berkaitan dengan konflik sosial, yakni berupa krisis ketika konflik-konflik masa lalu belum terselesaikan dan tertinggal, sekarang menuntut penyelesaian, misalnya: Kasus Tanjung Priok, Lampung, Kasus Poso, Maluku dan Papua.
- (2) *Problema kekinian*, yakni masalah-masalah yang harus diselesaikan terutama berkaitan dengan masalah struktural. Misalnya: konflik yang muncul akibat ketimpangan struktural, seperti ketimpangan ekonomi yang menyebabkan kemiskinan dan krisis pangan dan energi di pelbagai daerah. Ketimpangan sosial

politik, yang berujung kepada munculnya berbagai tindak kekerasan premanisme dan pelanggaran Ham dalam berbagai kasus.

- (3) *Problema masa mendatang*, yakni bagaimana caranya meletakkan dasar bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Dasar tersebut diperlukan untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin kompleks dan tanpa sekat melalui jendela globalisasi dunia. Misal munculnya masalah terorisme dan radikalisme agama, masalah dalam mengintrodusir berbagai nilai global dan universal yang baru sesuai dengan konsepsi budaya kita. Terutama nilai-nilai universal tentang transparansi, kebebasan, partisipasi, penghormatan hak asasi manusia, hukum diatas kekuasaan dan nilai sadar lingkungan yang semuanya merupakan nilai-nilai baku dalam demokrasi.

Implikasi dari problema masa lalu dan problema masa kini adalah, bahwa Bangsa dan Negara Indonesia mengalami krisis legitimasi dan kredibilitas akibat dari politik hegemoni. Akibat hegemonisasi yang dilakukan selama pemerintahan Orde Baru dan trauma politik telah melegitimasi negara untuk melakukan sentralisasi kekuasaan dan mengharamkan politik yang berbasiskan massa serta tidak pernah memberikan tempat bagi munculnya suatu perbedaan, semua diseragamkan. Dari sisi ranah publik, sebenarnya masyarakat telah terhegemoni oleh pernyataan-pernyataan politik dari para elit penguasa, bahwa negara mampu menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Padahal pada tataran empiris, ketika negara gagal melakukan pengelolaan konflik dan tindak kekerasan, konflik menjadi sulit diselesaikan karena konflik sudah berkembang demikian dasyhatnya, menjadi konflik bersegi banyak, bukan lagi berupa konflik antar kelompok etnis, konflik antar agama atau konflik antar kelas sosial, tetapi sudah bergerak kearah konflik ideologi.

Rejim pemerintahan Orde Baru menurut sejarahwan Taufik Abdullah (2004:8-11) sebetulnya telah salah langkah, karena menggunakan pendekatan kebudayaan Jawa (Kerajaan Mataram) dan

menjalankan konsep *negara serakah* yang cenderung menghalalkan penyeragaman dan kesatuan serta menolak segala bentuk keanekaragaman. Bukan saja keanekaragaman sejarah dan kebudayaan ditiadakan secara konseptual, tetapi dibenarkan adanya sistem pemerintahan yang sangat sentralistis dan memaksakan keseragaman tatanan sosial, sehingga yang terjadi kita dipaksa memberi dukungan terhadap lahirnya *negara serakah*, yang menguasai semuanya. *Negara serakah* adalah negara yang berwajah ganda-sebagai sebuah sistem kekuasaan dan sebagai wilayah nilai dan norma-yang semakin lama semakin kuat, sedangkan masyarakat semakin tak berdaya.

Implikasi kondisi masa lalu terhadap problema masa depan adalah berupa tantangan untuk mengantisipasi gejala hegemoni kebudayaan, karena jika hal itu terjadi akan cenderung merelatifkan kebenaran. Oleh karena itu pertanyaan yang dapat diajukan pada kesempatan ini adalah dalam jangka pendek: “Bagaimana pelaksanaan paket Otonomi Daerah dapat berjalan, sehingga proses demokratisasi di tingkat pusat dapat berjalan di daerah, bukan justru memindahkan kasus-kasus KKN ke daerah dan menciptakan raja-raja kecil. Sedang dalam jangka menengah: “Bagaimana kita dapat lebih memberdayakan kelompok-kelompok orang muda sebagai bagian dari kelompok kritikal intelektual, atau bagaimana menyertakan partisipasi mereka dalam mengelola negara dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan di daerah?”. Dalam jangka panjang: “Bagaimana kita mengupayakan proses demokrasi yang berlandaskan pluralitas, kesetaraan, transparansi dan pelibatan partisipasi publik”?.

Seiring berjalannya waktu, ketergantungan masyarakat kepada negara semakin kuat, meskipun demikian masyarakat melakukan usaha alternatif untuk mengatasi kemerosotan yang terjadi dengan cara membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) oleh kelompok intelektual muda, sebagai salah satu unsur *civil society* yang tumbuh pesat dimasa Orde Baru. Namun sayang, pertumbuhan *civil society* pada saat itu begitu terkooptasi oleh Orde Baru melalui ideologi maupun berdasarkan pemaksaan terhadap perundang-

undangan, sehingga kembali menjadi bentuk penyeragaman dan birokratisasi kepemimpinanpun tak dapat dihindari. Upaya membangun masyarakat sipil yang salah satu unsurnya terdiri dari kelompok kelas menengah muda, memerlukan upaya reformasi politik, yang pada tahapan tertentu reformasi politik kemudian akan menjadi acuan reformasi bagi bidang lainnya. Reformasi politik adalah upaya berkelanjutan untuk menciptakan sistem politik yang demokratis, yang mengaktualisasikan Pancasila dan nilai universal. Sasaran tersebut akan dapat dicapai melalui penyempurnaan Undang-Undang dan penyempurnaan praktek penyelenggaraan kekuasaan negara, serta penggunaan otoritas pengurusan kepentingan umum sesuai dengan dan dalam kerangka UUD-45.

Selain reformasi politik, reformasi pendidikanpun harus dilakukan dengan berorientasi ke depan ke abad 21 dengan mempertimbangkan kemajemukan bangsa dan berada dalam era globalisasi. Permasalahan utama Indonesia pada abad ke 21 adalah masalah-masalah di sekitar kesempatan kerja, menyempitnya lahan bagi pertanian, kerusakan ekosistem lingkungan hidup, pembagian yang adil bagi masyarakat lokal atas eksploitasi kekayaan sumberdaya alamnya, kesiapan tenaga trampil menengah dalam jumlah besar, penciptaan ketenangan politik dan perkembangan kebudayaan. Maka, pembangunan di bidang pendidikan harus di arahkan untuk menghadapi tantangan tersebut secara nyata, dan ini menjadi salah satu sasaran reformasi.

Reformasi yang tak kalah penting adalah reformasi bidang ekonomi dengan bertitik tolak dari keadaan yang terpuruk yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan negatif berat disekitar minus 15 persen, inflasi yang bergerak menuju inflasi hiper, dan jumlah pengangguran sekitar disekitar 14 persen dan masih terus meningkat, suku bunga yang tinggi dan kondisi keamanan perbankan yang buruk, tanggungan hutang luar negeri yang besar dan cadangan devisa yang terbatas, membuat kita menghadapi tantangan yang sangat berat. Reformasi hukumpun menjadi hal yang tak terelakkan, karena hukum adalah seluruh kaidah serta azas yang mengatur pergaulan hidup

manusia dalam masyarakat, bertujuan memelihara ketertiban, yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan kaidah-kaidah itu sebagai keadaan dalam masyarakat. Reformasi di bidang hukum harus mengacu pada prinsip-prinsip: (1) Kedaulatan rakyat, (2) Hak asasi manusia, (3) Kesamaan semua hamba di depan hukum, (4) Penegakan hukum, (5) Tafsir resmi UUD-45.

Reformasi penting lain adalah reformasi budaya karena diperlukan untuk memberikan pijakan pada usaha reformasi dalam bidang-bidang lainnya seperti politik, pendidikan, ekonomi, keamanan dan hukum. Tanpa reformasi budaya, reformasi dalam bidang lain tidak akan menampilkan hasilnya yang permanen hanya akan bersifat sementara. Namun, perlu disimak jika reformasi budaya tidak dapat dikembangkan dalam waktu singkat sebab merupakan proses yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sebab budaya tidak dapat diubah secara radikal dan perubahan budaya merupakan proses kompleks yang melibatkan seluruh unsur kehidupan masyarakat. Proses perubahannya dapat diarahkan kepada tuntutan reformasi dengan upaya tertentu, misal dengan menggunakan model perubahan tiga tahap:

- (1) Tahap pertama adalah tahap de-konstruksi, biasanya berlangsung dalam kurun waktu yang pendek, dimana warisan-warisan budaya orde yang lalu yang feodalistik dan birokratik dibongkar.
- (2) Tahap kedua adalah tahap transisi, tahapan jangka menengah, sebagai tahap peralihan dari budaya lama menuju ke budaya baru yang dituju.
- (3) Tahap ketiga adalah tahap terobosan budaya, sebagai tahap jangka panjang dimana akan muncul budaya baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan budaya suatu masyarakat terbuka.

Tuntutan reformasi dalam berbagai bidang telah menyebabkan tumbuh suburnya gerakan-gerakan sosial di Indonesia yang dimotori kelompok intelektual muda untuk menentang pengingkaran hak-hak masyarakat, dan menisbikan dominasi serta kooptasi pemerintah dalam berbagai lini kehidupan. Namun sayang, strategi gerakan sosial mereka sering bertabrakan dengan kekuatan

politik dan ekonomi negara, sehingga membuat upaya bargaining politik menjadi kurang memadai. Guna lebih memahami terbentuknya gerakan sosial orang muda, peran, tujuan dan strategi gerakan ini dalam kaitannya dengan perubahan sosial untuk mendorong percepatan proses demokratisasi di Indonesia, dibutuhkan serangkaian penelitian ilmiah dengan topik: Peran kelas menengah muda dari unsur mahasiswa, LSM dan NGOs di daerah terutama dalam konteks gerakan sosial.

Mahasiswa dan kelompok LSM ini dapat dikategorikan sebagai salah satu unsur pembentuk kelas menengah intelektual dan berkat pendidikan tinggi yang disandangnya, kekayaan budaya dan latar belakang pendidikan intelektual yang dimilikinya, mereka merupakan lapisan paling kritis dalam *civil society*. Sebagai bagian dari *civil society*, tentunya mereka mampu membangun aksi sosial kolektif (*the forms of collective action*) dalam perspektif gerakan sosial baru. Dan seperti dikatakan Gramsci (2000:132-143), kelas menengah intelektual dapat dikaitkan dengan tumbuhnya kekuatan *civil society*, apakah sebagai juru bicara kelompok internalnya dalam rangka kebebasan mimbar atau lebih sebagai intelektual organik yang bertindak untuk mengartikulasikan kepentingan politik masyarakat dalam gerakan sosial baru yang berwatak emansipatoris dan merupakan agensi dan aktor proses transformasi sosial masyarakat.

Pemikiran Gramsci (2000) dan Gouldner (1979), menunjuk bahwa kelompok intelektual muda dapat dikelompokkan sebagai kelas sosial baru yang menguasai ilmu pengetahuan dan dengan pengetahuannya mereka memiliki kapital budaya (*cultural capital*) dan kapital sosial (*social capital*), yang dengan kapasitasnya bisa saja kapital budaya dan kapital sosial itu dikembangkan menjadi kapital uang atau kapital politik. Dasar gerakan sosial baru mereka tidak lagi didasarkan pada orientasi ekonomi semata-mata yang menjadi dasar perjuangan gerakan sosial lama, tetapi lebih bersifat *class-based social movement*. Selanjutnya, Gramsci (2000) menyebut kaum intelektual sebagai intelektual yang memiliki orientasi baru, atau disebut sebagai *sub-altern intellectual*, karena dari gagasan gerakan

sosial baru itu mereka berani melakukan peran sebagai “*artikulator*”. Dalam pengertian, menjalankan peran kritikal terhadap negara, atau sebagai *critical-oppositional intellectuals* terhadap tatanan yang mapan dalam ketidakadilan. Senada dengan itu, Michael Foucault memandang perlunya *the specific intellectual* dari *the public sphere* yang betul-betul dapat membawa aspirasi mereka yang tertindas dan berasal dari kalangan mereka sendiri, bukan berasal dari mereka yang berbicara atas nama kaum tertindas melalui retorik intelektual. Pada era post-modernism tuntutan Foucault memiliki *echo* yang lebih besar dengan merumuskan perlunya konsep gerakan sosial baru¹.

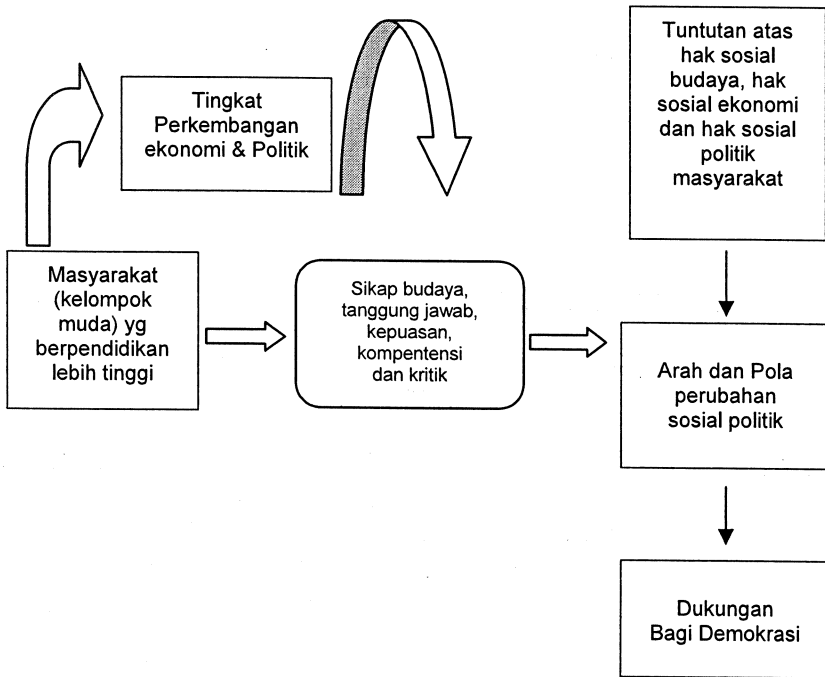
Aksi-aksi gerakan sosial orang muda ini, yang terpenting ialah dengan cara mendirikan keragaman organisasi yang memiliki otonomi di luar negara, dan bertujuan untuk memajukan demokrasi partisipatoris. Gerakan sosial orang muda ini selanjutnya dapat diidentikan dengan gerakan pro demokrasi yang mempunyai akar luas, dimana keberadaan mereka secara politik dipandang penting. Seperti yang diungkapkan oleh Tedd Gur (1993:184), bahwa tuntutan akan demokrasi telah mendorong terbentuknya kelompok-kelompok aksi, seperti kelompok pro demokrasi. Selain itu, adanya tuntutan dari dunia internasional bagi terbentuknya kelompok-kelompok aksi, karena konsep “partisipasi rakyat” telah masuk ke dalam ukuran keberhasilan untuk menilai sebuah pembangunan. Kemudian, sejak tahun 80-an telah muncul dukungan dari PBB dalam bentuk resolusi dan deklarasi untuk memasukkan “partisipasi rakyat” dalam penyelenggaraan aktivitas negara.

Jeff Haynes (2000:23-24), dalam studinya tentang “Demokrasi Masyarakat Sipil di Dunia ke Tiga”, mendeskripsikan kemunculan kelompok-kelompok aksi di dunia ketiga dimotori oleh banyaknya pertumbuhan kelompok-kelompok aksi di Barat yang terjadi pada tahun 1980-an, dan diidentifikasi sebagai “Gerakan Sosial Baru”. Isu gerakan sosial baru terutama dalam wilayah feminisme, lingkungan, demokratisasi dan isu perdamaian.

¹ Opcit, Muslim Abdurachman, 1999: 259.

Selanjutnya, Haynes mendeskripsikan gerakan sosial baru itu sebagai gerakan penentang *status quo*, mereka anti sistem, menyerukan dan memadukan tuntutan akan perubahan tatanan sosial, politik dan ekonomi. Lebih jauh, Cohen (1985), menganalisa bahwa gerakan sosial baru itu berusaha membangun identitas sosial baru, menciptakan ruang demokrasi bagi aksi sosial yang otonom, dan berupaya menafsirkan kembali norma-norma yang berlaku seraya membentuk ulang lembaga-lembaga. Inti dari gerakan sosial itu, menurut Touraine berkaitan dengan tiga hal pokok berikut: *pertama*, secara kualitatif gerakan ini memang baru, karena berbeda dari yang lama, dan lebih menaruh perhatian pada masalah keadilan sosial ekonomi dan politik. *Kedua*, isu yang diperjuangkan lebih fokus pada isu sosial. *Ketiga*, gerakan ini terdiri dari unsur-unsur perorangan, dan kelompok, serta membentuk unsur gerakan sosial yang lebih besar. dalam masyarakat.

Berikut ini bagan tentang perkembangan ekonomi dan politik sebagai sebuah faktor dalam proses demokratisasi. Bagan ini dikembangkan dari bagan yang dibuat Huntington tentang konsepsi perkembangan ekonomi (1995: 84) kemudian dikaitkan dengan ide dari Gramsci dan Gouldner tentang "*Sub-altern intellectual*" dan konsepsi Giddens (1999) tentang "*The Third Way*":



Catatan:

Sub-altern Intellectual merupakan lapisan kritis dari lapisan sosial *Civil Society*.

Bagan di atas dapat dibaca, bahwa suatu konsolidasi demokrasi tidak mungkin bisa dilakukan tanpa melihat faktor-faktor ekonomi, politik, sosial dan kultural. Artinya konsep demokrasi partisipatoris akan menemukan kekuatannya jika ada *linkage* antara *civil society*, *political society* dan *the state*. Untuk memujudkan demokrasi, peran warga negara harus meliputi partisipasinya menjadi anggota-anggota organisasi sukarela, partai-partai politik baru, atau organisasi non partai seperti serikat buruh, ICW dan Ornop dan lainnya. Dalam proses politik seperti itu, prasyarat tersebut diperoleh dengan membangun hegemoni melalui *historic block* yang merupakan

kerja dari para intelektual *sub-altern* untuk mendorong proses demokrasi.

Di Indonesia, kemunculan dan terjadinya penguatan gerakan sosial telah dikaji oleh Eep Saefulloh Fatah (2000: 233), digambarkan sebagai:

“...bangkitnya kelas menengah politik yakni anggota komunitas muda terdidik di perkotaan yang menjadikan kritisisme sebagai basis politik mereka”.

Pada tatanan ini, kelas menengah politik seperti yang digambarkan Eep Saefulloh dapat disamakan dengan para aktivis gerakan sosial yang terdiri dari mahasiswa, aktivis LSM, kelompok akademisi dan kelompok profesional. Konsep kelas menengah politik ini, dapat dibedakan dengan konsep *kelas menengah lama* yang lazim digambarkan oleh literatur ilmu sosial dibangun melalui kekuatan modal yang berkaitan dengan produksi barang. Sedangkan kelas menengah politik membangun daya tawarnya *vis à vis* negara, bukan dengan kekuatan modal produksi, tetapi melalui intelektualitas dan organisasi politik. Dasar gerakannya tidak lagi didasarkan pada orientasi ekonomi, yang merupakan dasar perjuangan gerakan sosial lama, sedangkan gerakan sosial baru lebih bersifat *class-based social movement*. Dengan membuka keragaman organisasi yang memiliki otonomi di luar negara, gerakan sosial baru yang bertujuan untuk memajukan demokrasi partisipatoris mempunyai akar luas, termasuk dalam hal ini kelompok orang muda terdidik di perkotaan.

Apa yang telah dilakukan oleh gerakan-gerakan sosial seperti telah dibahas di atas, sebetulnya seperti disebut Huntington (1995) dalam kerangka mengembangkan *“model partisipasi politik otonom”*, yaitu sebuah model yang dicirikan oleh berkembangnya inisiatif mandiri dari rakyat untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Tetapi sebetulnya, model partisipasi politik otonom tersebut memiliki dua hambatan berikut: *Pertama*, hambatan yang bersifat struktural, yaitu kecenderungan pada negara untuk melakukan regulasi politik secara ketat agar kepentingan negara (baca: pembangunan dan stabilitas) teramankan. *Kedua*, hambatan yang

bersifat kultural berkaitan dengan tingkat pengetahuan, kesadaran, kecerdasan politik masyarakat yang belum memadai. Hambatan struktural agak sulit dilalui, yang paling mungkin adalah dengan cara meminimalkan hambatan kultural, yakni melalui upaya pendidikan politik masyarakat secara intensif.

Pada prakteknya, memang demokrasi harus terus menerus dilatih dan dipraktekan sehingga menjadi ciri interaksi antarmanusia, dan pendidikan demokrasi menjadi tak terelakkan ketika kesadaran akan pentingnya menata struktur sosial dan politik secara demokratis kian menguat pada masyarakat. Persoalannya siapa yang akan terlibat dalam proses pendidikan demokrasi, serta dalam konteks budaya seperti apa praktek demokrasi akan disosialisasikan?. Karena seperti dikatakan oleh Karim Suryadi (1999:307-9) bahwa, demokrasi yang sehat umumnya bergantung kepada pengembangan budaya masyarakat yang demokratis, dan bagi masyarakat demokratis, pendidikan merupakan komponen vital. Dikatakan demikian, karena atribut-atribut warga negara yang demokratis dibina melalui pendidikan. Sedang tujuan pendidikan demokrasi adalah, untuk menghasilkan warga negara yang merdeka, berpikir kritis dan sangat familiar dengan pandangan dan praktik-praktik demokrasi, sehingga melahirkan budaya masyarakat yang demokratis. Maka dalam konsep seperti itu, gerakan sosial dapat dipahami sebagai sarana pendidikan dan pencapaian partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Karena memang, upaya mewujudkan demokrasi di Indonesia saat ini, selain akan menuntut perluasan partisipasi politik di tingkat daerah, juga menuntut mekanisme baru untuk penciptaan solidaritas sosial dalam masyarakat luas (pusat dan daerah).

1.6. Definisi Operasional

- **Penduduk Kelompok Muda**

Dalam stuktur demografi kependudukan, pemuda didefinisikan sebagai penduduk yang berusia antara 15 hingga 35 tahun, merupakan kelompok penduduk yang secara kuantitas paling besar jumlahnya dan merupakan usia produktif. Dalam penelitian

ini kelompok muda didefinisikan sebagai kelompok kritikal intelektual yang berasal dari unsur LSM, mahasiswa dan ulama.

- **Kelas menengah muda**

Dikonsepsikan sebagai *youth middle class* adalah kelas perantara yang formasinya terbentuk dari kelompok intelektual muda yang tergabung dalam LSM dan NGOs atau Ornop gemar menyuarakan kritik atas dasar keprihatinan terhadap kondisi buruk yang menimpa sebagian besar penduduk muda lainnya dan masyarakat pada umumnya. Dasar gerakan sosial mereka bukanlah ekonomi tetapi *class base movement* sehingga dengan kemampuan kapital sosial yang mereka miliki mampu mengubahnya menjadi kapital ekonomi dan kapital politik yang berguna untuk ikut membentuk pola dan arah perubahan sosial politik di daerah.

- **Gerakan Sosial**

Adalah gerakan yang diusung oleh LSM, NGOs, Mahasiswa dan ulama dalam bentuk pemberdayaan, advokasi, pendampingan, kritikal hingga kepada demonstrasi guna meluruskan arah dan pola perubahan sosial politik di daerah yang dapat digunakan seluas-luasnya dan menguntungkan bagi masyarakat daerah.

- ***Social dan Cultural Capital***

Secara nilai/value adalah aset sosial dan budaya yang dimiliki kelas menengah berupa pendidikan, nilai-nilai demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan sosial, penegakan hukum dan nilai-nilai budaya yang mampu membentuk pribadi mereka menjadi sosok agen pembaharu dan agen perubahan bagi masyarakat luas. Dan secara struktur adalah berupa jaringan sosial (*social networking*), kelembagaan dan kapasitas yang dapat digunakan untuk mendukung pergerakan sosial mereka.

- **Arah dan Pola Perubahan Sosial politik**

Adalah petunjuk dan gambaran atas perubahan sosial politik sesuai dengan kondisi kebutuhan daerah dan masyarakat luas bukan sesuai dengan keinginan penguasa Pusat dan Daerah. Arah

dan pola perubahan ini bertujuan untuk mencapai demokratisasi pada level daerah yang terwujud dalam bentuk keadilan sosial, kesejahteraan bagi masyarakat daerah, transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang negara dan rakyat, terjadinya penegakan hukum yang berdiri di atas semua golongan dan pelibatan partisipasi publik sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan negara dan pemerintahan daerah.

- **Demokrasi**

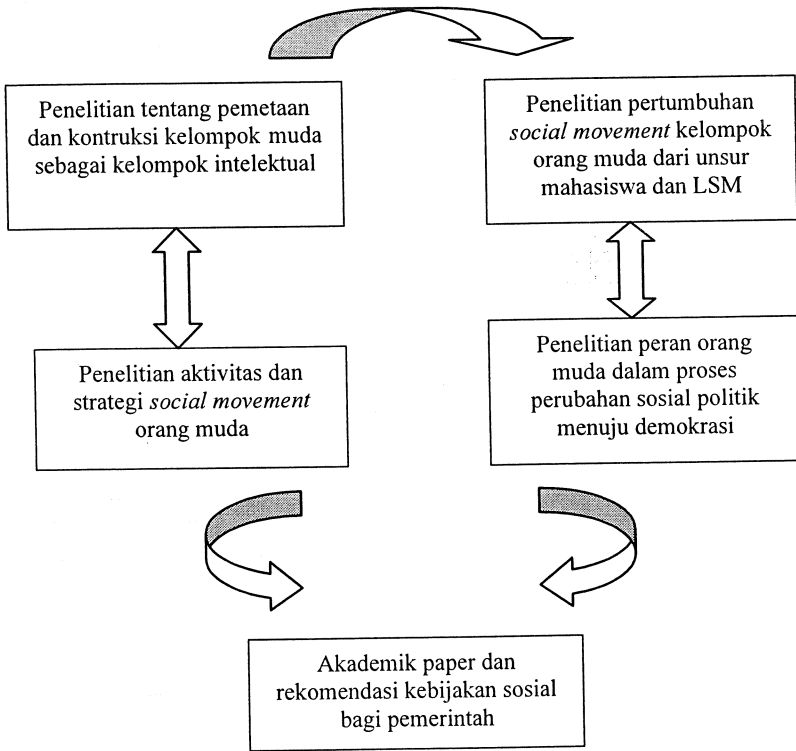
Demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi makna harfiahnya adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat atau pemerintahan sipil.

- **Reformasi**

Kata reformasi berasal dari bahasa Perancis, *La Reform*. Istilah la reform dipakai di Eropa pada abad XIV yang digunakan untuk menuntut perubahan internal gereja katolik di Roma, dimana tuntutan ini berdampak kepada bidang politik. Kata la reform, kemudian selalu dipakai oleh gerakan-gerakan sosial yang menuntut perubahan. Di Indonesia istilah reformasi ditujukan kepada gerakan massa yang menuntut perubahan dan perbaikan tatanan masyarakat secara keseluruhan dengan mengubah beberapa struktur sosial, budaya, ekonomi dan politik. Istilah reformasi demikian dasyatnya dapat melintasi batas-batas dan friksi-friksi etnis, ras, agama dan kelas sosial.

1.7. Roadmap Penelitian

Agar tujuan dan sasaran penelitian dapat tercapai, maka penelitian tentang peran kelompok muda dalam mendorong perubahan sosial dan proses demokrasi di daerah perkotaan Indonesia roadmap penelitiannya dimulai dengan rangkaian penelitian sebagai berikut:



Sedang tahapan penelitian pertahunnya (2008-2011) sebagai berikut:

- **Tahun Ke 1**

Pemetaan sosial dan konstruksi terbentuknya kelompok muda ke dalam kelompok intelektual, dengan cara memetakan berbagai corak kehidupan orang muda di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, budaya dan kewarganegaraan, sehingga memiliki kontribusi untuk menentukan arah dan pola perubahan sosial politik di Indonesia

- **Tahun Ke 2**

Mengkaji pertumbuhan gerakan sosial atau gerakan prodemokrasi yang dilakukan oleh kelompok muda (mahasiswa) di Indonesia.

- **Tahun Ke 3**

Mengkaji pengalaman aktivitas dan strategi orang muda dalam melakukan aksi sebagai dasar gerakan dalam proses perubahan sosial politik.

- **Tahun Ke 4**

Mengkaji kesuksesan peran generasi muda dalam mempengaruhi dan mendorong pertumbuhan kelompok intelektual dalam menentukan arah serta pola perubahan sosial politik di Indonesia.

1.8. Metodologi

1.8.1. Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan bersifat kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik *depth interview* (wawancara mendalam). *Depth interview* merupakan teknik utama yang akan dipakai untuk memperoleh data-data primer yang diperlukan. Pendekatan kuantitatif digunakan sebagai tambahan untuk menjangkau data tentang jumlah, usia latar belakang sosial dan keluarga serta aspirasi politik kelompok muda.

1.8.2. Data dan Responden

Responden dari penelitian ini, sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian, adalah kelompok orang muda di kota-kota menengah di Indonesia, baik kelompok muda pria maupun kelompok muda wanita. Sedang wawancara mendalam akan ditujukan kepada tokoh masyarakat, kelompok intelektual daerah baik mereka yang tergabung dalam birokrasi atau di luar birokrasi, akademisi kampus, seniman dan wartawan mass media, LSM. Penentuan responden dan informan kunci sebagai kelompok intelektual daerah dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, melalui

posisi yang bersangkutan dalam suatu institusi publik dan kemasyarakatan yang dikenal di daerah tersebut, seperti universitas, asosiasi profesi, Ornop/LSM dan sebagainya. *Kedua*, dengan melihat latar belakang pendidikan dan aktivitas politik yang bersangkutan sebagaimana yang diberitakan oleh media massa maupun sebagaimana yang diinformasikan oleh para pimpinan institusi publik di atas. *Ketiga*, dengan melihat jaringan sosial dan institusi yang bersangkutan dalam hal melakukan kontrol sosial-politik terhadap negara.

1.8.3. Analisis

Laporan penelitian ini sendiri akan mengambil bentuk sebuah analisis yang bersifat deskriptif analisis dan kuantitatif analisis. Selain wawancara mendalam, analisa terhadap artikel lepas maupun yang dimuat media massa menjadi tujuan yang penting karena hal itu merupakan wahana kelompok intelektual daerah dalam menuangkan ide pikirannya. Begitupun tulisan mereka dalam bentuk buku dan paper menjadi pilihan utama.

1.8.4. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan diberbagai kota menengah di Indonesia. Terutama di Kawasan Indonesia Tengah yang diwakili oleh Lombok-NTB. Alasan pemilihan kota ini dikarenakan pertama kota ini memiliki konsentrasi orang muda yang sangat besar, kedua, dalam beberapa tahun terakhir gerakan pro demokrasi yang mereka gagas sama pentingnya dengan kelompok muda di pusat (Jakarta), bahkan dalam beberapa kesempatan terlihat lebih keras dan lebih meyuarkan isu lokal yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat daerah. Sehingga daerah ini dapat dijadikan barometer bagi perkembangan kelas menengah daerah dari kelompok muda.

1.9. Resiko Keberhasilan

Peluang keberhasilan dari kajian ini cukup tinggi karena pertama, penelitian ini merupakan penelitian kebijakan yang

diarahkan kepada para informan kunci di daerah yang biasa disebut kaum intelektual daerah. Selama penelitian sebelumnya peneliti telah berhasil mengembangkan jaringan yang luas untuk mendukung penelitian ini. Hambatan yang akan dihadapi dalam mencapai sasaran penelitian adalah masalah waktu penelitian yang terkadang bersamaan dengan event politik tertentu, misal pelaksanaan Pilkada sehingga ada kemungkinan akan kesulitan untuk menemui narasumber.

1.10. Aspek Strategis

Kajian tentang gerakan sosial masyarakat sipil di daerah ini terbilang strategis karena dalam pelaksanaan paket kebijakan otonomi daerah di Indonesia, cita-cita demokratisasi melalui desentralisasi dan kemandirian daerah belumlah tercapai, malah sebaliknya KKN dan primordialisme tumbuh subur. Kondisi ini, sebagaimana dikemukakan oleh banyak ilmuwan, adalah disebabkan oleh penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak berjalan dengan baik, dan penyertaan partisipasi publik yang sangat minimal.

1.11. Kepustakaan

Buku:

Abdurachman, Muslim, 1999, "Peran Masyarakat Akademis Sebagai bagian Masyarakat Madani", dalam *Masyarakat Versus Negara*, Jakarta: Kompas.

Arbi Sanit, pengantar, dalam Ridwan Saidi, 1989, *Mahasiswa dan Lingkaran Politik*, Penerbit Lembaga Pers Mahasiswa Mapussy Indonesia, Jakarta.

CESDA-LP3ES, 1996, *The Indonesian NGO Agenda*.

Crouch, Harlod, 1978, *The Army and Politics in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press.

_____, dalam Hadijaya., 1999, "Kelas Menengah dan demokratisasi", *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

- _____, 1999, "Wiranto and Habibie: Military-Civilian Relations since May 1998", in Arief Budiman, Barbara Hatley, and Damien Kingsbury (ed.), *Reformasi: Crisis and Change in Indonesia*, Melbourne, Monash Asia Institute, 127-48.
- Cohen, J, 1985, *Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movement*, *Social Research*.
- Fukuyama, Francis, 1992, *The End of History and the Last Man*, London Hamish Hamilton.
- Fatah, Eep Saefulloh, 1994, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- _____, 2000, *Zaman Kesempatan*, Bandung: Mizan.
- Gramsci, Antonio, 2000, *Sejarah dan Budaya*, diterjemahkan dari buku: *Selection from the Prison Notebooks*, 1987, New York: International Publisher, Penerbit Pustaka Prometheus.
- Goudner dalam Muslim Abdurachman, 1999, "Peran Masyarakat Akademis Sebagai bagian Masyarakat Madani", dalam *Masyarakat Versus Negara*, Jakarta: Kompas.
- Giddens, Anthony, 1999, *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*, dalam Manuel Kaisiepo: *Antara Negara Kesejahteraan dan Masyarakat Madani*, Diskusi aktualisasi "The Third Way", dalam *Masyarakat Versus Negara*, Jakarta: Kompas.
- _____, 1995, *Politics, Sociology and Social Theory*, Stanford California: Stanford University Press.
- Gerard, Clarke, 1998, *The Politics of NGOs in South-East Asia: Participation and Protest in The Philippines*, London: Routledge.
- Gurr, Ted Robert, 1991, "Theories of Political Violence and Revolution in the Third World" in *Conflict Resolution in Africa*, edited by F.M. Deng and I.W. Zartman, Washington D.C.: The Brookings Institution.

- _____, 1993, *Why Minorities Rebel: A Global Analysis of Communal Mobilization and Conflict since 1985*, International Politic Science Review.
- _____ and Barbara Harff, 1994, *Ethnic Conflict in World Politics*, Oxford, Westview Press, Inc.
- Heryanto, Ariel, Editor: Idi Subandy Ibrahim, 2000, *Perlawanan Dalam Kepatuhan*, Bandung: Mizan.
- Haynes, Jeff, 2000, *Demokrasi Masyarakat Sipil di Dunia ke Tiga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hudock, Ann C., 1999, *NGOs and Civil Society, Democracy by Proxy*, Polity Press in Association with Blackwell Publishers Ltd., Oxford OX4 1JF, UK.
- Huntington, Samuel P., 1995, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Jeff Haynes, 2000, dalam studinya tentang “Demokrasi Masyarakat Sipil di Dunia ke Tiga”
- Kaisiepo, Manuel, 1999, “Antara Negara Kesejahteraan dan Masyarakat Madani”, Diskusi aktualisasi “The Third Way” dalam *Masyarakat Versus Negara*, Jakarta, Kompas.
- Katoppo, Aristides, 2000, “Peran Kelompok Masyarakat Dalam Gerakan Lingkungan Hidup”, dalam *Indonesia di Tengah Transisi*, ed., Chris Manning dan Pieter Van diermen, Yogyakarta: LKiS.
- Linz Sterling, Juan J., 2000, “Defining and Crafting Democratic Transition, Constitution and Consolidation”, dalam *Crafting Indonesian Democracy*, in R. William Liddle(ed), Bandung: Mizan.
- Lukman Hakim dalam Ridwan Saidi, 1989, *Mahasiswa dan Lingkaran Politik*, Penerbit Lembaga Pers Mahasiswa Mapussy Indonesia, Jakarta.

- Mills, Wright, 1956, *The Power Elite*, New York: Oxford University Press.
- Onghokham dalam Ridwan Saidi, 1989, *Mahasiswa dan Lingkaran Politik*, Penerbit Lembaga Pers Mahasiswa Mapussy Indonesia, Jakarta.
- Raillon, Francois, 1993, "*The New Order and Islam, or The Imbroglia of Faith and Politics*", *Indonesia*, N0.57:197-217.
- _____, 1999, dalam Hadijaya, ed., 1999, *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil*, Penerbit PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Ridwan Saidi, 1989, *Mahasiswa dan Lingkaran Politik*, Penerbit Lembaga Pers Mahasiswa Mapussy Indonesia, Jakarta.
- Seamus, Cleary (1997), *The Role of NGOs Under Authoritarian Political Systems*, MacMillan Press Ltd, London companies.
- Suryadi, Karim, 1999, "Demokratisasi Pendidikan Demokrasi", dalam *Masyarakat Versus Negara*, Jakarta: Kompas.
- Springga, Daniel, Kompas, 2000, "Reformasi Belum Sesuai Harapan", Kompas 7 Oktober 2000, Jakarta.
- Touraine, Alain, 1985, "*An Introduction to The Study of Social Movement*", Social Research.
- Taufik Abdullah, 2004, Negara, Bangsa dan Masyarakat dalam Pendekatan Kebudayaan, dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. VI No. 1, Penerbit PMB-LIPI.
- Uhlin, Anders, 1998, "Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang ke Tiga di Indonesia", Terjemahan dari *Indonesia and The Third Wave of Democratization: The Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World*, Curazon Press, London in 1997, Penerbit Mizan, Bandung.
- Warsilah, Henny, Thung Ju Lan dan Widjajanti M. Santoso, 2000, *Kelas Menengah Indonesia: Déjà Vu*, Penerbit PMB-LIPI, Jakarta.

Warsilah, Henny (ed.), 2001, *Pluralitas Kelas Menengah dalam Perubahan Sosial*, Penerbit PMB-LIPI, Jakarta.

Warsilah, Henny (ed.), 2002, *Transformasi Sosial Masyarakat: Kelas Menengah dan Upaya Pengelolaan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Bawah*, Penerbit PMB-LIPI, Jakarta.

Warsilah, Henny (ed.), 2005, *Kelas Menengah dan Demokratisasi*, Penerbit LIPI Press, Jakarta.

Warsilah, Henny (ed.), 2007, *Gerakan Sosial Masyarakat Sipil di NAD-Aceh Guna Menuntut Hak-hak Sosial Budaya, Ekonomi dan Politik*, Penerbit LIPI Press, Jakarta.

_____, dan Dede Wardiat, 2003, *Militer Without Militerism*, PMB-LIPI, Jakarta.

Surat Kabar:

Kompas, 2000

Media Indonesia, 1998

Merdeka, 1998

Bisnis Indonesia, 1998

Republika, 1998

Suara Karya, 1998

BAGIAN DUA

KONSTRUKSI TERBENTUKNYA PENDUDUK GOLONGAN MUDA DAN KELAS MENENGAH LOMBOK

Henny Warsilah

2.1. Pengantar

Bagian ini akan mendiskripsikan dan menganalisa konstruksi terbentuknya penduduk golongan muda dengan cara memetakan berbagai corak kehidupan orang muda di Kota Mataram-Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, budaya dan kewarganegaraan. Sehingga nantinya dengan mudah pembaca dapat mengikuti analisa tentang sumbangan dan peran generasi muda atau penduduk golongan muda dalam menentukan arah dan pola perubahan sosial politik di daerah Lombok.

Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari sisi kependudukan didominasi oleh penduduk golongan muda usia, mereka berusia antara 15 hingga 35 tahun. Penduduk golongan muda ini secara kuantitas jumlahnya yang paling besar dibanding dengan golongan penduduk usia lainnya. Dengan kekuatan mereka yang besar, eksistensi mereka cukup dominan dalam berbagai aspek, misal dalam bidang sosial ekonomi dan sosial politik. Tetapi selain implikasi positif, problema yang dihadapi penduduk golongan muda ini juga cukup pelik, terutama yang terkait dengan masalah pendidikan, angkatan kerja, pengangguran, perkawinan usia muda, perceraian, kriminalitas, dan rendahnya produktivitas penduduk kelompok muda.

2.2. Modal Sosial Penduduk Muda: Produktivitas atau Permasalahan?

Jumlah penduduk NTB pada tahun 2007/2008 ada 4.257.306 jiwa, dimana 70,83% tinggal di pulau Lombok dan sisanya 29,17% tinggal di pulau Sumbawa. Pertumbuhan penduduk NTB relatif kecil, data Susenas (2004) tiga tahun lalu menyebutkan penduduk NTB berjumlah 4.076.040 jiwa. Artinya selama kurun waktu itu pertumbuhan penduduk hanya mengalami kenaikan sekitar 4% saja. Namun, dari tahun ke tahun penduduk golongan muda di Provinsi NTB jumlahnya cukup besar dan jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Data Susenas tahun 2003/2004 menyebut ada sekitar 35,32% penduduk muda dari total penduduk NTB. Sedang di Kota Mataram jumlah penduduk golongan muda pada tahun 2007/2008 ada sekitar 32,7% atau 2011 jiwa dari total penduduk yang bersekolah. Jumlah yang besar ini selain merupakan aset bagi Kota Mataram khususnya, dan Provinsi NTB umumnya, tetapi juga membawa persoalan-persoalan yang cukup rumit. Karena golongan penduduk muda selain mampu menyumbangkan jumlah yang besar kepada angkatan kerja dan usia produktif, tetapi juga banyak menimbulkan masalah sosial, misal tingginya angka perkawinan usia muda dan tingginya angka perceraian. Selain itu, dengan latar belakang pendidikan yang rendah, mereka angat sulit memperoleh pekerjaan, maka pengangguran pada golongan muda juga sangat tinggi. Kondisi ini berdampak pada tingginya angka kriminalitas di perkotaan, terutama perampasan motor dengan kekerasan.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2004-2008

| Jumlah penduduk Kabupaten/Kota | Tahun 2004 | Tahun 2008 |
|--------------------------------|------------|------------|
| Lombok Barat | 724.491 | 782.943 |
| Lombok Tengah | 783.472 | 825.772 |
| Lombok Timur | 1.027.805 | 1.053.347 |
| Sumbawa | 469.162 | 403.500 |
| Dompu | 197.288 | 206.414 |
| Bima | 406.788 | 410.275 |
| Sumbawa Barat | *) | 95.837 |
| Mataram | 348.870 | 353.183 |
| Kota Bima | 118.164 | 126.035 |
| NTB | 4.076.040 | 4.257.306 |

Sumber: Susenas Tahun 2004 dan 2008

Daerah Kabupaten terpadat penduduknya adalah Lombok Timur, baru Lombok Tengah dan Lombok Barat, dan terendah penduduknya adalah kota Bima. Dan daerah kecamatan terpadat penduduknya adalah Ampenan dan kecamatan Selaparang.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Kota Mataram Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008

| Kecamatan | Penduduk Laki-Laki | Penduduk Perempuan | Total Jumlah |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Ampenan | 35.233 | 35.450 | 70.683 |
| Sekarbela | 19.932 | 20.189 | 40.121 |
| Mataram | 33.874 | 33.785 | 67.659 |
| Selaparang | 34.334 | 32.942 | 67.276 |
| Cakranegara | 31.296 | 31.367 | 62.663 |
| Sandubaya | 23.705 | 24.034 | 47.739 |
| Kota Mataram | 178.374 | 177.767 | 356.141 |

Sumber: BPS: Mataram Dalam Angka 2007/2008

Penduduk Kota Mataram didominasi oleh penduduk laki-laki dan Angkatan kerja di Kota Mataram mencapai 124.777 orang. Separuh lebih dari penduduk golongan muda ini memiliki aktivitas bekerja sebagai karyawan dan buruh. Padahal pekerjaan dari sisi

sosial dan ekonomi yang mampu memberi status dan penghasilan tinggi dibutuhkan oleh seseorang untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, sementara dari sisi sosial pekerjaan yang disandang seseorang akan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan yang dimilikinya dan mengacu kepada gengsi sosial dalam masyarakat. Namun kenyataannya, 50% penduduk golongan muda ini memiliki aktivitas bekerja sebagai buruh baik disektor industri maupun pertanian.

Provinsi NTB, Kota Mataram khususnya di era otonomi daerah menunjukkan pembangunan yang pesat terutama pembangunan infrastruktur, banyak pertokoan yang selesai tahap pembangunannya pada tahun 2008 ini. Namun, pembangunan ini tidak otomatis dapat menyerap kesempatan kerja yang besar karena hanya berupa Ruko yang dikelola oleh keluarga. Sementara yang dibutuhkan NTB adalah pembangunan industri mengingat kekayaan alam NTB yang melimpah, seperti budidaya mutiara, ikan hias, jambu mete, tembakau, kacang tanah, tenun, gerabah, bata dan tenun tradisional. Tetapi sayang, NTB hanya berfungsi sebagai tempat tanam saja, sementara hasilnya dikirim ke berbagai daerah untuk dikembangkan lebih lanjut. Artinya tidak ada satupun pabrik, misal pabrik rokok yang didirikan di Lombok padahal kualitas tembakau di sini adalah nomor satu. Sementara ini hanya ada gudang-gudang tembakau untuk tempat penyimpanan tembakau kering. Jika saja dibangun pabrik rokok, maka angkatan kerja muda dapat terserap dengan baik. Begitupun dengan usaha pengelolaan pasca panen mutiara dan home industri tenun misalnya ternyata hanya mampu dikelola secara industri rumahan dan pada umumnya menyerap sedikit tenaga kerja berupa tenaga kerja keluarga. Jadi pengelolaan pasca panen mutiara dan home industri tenun ternyata tidak mampu memberi peluang kerja secara besar-besaran bagi penduduk golongan muda.

Tingginya jumlah penduduk golongan muda di Kota Mataram dan Provinsi NTB pada umumnya seharusnya merupakan modal sosial yang sangat bermanfaat bagi laju pembangunan Provinsi NTB,

namun jika kualitas pendidikan golongan muda ini memadai. Tetapi faktanya, tingkat pendidikan penduduk golongan muda ini relatif rendah, bahkan cukup banyak dari mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah sehingga mereka buta huruf. Data tahun 2004 mencatat angka buta huruf di Kota Mataram jumlahnya mencapai 8,8%, sementara tahun 2007/2008 penduduk buta huruf jumlahnya mengalami peningkatan, mencapai angka 9,43% terutama mereka yang bermukim di pedesaan. Jika kita perbandingan tingkat pendidikan selama lima tahun yang pernah dienyam golongan muda antara tahun 2003/2004 dan 2007/2008, maka angkanya cukup signifikan mengalami perubahan, terutama angka penduduk buta huruf di Kota Mataram mengalami peningkatan cukup tinggi hampir mencapai 10%. Tetapi angka penduduk yang berhasil menamatkan jenjang pendidikan tinggipun mengalami peningkatan hingga mencapai 14%.

Tabel 2.3. Prosentase Pendidikan Penduduk Golongan Muda Tahun 2003/2004-2007/2008

| Tingkat Pendidikan | Tahun 2003/2004 Desa | Tahun 2003/2004 Kota | NTB Tahun 2008 | Mataram Tahun 2008 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| Buta Huruf/Tidak pernah Sekolah | 10,11 | 4,87 | 8,08 | 9.43 |
| Belum/Tidak tamat SD | 14,07 | 13,46 | 13,83 | - |
| Tamat SD | 34,81 | 27,98 | 32,16 | 20.9 |
| SMP | 24,15 | 24,17 | 24,16 | 19.0 |
| SMU | 15,26 | 25,45 | 19,21 | 36.8 |
| Universitas/Akademi | 0,10 | 1,58 | 2, 53 | 14.1 |

Sumber: Data Susenas, BPS Provinsi NTB tahun 2003/2004 dan Mataram dalam Angka Tahun 2007/2008.

Penduduk golongan muda yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah terbesar berada di pedesaan, dan yang hanya tamat sekolah dasarpun jumlahnya cukup besar mencapai sekitar 35%. Mereka yang berhasil menamatkan pendidikan sekolah menengah pertama jumlahnya cukup lumayan ada sekitar 24,15%. Tetapi yang berhasil menduduki dan menyelesaikan sekolah lanjutan atas jumlahnya jauh lebih kecil terutama mereka yang bermukim di daerah

perkotaan, yakni sekitar 15,26% saja. Begitupun jumlah penduduk golongan muda yang tidak pernah bersekolah di daerah perkotaan, jumlahnya lumayan ada sekitar sekitar 4,87%. Sementara mereka yang berhasil menamatkan pendidikan sekolah menengah pertama dan atas jumlahnya cukup tinggi, yakni masing-masing ada 24,17% dan 25,45%. Bahkan ada sekitar 1,58% penduduk golongan muda di NTB yang berhasil menyelesaikan sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi dan untuk Kota Mataram angka cukup besar yakni sekitar 14%.

Data tersebut menggambarkan, bahwa penduduk golongan muda yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak memiliki kesempatan untuk bersekolah hingga mencapai tingkat pendidikan tinggi dari pada mereka yang bermukim di pedesaan. Data Tahun 2008, khusus untuk Kota Mataram saja jumlah murid sekolah dasar ada 41.654 orang, jumlah ini sedikit lebih kurang dari data tahun 2004 yang menyebutkan data murid SD berjumlah 41.998 orang. Murid SMP berjumlah 15.819, SMU 9.887 dan sekolah kejuruan 6.119, jadi total SMU dan kejuruan ada 16.006 orang. Sementara jumlah total penduduk kota Mataram ada 356.141 jiwa, berarti ada sekitar 20,63% penduduk yang bersekolah di luar jenjang pendidikan tinggi.

Aktivitas utama penduduk golongan muda NTB adalah bekerja, jumlahnya mencapai 55,27%, namun mereka yang masih mencari pekerjaan jumlahnya cukup besar ada sekitar 11,73%. Kegiatan mengurus rumah tangga yang dilakukan penduduk golongan muda atau tidak bekerja jumlahnya cukup besar ada sekitar 16,97% dan jumlahnya hampir seimbang antara daerah pedesaan dan perkotaan. Sementara mereka yang masih sekolah jumlahnya hanya berkisar 13,53% dan yang melakukan kegiatan lainnya ada 2,49%. Jika diperbandingkan penduduk muda yang bekerja antara daerah pedesaan dan di perkotaan, terbanyak bekerja dilakukan oleh mereka yang bermukim di pedesaan, namun mereka yang mencari kerja lebih banyak di perkotaan dari pada pemuda di desa.

Latar belakang rendahnya pendidikan yang dimiliki penduduk golongan muda ini berdampak pada aktivitas yang

dikerjakan penduduk golongan muda di Kota Mataram, di pinggiran kota, pemuda yang aktivitas utamanya mengurus rumah tangga menempati urutan kedua terbesar (18,04%) setelah aktivitas bekerja (64,32%). Kebalikannya, di perkotaan pemuda yang aktivitas utamanya bersekolah (20,31%) menempati urutan kedua terbesar setelah bekerja (47,77%). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan di daerah pedesaan yang dilakukan golongan muda sangat tinggi, parahnya lagi mereka cenderung melakukan perkawinan pada usia muda di bawah usia 20 tahun. Di pedesaan, mereka yang melakukan perkawinan pada usia di bawah dua puluh tahun ada sekitar 60,93%, sementara di kota sama tingginya ada 52,88%. Dan yang menikah di atas dua puluh tahun di desa ada 39,07% dan di kota mencapai 47,12%. Ini berarti di pedesaan penduduk muda lebih cenderung melakukan perkawinan pada usia muda, terutama dilakukan di desa-desa adat sasak, misal kampung 'Sade' dimana para pemuda atas seijin orang tua masih menjalankan adat '*merare*' atau adat untuk melarikan anak gadis antara usia 15-18 tahun untuk dinikahi. Kondisi ini tentu saja berimplikasi pada tingkat perceraian yang juga tinggi, di pedesaan angka perceraian mencapai angka 4,38% dan di kota tingkat perceraian mencapai angka 3,88%.

Pekerjaan yang banyak ditekuni oleh penduduk muda di pedesaan adalah bertani, yakni ada sebanyak 47,63%, mereka yang bekerja di sektor perdagangan ada 15,42%, industri 12,07% dan jasa 14,73%, lainnya 10,14% (Susenas tahun 2003/2004). Padahal saat ini lahan pertanian cenderung berkurang akibat kapitalisasi tanah-tanah pertanian dan karena terjadinya polarisasi sosial dimana tanah-tanah pertanian di pedesaan cenderung berpindah kepemilikannya. Hal lain sampai saat ini terjadi sengketa atas pengambilan lahan pertanian penduduk oleh Pemda untuk pembangunan bandara Internasional, sehingga menimbulkan konflik yang cukup panas antara petani dengan Pemda akibat ganti rugi yang tidak sepadan.

Untuk Kota Mataram, aktivitas/pekerjaan utama penduduk Mataram sebagian besar adalah sebagai karyawan jumlahnya mencapai 59,72%, buruh tetap ada 4,12%; berusaha sendiri tanpa

dibantu orang lain 31,55%, pekerja pada keluarga tidak dibayar 4,61%. Sektor jasa menyerap tenaga kerja sebesar 44,18%, sektor perdagangan 24,49% dan sektor pertanian menyerap 6,51% (BPS, Mataram dalam angka 2007/2008:77-78). Sektor pertanian paling sedikit menyerap tenaga kerja karena memang Kota Mataram adalah daerah perkotaan dan merupakan pusat pemerintahan sehingga kegiatan di sektor jasa dan perdagangan merupakan aktivitas utama penduduk.

Rendahnya latar belakang pendidikan yang dimiliki penduduk muda, selain berimplikasi kepada tingginya angka perkawinan usia dini dan angka perceraian, terutama berdampak kepada tingginya angka kriminalitas di Provinsi NTB dan khususnya Kota Mataram. Jumlah angka kriminalitas setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya perkembangan kota.

Tabel 2.4. Perkembangan Tindak Kriminalitas di NTB Tahun 2004

| No | Kasus | Tahun 2004 |
|----|-----------------------------|------------|
| 1 | Pencurian berat | 416 |
| 2 | Pencurian Motor | 248 |
| 3 | Pencurian dengan kekerasan | 93 |
| 4 | Pencurian dengan pemberatan | 108 |
| 5 | Narkoba | 8*) |
| 6 | Pembakaran | 8 |
| 7 | Pembunuhan | 13+) |
| 8 | Perkosaan | 49^) |
| 9 | Uang palsu | - |

Sumber: BPS Provinsi NTB bekerjasama dengan Bappeda NTB, Tahun 2004

Keterangan:

- *) Kejahatan Narkoba Tahun 2002 Ada 41 Kasus, 2003 Ada 30 Kasus
- +) Kejahatan Pembunuhan Tahun 2002 Ada 22 Kasus, 2003 Ada 27 Kasus
- ^) Kejahatan Perkosaan Tahun 2002 Ada 16 Kasus, 2003 Ada 31 Kasus

Tabel 2.5. Perkembangan Tindak Kriminalitas di Kota Mataram Tahun 2008

| No | Kasus | Laki-laki | Perempuan | Total |
|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | Pelanggaran ketertiban umum | 39 | - | 39 |
| 2 | Pembakaran | 12 | - | 12 |
| 3 | Mata uang palsu | 3 | - | 3 |
| 4 | Pemalsuan materai | 2 | - | 2 |
| 5 | Pemerkosaan | 19 | - | 19 |
| 6 | Perjudian | 38 | 1 | 39 |
| 7 | Pembunuhan | 8 | - | 8 |
| 8 | Penganiyaan | 25 | - | 25 |
| 9 | Pencurian | 111 | 1 | 112 |
| 10 | Perampokan | 14 | - | 14 |
| 11 | Penggelapan | 30 | 1 | 31 |
| 12 | Penipuan | 11 | 1 | 12 |
| 13 | Perusakan barang | 1 | - | 1 |
| 14 | Penadahan | 2 | - | 2 |
| 15 | Narkotika | 85 | 5 | 90 |
| 16 | Korupsi | 1 | - | 1 |
| 17 | Pelanggaran | 1 | - | 1 |
| 18 | UU No 23, ayat 02 | 38 | 1 | 39 |
| 19 | Kejahatan lainnya | 39 | 2 | 41 |
| Jumlah | | 479 | 12 | 491 |

Sumber: Mataram Dalam Angka, Tahun 2008, Lembaga Pemasyarakatan Kota Mataram, 2007/2008

Jika dilihat tren angka kriminalitas sejak tahun 2002, kejahatan pembunuhan dan narkoba mengalami penurunan, tetapi untuk kejahatan perkosaan justru meningkat sangat drastis. Tingkat kriminalitas untuk Kota Mataram tampil dalam bentuk kejahatan pencurian, narkoba dan perjudian dimana angkanya cukup tinggi, begitupun untuk kasus perkosaan. Jenis kejahatan yang dilakukan di Kota Mataram lebih bervariasi jika dibandingkan dengan tingkat provinsi, dan kebanyakan dilakukan oleh laki-laki. Tingginya angka kriminalitas ini bukan hanya disebabkan oleh rendahnya faktor

pendidikan golongan muda saja sehingga mereka tidak dapat terserap dalam sektor pekerjaan tetapi juga akibat perkembangan kota dan media elektronik yang menjangkau hingga ke daerah pelosok yang cenderung memamerkan gaya hidup hedonis dan konsumtif.

Kebijakan otonomi daerah sudah dijalankan di Provinsi NTB yang berkonsekuensi kepada pengelolaan anggaran APBD secara mandiri ternyata belum mampu mensejahterakan masyarakat NTB. Tentu bukan menjadi rahasia umum bahwa anggaran APBD Provinsi NTB banyak yang tidak sesuai dengan peruntukannya karena dikorupsi para elit birokrat dan legislatif. Prilaku koruptif para elit kekuasaan ini telah menyumbang terhadap terjadinya proses pemiskinan penduduk, sehingga kemiskinan yang diderita penduduk NTB mencapai angka 26,47% pada tahun 2007/2008. Dan angka kemiskinan ini cenderung kian meningkat setiap tahunnya. Kelompok penduduk miskin di NTB tersebar hampir merata di seluruh kabupaten/kota, tetapi yang paling banyak penduduk miskinnya adalah kabupaten Lombok Barat, Tengah dan Lombok Timur serta Kabupaten Dompu. Daerah yang paling kecil angka kemiskinannya adalah Kota Mataram dan Bima karena memang infrastruktur lebih banyak dibangun di daerah perkotaan dan lapangan kerja lebih tersedia di kota.

Tabel 2.6. Prosentase Angka Kemiskinan di Provinsi NTB

| Kabupaten/Kota | Tahun 2004/2005 | Tahun 2006/2007 |
|----------------|--------------------|-----------------|
| Lombok Barat | 31,65 | 32,21 |
| Lombok Tengah | 27,01 | 29,08 |
| Lombok Timur | 27,40 | 27,44 |
| Sumbawa | 26,75 | 27,04 |
| Dompu | 24,55 | 27,87 |
| Bima | 22,31 | 24,40 |
| Sumbawa Barat | - | 25,18 |
| Kota Mataram | 10,79 | 10,75 |
| Kota Bima | 15,98 | 13,08 |
| Provinsi NTB | 25,26 | 26,46 |

Sumber: BPS, Profil Sosial Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2006/2007.

2.3. Kontruksi Terbentuknya Golongan Muda di Lombok-NTB

Kontruksi penduduk golongan muda (laki-laki dan perempuan) di Kota Mataram-NTB berada pada usia antara 15 hingga 35 tahun, dan merupakan kelompok penduduk yang secara kuantitas paling besar jumlahnya. Namun secara kualitas, konstruksi golongan muda ini rendah sumberdaya manusianya. Kondisi ini menghalangi kelompok muda untuk berperan aktif dalam pembangunan Provinsi NTB. Terlebih-lebih kelompok muda yang buta huruf jumlahnya cukup tinggi, keterbatasan yang dimiliki sebagian kelompok muda ini menghalangi mereka untuk mengakses teknologi dan informasi canggih. Tentu kelemahan sumberdaya manusia pemuda NTB ini dimanfaatkan secara baik oleh pemuda penduduk pendatang, terutama dari Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi tetangga Bali. Kebanyakan para pendatang beraktivitas di bidang pekerjaan jasa, perdagangan dan telekomunikasi serta transportasi. Sementara penduduk setempat, terutama mereka yang berasal dari pedesaan hanya mampu menjadi buruh dan petani gurem dan mereka yang bermukim diperkotaan terserap dalam sektor jasa dan perdagangan.

Kondisi pendidikan penduduk golongan muda yang rendah dan tingginya jumlah penduduk miskin memberikan kontribusi positif terhadap rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) NTB. Padahal United Nations Development Programme (UNDP) dalam model pembangunannya, menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Sejak tahun 1990, UNDP mengeluarkan laporan tahunan perkembangan pembangunan manusia untuk negara-negara di dunia salah satu alat ukur untuk melihat aspek-aspek yang relevan dengan pembangunan manusia adalah melalui Human Development Index (HDI) yang dikenal dengan istilah Index Pembangunan Manusia (IPM). IPM terdiri dari tiga unsur komponen utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Pada awal pemerintahan Orde Baru fokus pembangunan Indonesia ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga diasumsikan pembangunan dinyatakan berhasil jika

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat tercapai. Selanjutnya fokus pembangunan bergeser ke arah pemerataan pendapatan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Ketika fokus pembangunan ini dinilai tidak optimal, maka sekarang arah pembangunan digantikan dengan paradigma baru yaitu pembangunan manusia. Dalam konsep paradigma pembangunan baru, manusia menjadi fokus utama pembangunan dengan cara melakukan upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar sepenuhnya dapat berpartisipasi di segala bidang pembangunan. Maka elemen-elemen pembangunan manusia ditujukan untuk mencapai sasaran-sasaran hidup sehat dan panjang umur, memiliki pendidikan dan dapat hidup layak.

UNDP menilai negara yang memiliki tingkat pembangunan manusia yang rendah jika IPM-nya berkisar antara 0 sampai 50 dan dianggap kurang memperhatikan pembangunan manusia, negara yang memiliki IPM antara 51 sampai 79 dianggap memiliki tingkat pembangunan manusia yang sedang dan negara yang memiliki nilai IPM pada angka itu dianggap mulai memperhatikan pembangunan manusia. Negara yang memiliki IPM antara 80-100 dianggap memiliki tingkat pembangunan manusia yang tinggi dan negara yang berada pada kategori ini dianggap sangat memperhatikan pembangunan manusia.

IPM untuk NTB dari sisi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup (AHH), dimana antara tahun 2004/2005 AHH NTB mencapai 59,4/tahun dan tahun 2006/2007 mengalami peningkatan menjadi 60,9/tahun. Artinya AHH NTB mengalami kenaikan 1 tahun 5 bulan. Namun, angka ini masih jauh dari angka AHH nasional dimana tahun 2004/2005 mencapai 67,6/tahun dan sedikit menurun pada tahun 2006/2007 menjadi 68,5/tahun (BPS, Profil Sosial Ekonomi Provinsi NTB tahun 2006/2007, hal: 42-43). Sementara AHH pada tingkat regional NTB, memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Dimana AHH terendah ada di kabupaten Lombok Timur (57,8/tahun) dan AHH tertinggi dipegang Kota Mataram (63,4/tahun). Berikut AHH keseluruhan Provinsi NTB:

Tabel 2.7. AHH Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2004-2006/2007

| No | Kabupaten/Kota | Tahun 2004 | Tahun 2005 | Tahun 2006 |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 1 | Lombok Barat | 58,1 | 58,4 | 59,1 |
| 2 | Lombok Tengah | 58,5 | 58,7 | 59,4 |
| 3 | Lombok Timur | 57,8 | 58,3 | 58,6 |
| 4 | Sumbawa | 59,0 | 59,5 | 60,3 |
| 5 | Dompu | 59,5 | 60,0 | 60,6 |
| 6 | Bima | 59,4 | 60,9 | 61,7 |
| 7 | Sumbawa Barat | 58,6 | 59,1 | 60,6 |
| 8 | Kota Mataram | 63,4 | 64,1 | 64,7 |
| 9 | Kota Bima | 61,7 | 61,9 | 62,5 |
| Provinsi NTB | | 59,4 | 60,5 | 60,9 |

BPS, Provinsi NTB Tahun 2006/2007.

Sejalan dengan peningkatan angka AHH untuk Provinsi NTB, indeks kesehatanpun ikut meningkat. Dan indeks kesehatan tertinggi terdapat di Kota Mataram yang mencapai 66,2 sementara terendah dipegang oleh Lombok Timur mencapai 56,0. Untuk Provinsi NTB, kabupaten Lombok Timur dalam pembangunan manusianya selalu menduduki tempat terendah sementara Kota Mataram menduduki posisi tertinggi.

Faktor dominan kedua pembentuk IPM Provinsi NTB adalah pendidikan yang diukur melalui indikator angka rata-rata lama sekolah (AMH) dan angka melek huruf dari penduduk usia 15 tahun ke atas atau penduduk golongan muda. Kecenderungan yang ada semakin tinggi AMH akan semakin kecil prosentase penduduk golongan muda yang buta huruf. Hingga saat ini kemampuan baca tulis dipandang sebagai modal dasar minimal yang harus dimiliki setiap individu agar mereka memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan di segala bidang.

Tabel 2.8. Indeks Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, Tahun 2004-2006

| No | Kabupaten/Kota | Tahun 2004 | Tahun 2005 | Tahun 2006 |
|----|----------------|------------|------------|------------|
| 1 | Lombok Barat | 55,2 | 55,7 | 56,8 |
| 2 | Lombok Tengah | 55,8 | 56,2 | 57,3 |
| 3 | Lombok Timur | 54,7 | 55,5 | 56,0 |
| 4 | Sumbawa | 56,7 | 57,5 | 58,8 |
| 5 | Dompu | 57,5 | 58,3 | 59,3 |
| 6 | Bima | 57,3 | 59,8 | 61,2 |
| 7 | Sumbawa Barat | 56,0 | 56,8 | 59,3 |
| 8 | Kota Mataram | 64,0 | 65,2 | 66,2 |
| 9 | Kota Bima | 61,2 | 61,5 | 62,5 |
| | Provinsi NTB | 57,3 | 59,2 | 59,8 |

Sumber: BPS, Provinsi NTB Tahun 2006/2007.

Angka melek huruf Provinsi NTB meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi angka buta huruf masih tinggi sekitar 20% pada tahun 2006/2007. Angka buta huruf terus menurun pada tahun 2007/2008 menjadi 8,8%, artinya konstruksi golongan penduduk muda dari sisi pendidikan terus mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan infrastruktur sekolah dan ketersediaan dana pendidikan serta guru yang memadai. Namun penduduk golongan muda di kabupaten Lombok tengah dan Lombok Timur tidak seberuntung di daerah lain, kedua daerah ini memiliki angka buta huruf yang paling tinggi. Selain AMH, indikator rata-rata lama sekolah mencerminkan kualitas pendidikan yang pernah dienyam penduduk, terutama dari unsur golongan muda.

Lama sekolah yang pernah dienyam penduduk NTB mencerminkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk untuk menempuh pendidikan formal masih jauh dari angka nasional. Data antara tahun 2004 hingga tahun 2007 (BPS, Profil Sosial Ekonomi NTB tahun 2006/2007) menggambarkan ketimpangan penduduk NTB dalam bidang pendidikan.

Tabel 2.9. Prosentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Provinsi NTB

| No | Kabupaten/Kota | Tahun 2004 | Tahun 2005 | Tahun 2006 |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 1 | Lombok Barat | 75,1 | 73,7 | 73,7 |
| 2 | Lombok Tengah | 69,5 | 71,1 | 71,1 |
| 3 | Lombok Timur | 75,8 | 76,5 | 79,2 |
| 4 | Sumbawa | 87,9 | 88,7 | 89,6 |
| 5 | Dompu | 82,4 | 82,8 | 82,8 |
| 6 | Bima | 81,0 | 81,4 | 85,7 |
| 7 | Sumbawa Barat | 87,8 | 88,6 | 90,6 |
| 8 | Kota Mataram | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| 9 | Kota Bima | 85,8 | 86,2 | 90,0 |
| Provinsi NTB | | 78,3 | 78,8 | 80,1 |

Sumber: BPS, Profil Sosial Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2006/2007.

Tabel 2.10. Prosentase Lama Sekolah Penduduk NTB, 2004-2007

| No | Tahun | Rata-rata lama sekolah | |
|----|-----------|------------------------|----------|
| | | NTB | Nasional |
| 1 | 2004/2005 | 6,4 | 7,2 |
| 2 | 2005/2006 | 6,6 | 7,3 |
| 3 | 2006/2007 | 6,7 | 7,4 |

Sumber: BPS, Profil Sosial Ekonomi NTB, Tahun 2006/2007.

Jika dirinci lebih lanjut, angka lama sekolah untuk beberapa kabupaten tentu jauh dibawah angka regional, seperti di kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Lama sekolah penduduk golongan muda NTB kurang dari 7 tahun, itu berarti hanya setingkat sekolah dasar. Bahkan ada beberapa kabupaten yang lama sekolah golongan mudanya hanya berkisar 5 tahun saja, berarti tidak sampai menamatkan pendidikan sekolah dasar. Keadaan ini disebabkan lebih banyak penduduk yang menyekolahkan anak-anaknya dibangku sekolah yang bernuansa agama, seperti pondok pesantren, madrasah. Memang daerah Lombok Timur merupakan pusat dari organisasi keagamaan Nadatul Waton (NW) yang memiliki ratusan Pondok Pesantren (Ponpes) tersebar dari Lombok Timur hingga Lombok Barat dan Tengah, bahkan hingga ke pulau Sumbawa.

Namun sebaliknya untuk Kota Mataram dan kota Bima angka rata-rata lama sekolah justru melampaui angka rata-rata lama sekolah pada tingkat nasional. Karena infrastruktur gedung sekolah di dua kota ini termasuk yang paling banyak dan dalam kondisi baik, begitupun jumlah guru dan murid seimbang.

Tabel 2.11. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Golongan Muda di NTB

| No | Kabupaten/Kota | Tahun 2003/2004 | Tahun 2004/2005 | Tahun 2006/2007 |
|-----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Lombok Barat | 5,2 | 5,3 | 5,7 |
| 2 | Lombok Tengah | 5,1 | 5,3 | 5,3 |
| 3 | Lombok Timur | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 4 | Sumbawa | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 5 | Dompu | 6,9 | 7,0 | 7,0 |
| 6 | Bima | 7,0 | 7,2 | 7,2 |
| 7 | Sumbawa Barat | 6,8 | 6,9 | 7,0 |
| 8 | Mataram | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 9 | Kota Bima | 8,2 | 8,3 | 8,8 |
| NTB | | 6,4 | 6,6 | 6,7 |

Sumber: BPS, Profil Sosial Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2006/2007.

Faktor pendidikan adalah modal sosial bagi penduduk golongan muda untuk memiliki pekerjaan dan akses kepada sumberdaya sosial politik kota. Tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki penduduk akan mencerminkan kualitas sumberdaya manusia di daerah NTB karena mereka adalah generasi penggerak pembangunan daerah. Tetapi karena latar pendidikan yang dimiliki golongan muda ini masih dalam taraf rendah, maka kegiatan utama yang mereka tekuni juga sangat terpengaruh oleh latar belakang pendidikannya. Sehingga mereka belum sepenuhnya berperan aktif dalam bidang politik, jika ada hanya segelintir saja yang mampu melakukannya. Berdasarkan dua indikator pendidikan di atas maka dapat ditentukan IPM pendidikan, dimana AMH di ukur maksimum 100 dan minimum 0, sedang rata-rata lama sekolah maksimum 15 tahun, diasumsikan hingga ke jenjang perguruan tinggi dan minimum 0 tahun. BPS Provinsi NTB telah menghitung angka IPM pendidikan

per tahunnya, sejak tahun 2004 hingga tahun 2006/2007 sayangnya IPM pendidikan NTB hanya mengalami kenaikan satu digit saja, yakni dari angka 67 naik menjadi 68. Sementara itu angka IPM pendidikan kabupaten Lombok Tengah memiliki angka terendah di bawah 60, sementara Kota Mataram dan kota Bima memiliki IPM pendidikan di atas 70, bahkan mendekati angka 80.

Tabel 2.12. Indeks Pendidikan Provinsi NTB Tahun 2004-2006

| No | Kabupaten/Kota | Tahun 2003/2004 | Tahun 2004/2005 | Tahun 2006/2007 |
|----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Lombok Barat | 60,29 | 60,91 | 61,80 |
| 2 | Lombok Tengah | 57,67 | 59,18 | 59,18 |
| 3 | Lombok Timur | 64,09 | 64,56 | 66,36 |
| 4 | Sumbawa | 74,38 | 74,91 | 75,51 |
| 5 | Dompu | 70,27 | 70,76 | 70,76 |
| 6 | Bima | 69,56 | 70,27 | 73,13 |
| 7 | Sumbawa Barat | 73,64 | 74,40 | 75,96 |
| 8 | Mataram | 79,87 | 79,87 | 79,87 |
| 9 | Kota Bima | 75,42 | 75,91 | 79,56 |
| | NTB | 66,42 | 67,20 | 68,29 |

Sumber: BPS, Profil Sosial Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2006/2007.

Indikator IPM ketiga, adalah pendapatan masyarakat, karena kemampuan keuangan dianggap sebagai modal utama bagi peningkatan kualitas hidup. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan sebagai kebutuhan pokok dianggap akan memberikan kesempatan lebih dalam pemenuhan kebutuhan lainnya. Tabel 13 di bawah memperlihatkan adanya kenaikan indeks pendapatan sejak tahun 2004, bahkan untuk Kota Mataram dan Dompu indeks pendapatannya melebihi indeks pendapatan Provinsi NTB. Tetapi kabupaten dan kota Bima justru memiliki indeks pendapatan terendah se Provinsi NTB, padahal dari sisi indeks pendidikan menempati posisi kedua setelah Kota Mataram.

Tabel 2.13. Indeks Pendapatan Provinsi NTB Tahun 2004-2006

| No | Kabupaten/Kota | Tahun 2003/2004 | Tahun 2004/2005 | Tahun 2006/2007 |
|-----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Lombok Barat | 55,6 | 56,9 | 57,6 |
| 2 | Lombok Tengah | 57,1 | 58,3 | 58,9 |
| 3 | Lombok Timur | 57,5 | 58,5 | 58,6 |
| 4 | Sumbawa | 58,5 | 59,6 | 59,9 |
| 5 | Dompu | 59,3 | 60,8 | 61,6 |
| 6 | Bima | 53,8 | 55,0 | 55,1 |
| 7 | Sumbawa Barat | 56,2 | 58,9 | 59,7 |
| 8 | Mataram | 62,6 | 63,2 | 63,4 |
| 9 | Kota Bima | 54,1 | 55,3 | 55,7 |
| NTB | | 58,0 | 60,8 | 61,0 |

Sumber: BPS, Profil Sosial Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2006/2007.

Tabel 2.14. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB Tahun 2004-2006

| No | Kabupaten/Kota | Tahun 2003/2004 | Tahun 2004/2005 | Tahun 2006/2007 |
|-----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Lombok Barat | 57,0 | 57,8 | 58,7 |
| 2 | Lombok Tengah | 56,9 | 57,9 | 58,5 |
| 3 | Lombok Timur | 58,7 | 59,6 | 60,3 |
| 4 | Sumbawa | 63,2 | 64,0 | 64,8 |
| 5 | Dompu | 62,3 | 63,3 | 63,9 |
| 6 | Bima | 60,2 | 61,7 | 63,1 |
| 7 | Sumbawa Barat | 61,9 | 63,4 | 65,0 |
| 8 | Mataram | 68,8 | 69,4 | 69,8 |
| 9 | Kota Bima | 63,5 | 64,2 | 65,9 |
| NTB | | 60,6 | 62,4 | 63,0 |

Sumber: BPS, Profil Sosial Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2006/2007

Ketiga indikator pendidikan, kesehatan dan pendapatan itu telah menyumbang kepada perhitungan IPM Provinsi NTB. Sesuai dengan perhitungan BPS tahun 2006, Provinsi NTB ditetapkan

sebagai daerah yang memiliki perhatian sedang terhadap indeks pembangunan manusianya, karena angka IPM-nya berada di bawah angka 80. Namun jika dibandingkan dengan IPM pada tingkat nasional, maka Provinsi NTB berada pada level rendah cuma satu angka di atas Provinsi Papua yakni berada di urutan ke-32. Padahal Provinsi Papua adalah provinsi terendah IPM-nya dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, menduduki peringkat ke-33.

Gambaran dari perolehan angka IPM di tingkat provinsi tersebut mencerminkan bahwa memang NTB memiliki sumberdaya manusia yang sedang, maka konstruksi golongan mudanyapun berada pada tahap itu. Kondisi itu diperparah oleh rendahnya PDRB Provinsi NTB yang hanya mencapai angka 2,19% saja pada tahun 2007/2008. Padahal jika dibandingkan dengan dua provinsi tetangga terdekat, yakni Bali dan NTT dimana masing-masing memiliki PDRB 5,28% dan 5,10%, NTB sangat jauh tertinggal. Rendahnya angka PDRB ini mencerminkan rendahnya pertumbuhan perekonomian Provinsi NTB, sementara NTB dikaruniai kekayaan alam tidak terhingga dan merupakan tujuan wisata dunia setelah Bali.

2.4. Penutup: Formasi Kelas Menengah Muda Indonesia vs Kelas Menengah Lombok dalam Konstruksi Sejarah Sosial

Formasi kelas menengah Indonesia jika dikonstruksikan dalam sejarah sosial kekuasaan politik dari mulai pemerintahan Orde Lama (Orla), kemudian Orde Baru (Orba) dan Orde Reformasi sangat menarik. Pada masa pemerintahan Orla menurut Muhaimin, kelas menengah tidak memiliki peran apa-apa dihadapan penguasa dan birokrat, walaupun mereka memiliki peran, peran itu sangat terbatas, karena kuantitas merekapun sangat terbatas, sehingga mereka tidak dinamis (Yahya Muhaimin, 1984:67). Pada masa Orla posisi kelas menengah banyak diisi oleh pengusaha-pengusaha belanda dan Indo, oleh karena itu ketika pemerintah Orla menerapkan kebijakan ekonomi *Benteng*, dengan cara mendorong kemunculan kelas menengah (pengusaha) pribumi dengan cara memberikan

memproteksi berupa kebijakan ekonomi tentang swastanisasi perusahaan-perusahaan asing (Belanda). Kebijakan ekonomi Benteng ini berhasil memunculkan beberapa pengusaha pribumi dan perwira militer yang mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan asing. Tetapi pada perkembangannya karena sebagian besar dari mereka bukanlah *entrepreneur* sejati maka mereka sangat tergantung kepada proteksi pemerintah dan ekonomi negara, sehingga kurang mampu berkembang secara Mandiri.

Kondisi ketergantungan kelas menengah pada negara seperti terjadi pada masa Orla menurut Muhaimin berlanjut hingga masa Orba seperti dikatakannya:

“...sekalipun pemerintah Orba telah melaksanakan sistem ekonomi terbuka, namun pemerintah sangat dominan dalam menentukan kebijakan ekonomi, sehingga ada kecenderungan kuat pengusaha nasional swasta untuk selalu bergantung pada fasilitas serta perlindungan pemerintah. Kebanyakan dari mereka bukanlah kelompok yang mampu berkompetisi dalam bidang ekonomi, dan enggan menanggung resiko seperti lazimnya kelompok *entrepreneur* murni karena mereka hanya mau bergerak pada sektor-sektor yang jelas-jelas dapat memberikan kepastian dan jaminan keuntungan, bukan pada sektor-sektor yang beresiko ekonomi tinggi” (Idem, Muhaimin. 1984:67).

Kecenderungan berinvestasi pada sektor ekonomi tidak berisiko ini pada jangka pendek memang dapat memberikan keuntungan maksimal, tapi dalam jangka panjang mereka akan selalu tergantung kepada pemerintah, dan cenderung tidak Mandiri. Para pelaku kelas menengah pada masa Orde Baru terdiri dari para pengusaha dan pedagang swasta, pengusaha di sektor negara, beberapa kalangan pegawai dan pejabat pemerintah, para perwira militer, kalangan akademis dan kelompok profesional. Mereka semua tumbuh menjadi kelas menengah baru, yang memanfaatkan kondisi ekonomi dan politik yang ada (ibid., Muhaimin, 1984:67). Gambaran tentang pendukung kelas menengah pada masa pemerintahan Orba itu

tidak jauh dari gambaran keberadaan kelas menengah di negara-negara berkembang lainnya. Menurut Samuel P. Huntington (1968), berdasarkan beberapa kejadian di negara berkembang, gejalanya menunjukkan bahwa kelas menengah pada awalnya merupakan golongan yang paling radikal dan revolusioner, terutama seperti mereka yang berada di beberapa negara Amerika Latin. Dimana golongan menengah di Amerika Latin, terdiri dari golongan cendekiawan, perwira-perwira militer dan kaum profesional. Sifat revolusioner mereka akan berubah seiring dengan semakin besarnya jumlah keberadaan mereka dalam masyarakat, sehingga mereka tertransformasi menjadi golongan konservatif yang menikmati fasilitas-fasilitas dari lembaga birokrasi dan bisnis. Karena itu kelas menengah di Amerika Latin dan beberapa negara Asia, dapat naik ke panggung politik bukan karena lewat kegiatannya sebagai *entrepreneur*, namun melalui perlindungan kelompok-kelompok agregat mereka.

Ada kemiripan antara perkembangan kelas menengah di Indonesia dan di Amerika Latin seperti yang digambarkan oleh Huntington, di mana perkembangan kelas menengah di Indonesia telah terkooptasi oleh negara kemudian militer. Di Indonesia, peran dan posisi militer dalam bisnis telah dilegalisasi melalui penerapan konsep Dwi Fungsi ABRI, sehingga militer dapat hadir dalam bidang birokrasi dan ekonomi, terlebih-lebih pada masa pemerintahan Orba dibawah pimpinan Presiden Jendral Suharto sangat dekat dengan militer, maka militer memegang peranan penting dalam berbagai kebijakan ekonomi negara. Kondisi ini tentunya sangat tidak baik bagi perkembangan ekonomi, karena sangat mengganggu pasar dan dapat menghambat perkembangan kelas menengah di luar militer karena sangat tergantung kepada kekuasaan militer, maka jika mereka dihadapkan *vis a vis* dengan kelas menengah militer cenderung akan kalah dari sisi kekuasaan dan posisi tawar (*bargaining position*).

Padahal menurut Barrington Moore Jr (1967: 414-415), dari sisi sejarah pembentukan kelas menengah di Eropah, esensi kelas menengah sebagai kekuatan dalam masyarakat di suatu negara yang

diperlukan untuk mengontrol dan mengimbangi kekuasaan penguasa (Raja dan kelas ningrat pemilik tanah) yang feodalistis. Dengan kekuatan ekonominya, kelompok menengah ini berusaha mengendalikan kesewenang-wenangan kelas atas terhadap golongan bawah, mereka berusaha mengubah kebiasaan dan norma-norma yang terlalu menguntungkan kelompok ningrat dan tuan tanah, menjadi norma yang lebih adil, manusiawi dan rasional. Serta berusaha agar peraturan-peraturan yang dibuat untuk anggota elit terutama dalam hal kepemilikan tanah, menjadi lebih longgar, dalam arti bahwa perkebunan-perkebunan yang dikelola oleh pengusaha-pengusaha dibuka untuk masyarakat golongan bawah (dalam Muhaimin, 1984: 64).

Kehadiran kelas menengah di negara-negara Eropah untuk menjembatani antara kelas atas dan kelas bawah, dan sebagai basis kekuatan serta pendorong utama bagi proses modernisasi di Barat. Oleh karena itu inti pendukung kelas menengah di sana terdiri dari kelompok pedagang dan pengusaha, yaitu mereka yang memiliki faktor produksi atau memproduksi barang dan kapital uang. Kemudian faktor esensial lainnya yang merupakan ciri dari kelas menengah adalah mereka memiliki penghasilan yang besar, merupakan orang-orang yang terdidik, dinamis dan partisipasi mereka dalam masyarakat dirasakan sebagai sesuatu yang penting. Pada perkembangannya pendukung kelas menengah di Eropah melebar, ditambah oleh kaum intelektual dan profesional, pekerja swasta dan pemerintah, bahkan sampai para petani pemilik tanah dan produksi dikategorikan sebagai kelas menengah. Selain pendukung kelas menengah yang kian melebar, dari beberapa literature baratpun, diperoleh gambaran bahwa fungsi kelas menengah telah meluas dari sektor kepentingan ekonomi ke arah percepatan demokrasi (politik praktis). Kondisi ini akan menguntungkan kelas menengah itu sendiri dan kelompok bawah, karena pada umumnya transformasi peran tersebut akan berimplikasi positif terhadap realitas sosial, yakni lahirnya advokasi bagi rakyat guna memerangi dominasi negara.

Salah satu buah manis dari pembagunan di Indonesia pada masa Orba adalah semakin meningkatnya penduduk terdidik dan kelompok profesional, terutama berasal dari penduduk golongan muda diperkotaan. Kelompok intelektual dan profesional kota ini biasa digolongkan sebagai kelas menengah walau sebetulnya masih sangat rapuh secara ekonomi dan politik karena masih tergantung kepada negara dan jika dibandingkan dengan kelas menengah dari negara Asia Tenggara lainnya, kelas menengah Indonesia memang masih lemah. Lemahnya kelas menengah Indonesia¹ disebabkan berbagai faktor, salah satunya proses reformasi pada tahun 1978 pasca kejatuhan rejim Orde Baru di bawah pimpinan presiden Suharto dimana reformasi semula ditujukan untuk membentuk pemerintahan sipil yang demokratis dan berkeadilan sosial ternyata tidak pernah menghasilkan suatu perubahan mendasar, karena kuatnya kecenderungan para elit politik untuk mempertahankan *status quo* membuat reformasi pada semua lini kehidupan sulit dicapai. Sehingga mulai muncul kesadaran dari kelas menengah pada waktu itu jika reformasi harus dimulai dengan membongkar sistem pemerintahan yang korup, militeristik dan sentralistik. Pada titik ini, golongan menengah yang diwakili kelompok profesional, akademisi dan mahasiswa mulai bersatu dengan rakyat untuk melakukan perubahan radikal, karena mereka sadar untuk menjatuhkan rezim Orde Baru harus melibatkan semua unsur masyarakat. Karena pada masa pemerintahan rezim Orde Baru berkuasa, militer memainkan peran yang sangat besar dan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hampir-hampir mereka hadir dalam segala aspek kehidupan masyarakat, melalui konsep dwi fungsi ABRI, oleh karena itu mereka disebut sebagai "*shadow government*". Kebijakan pemerintah Orde Baru saat itu cenderung sentralistik, dimana pluralisme masyarakat Indonesia diseragamkan, diubah menjadi satu yang padu, tanpa perbedaan. Sehingga banyak anggota kelas menengah, terutama yang berasal dari pelaku bisnis (pengusaha) bergandengan tangan dengan anggota militer, maka para pengusaha *terpaksa* menempatkan

¹ Henny Warsilah, *Kelas Menengah di Tengah Perubahan Sosial*, 2001.

anggota militer sebagai komisaris atau penasehat perusahaan. Akibat hegemoni militer yang telah mengakar dalam kebijakan politik dan dunia bisnis menyebabkan perusahaan tidak mampu berkembang secara profesional, dan perusahaan mudah mengalami *collaps* ketika krisis melanda Indonesia. Padahal perusahaan-perusahaan kecil yang tidak memanfaatkan investasi pemerintah cenderung mampu bertahan, bahkan mereka kebanjiran order, terutama perusahaan kayu ukir dan mebeleur dengan memanfaatkan harga dollar yang tinggi, mereka mampu melakukan ekspor barang produksinya ke manca negara.

Melihat kondisi demikian, mulai timbul kesadaran politik dari kelas menengah² untuk melaksanakan reformasi, mau tidak mau harus dimulai di luar sistem pemerintahan. Bola reformasi bergulir demikian cepat, dipelopori oleh dua kekuatan, yakni *Intervensi pihak asing*, terutama Amerika dengan tekanan politik IMFnya dan kelompok *Akademisi dan Profesional*. Transformasi ide-ide reformasi mulai menyebar dan ditangkap oleh mahasiswa yang terkenal dengan semangat idelisme dan reformatifnya. Maka dimulai kerja keras mahasiswa dan kelompok profesional untuk mempertemukan para elit politik pelaku kelas menengah seperti Gus Dur, Megawati, Amien Rais dan Hamengku Buwono X di Ciganjur, guna menyatukan ide dan kehendak. Pada hasil pertemuan Ciganjur, disepakati *platform* reformasi harus menyentuh bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial dan suksesi kepemimpinan. Lagi-lagi para politisi sipil yang duduk dalam lembaga eksekutif dan legislatif yang seharusnya mengapresiasi tuntutan reformasi dan tuntutan suksesi berlaku *keblinger*, dengan cara menganggap bahwa tuntutan tersebut adalah inskonstitusional. Tetapi gelombang demonstrasi mahasiswa dan entitas masyarakat lainnya, terutama profesional dan akademisi kelas menengah berhasil melengserkan Soeharto dari kursi kepresidenannya.

² Idem, Henny Warsilah, *Kelas Menengah di Tengah Perubahan Sosial*, 2001.

Pada kenyataannya memang, pendukung kelas menengah dari unsur kaum terpelajar dan profesional jumlahnya terus bertambah. Mereka sangat majemuk dan terbagi-bagi, ada yang oportunistik, banyak yang konservatif tetapi ada juga yang idealis progresif. Dan diantara sesama minoritas progresif masih tersekat-sekat tembok primordial³. Kelompok profesional sebagai contoh adalah jurnalis muda sejak keruntuhan rejim Orde Baru jumlahnya meningkat dengan pesat seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan media massa. Pada umumnya kelompok ini berpegang pada profesionalitas modern: rasional, bersaing dan memegang teguh etika masyarakat. Ulasan, investigasi dan uraian jurnalisme biasanya merupakan kekuatan sosial kelompok jurnalis dan sering ditakuti oleh para birokrat dan anggota legislatif, terutama mereka yang cenderung bermasalah dengan hukum.

Sementara kelompok intelektual terutama mereka yang dengan sengaja memilih berada di luar birokrasi telah sejak tahun 70-an telah mengikatkan diri pada gerakan sosial dalam wadah LSM. Pada awalnya garis kerja mereka hanya terbatas pada upaya pemberdayaan masyarakat karena memang pada saat itu yang dibutuhkan adalah hal itu. Namun sejak tahun 1990 seiring dengan semakin kuatnya gerakan dan sering dengan mulai berkembangnya permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat terutama penguatan secara sepihak dari Negara sementara masyarakat kapasitasnya cenderung melemah, gerakan sosial LSM sudah meningkat menjadi gerakan sosial politik dengan tujuan untuk memberi bekal pendidikan politik kritis kepada masyarakat supaya paham akan hak-hak mereka sebagai warganegara dan kewajiban yang harus dijalankan⁴. Perkembangan kelompok ini semakin meningkat dan menyebar hingga ke tingkat daerah terutama setelah pasca reformasi dan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah menjadikan peran mereka semakin penting sebagai *mitra* pemerintah

³ Ariel Heryanto, 2000:190-191.

⁴ Henny Warsilah, *Kelas Menengah Déjà Vu*, 2003.

(Daerah) dalam mengelola negara dan sebagai *kelas antara* yang menghubungkan pemerintah sebagai penguasa dan pembuatan kebijakan dengan rakyat sebagai pendukung pemerintah. Bahkan peran penting tersebut telah memposisikan LSM sebagai agen perubahan, agen transformasi sosial dan *vocal point* atau *critical point* yang menyuarakan permasalahan rakyat kepada pemerintah dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang kurang pro rakyat⁵. Melalui *social* dan *cultural capital* yang mereka miliki, yakni pendidikan dan budaya urban yang menjadi ciri khas kelompok upaya pendidikan politik terhadap masyarakat mulai digerakkan. Gerakan mereka menyebar dan kian membesar menjadi gerakan populis yang menyertakan seluruh entitas masyarakat. Jumlah orang muda yang besar, merupakan asset berharga sebagai pengambil keputusan yang aktif, dimana, peran mereka dalam mempengaruhi dan mendorong pertumbuhan *intermediate class* di kota-kota Indonesia sangatlah penting.

Geliat kelas menengah pada level nasional telah mendorong pembentukan dan konstruksi kelas menengah di daerah, karena jika mengandalkan kaum mereka berjuang di Pusat akan sulit mendorong percepatan demokrasi di daerah. Terutama dengan munculnya kesadaran dari kelompok intelektual daerah akan gambaran kondisi penduduk golongan muda di Provinsi NTB yang pada umumnya berupa golongan muda yang kurang produktif karena adanya keterbatasan kepada akses sektor pendidikan dan ekonomi. Golongan penduduk muda ini, khususnya yang bermukim di pedesaan banyak yang memilih menikah pada usia muda dan terpaksa bekerja sebagai petani, karena dengan kemampuan yang dimilikinya mereka tidak mungkin dapat memasuki pasar kerja di sektor formal yang sebetulnya lebih menguntungkan. Keterbatasan sumberdaya manusia NTB, terutama dari golongan penduduk muda memang menjadi kendala bagi mereka untuk meningkatkan produktivitas di dunia kerja dan pendidikan.

⁵ Henny Warsilah, *Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, 2004.

Namun dibalik segala kelemahan yang dimiliki Lombok-NTB, kita patut berbagai hati karena dari struktur lapisan penduduk kelompok muda itu, sekitar 10% adalah kelompok pemuda terdidik di perkotaan yang memiliki akses terhadap dunia politik. Kelompok muda terdidik yang dengan semangat kritikalnya ingin merubah statusquo kondisi yang ada dengan cara mendirikan NGOs atau LSM yang bertujuan untuk mendorong perkembangan demokrasi di tingkat daerah dan mendorong kelompok muda lainnya agar lebih berpartisipasi aktif dalam pembangunan NTB.

Formasi kelompok kelas menengah intelektual muda sebagai bagian dari *civil society* NTB walau secara konsep mampu membangun institusi sosial di tingkat masyarakat dengan cara melahirkan generasi baru LSM dan membangun jaringan di pelbagai sektor, terutama di ranah politik praktis (Parpol dan parlemen daerah) dan birokrasi pemerintahan daerah (Pemda) serta dunia akademisi (Kampus) dan masyarakat awam, namun secara kuantitas jumlahnya hanya segelintir. Keberadaan mereka seolah-olah dapat diibaratkan sebagai *'bottle neck'*, hanya seperti leher botol sempit yang harus menyumbat ruang demokrasi luas di bawahnya.⁶ Namun, seiring dengan itu gerakan organisasi masa yang bernuansa agama "Nadatul Waton" telah berhasil meningkatkan citra penduduk golongan muda NTB. Karena *Tuan Guru Haji* yang mewakili golongan muda telah terpilih sebagai gubernur baru NTB mengalahkan gubernur yang masih menjabat, tentunya harapan besar disandarkan kepada gubernur baru ini, apakah dapat memperbaiki sumberdaya manusia muda menjadi lebih aktif dan produktif untuk membangun NTB atau tidak, waktu yang akan menjawabnya.

Begitupun tingkat produktivitas kelompok muda kelas menengah intelektual NTB tidak kalah dengan produktivitas anak muda di kota besar lainnya, dimana gerakan sosial mereka dapat diidentikan dengan *'gerakan sosial baru'* yang berwatak emansipatoris dan merupakan agensi dan aktor proses transformasi

⁶ Idem, Henny Warsilah, 2003.

sosial dalam masyarakat. Fokus perhatian mereka tertuju kepada jalannya demokrasi lokalitas di NTB, terutama terhadap kasus penyalahgunaan anggaran pembangunan daerah yang banyak dikorupsi, kurangnya pelibatan partisipasi publik dalam pembuatan dan implementasi kebijakan daerah dan partisipasi aktif kelompok perempuan dalam parlemen, serta advokasi masalah pengambil alihan tanah pertanian penduduk untuk kepentingan komersial. Tak kalah penting adalah upaya mereka untuk mendorong pelibatan kelompok perempuan pedesaan untuk terlepas dari kegiatan TKI ilegal, dengan upaya pendampingan maksimal atas kasus kekerasan TKW asal NTB, maklum daerah NTB merupakan daerah asal TKW terbesar untuk Kawasan Indonesia Timur.

Formasi dan konstruksi kelas menengah di daerah menjadi prasyarat penting bagi pembangunan demokrasi daerah, karena mereka unsur masyarakat sipil yang secara kontinu melakukan kontrol dan kritikal terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan publik. Tanpa kehadiran mereka niscaya demokrasi di daerah hanya sebatas demokrasi prosedural atau demokrasi formalitas, dan berkat gerakan sosial politik yang kian mendapat tempat di hati masyarakat kelas menengah mampu menjadikan demokrasi di daerah menjadi demokrasi partisipatif sifatnya, bertujuan memajukan masyarakat daerah dari kondisi kemiskinan di tengah kekayaan alamnya yang melimpah. Untuk mencapai pemerintahan sipil yang demokratis baik di level pusat maupun daerah prasyarat yang diajukan kelas menengah sebagai berikut:

- (a) Tersedianya jaminan atas hak-hak rakyat untuk ikut serta dalam setiap proses kebangsaan dan kenegaraan (dan pemerintahan di daerah).
- (b) Terbukanya akses rakyat terhadap keputusan-keputusan pemerintah (Pusat dan Daerah).
- (c) Pengambilan kebijakan yang tidak diskriminatif terhadap ras, etnis, golongan, gender dan sebagainya.
- (d) Adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers untuk mengekspresikan dan mengungkapkan kehendak dan aspirasi rakyat di Pusat maupun Daerah.

- (e) Penegakan supremasi hukum tanpa memandang perbedaan ras, etnis, golongan, gender dan sebagainya.
- (f) Harus ada pengurangan dominasi negara pada ranah publik, untuk itu diperlukan desentralisasi dalam bidang politik, ekonomi dan kebudayaan baik di pusat maupun daerah.
- (g) Diskursus publik dan partisipasi publik harus dihidupkan dan mendapat tempat dalam pemerintahan dan negara.
- (h) Harus ditumbuhkan unsur-unsur ekonomi pada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sehingga ekonomi rakyat dapat berkembang dan mampu melepaskan diri dari ekonomi negara⁷.
- (i) Harus didorong pertumbuhan dan peningkatan kelas menengah sebagai unsur *civil society* yang independen yang berfungsi sebagai *agent of change* dan *agent of reform* dalam masyarakat.

Kelas menengah di daerah bercirikan pluralitas dan cenderung bebas nilai karena terbentuk melintasi batas-batas dan friksi-friksi etnis, ras, agama dan kelas sosial. Kedudukan dan posisi kelas menengah dalam stratifikasi sosial masyarakat seperti yang diungkapkan Mosca dan Pareto⁸ berada dalam kelompok non elite, termasuk di dalamnya kelompok arus bawah atau *mass society*. Sedang struktur masyarakat secara keseluruhan terbagi dalam dua bagian berikut:

- (1) Kelompok Elite yang terdiri dari:
 - a. Elite dalam pemerintahan (*Governing Elite*)
 - b. Elite yang berada di luar pemerintahan (*Non Governing Elite*)
- (2) Kelompok Non Elite, termasuk di dalamnya kelompok arus bawah atau *mass society* (Vilfredo Pareto, 1966)

Sementara Mill's⁹ dalam penjelasannya tentang teori Kekuasaan Elite (*The Power Elite*), membagi stratifikasi masyarakat

⁷ Henny Warsilah, Thung Ju Lan dan Asvi Marwan Adam: *Aspek Etnisitas dan Pluralitas Menuju Masyarakat Madani*, dalam Firdausy et. Al.: Sumbangan ilmu Sosial Untuk Pembentukan Masyarakat Madani, PEP-IPSK, LIPI, 1999.

⁸ Mosca and Pareto, 1966.

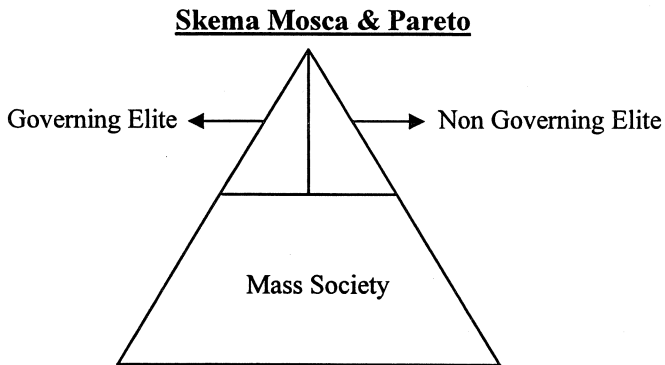
⁹ Wright Mills, 1956.

berdasarkan kekuasaan politik dalam suatu negara berada dalam tiga tingkatan stratifikasi berikut:

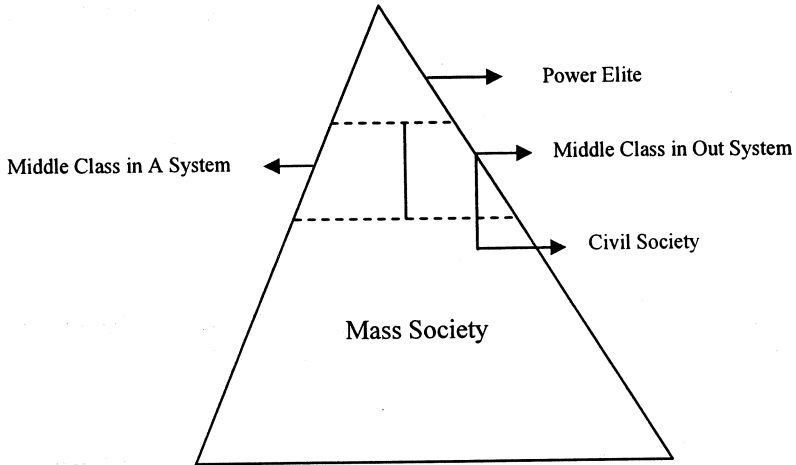
- (1) *Power Elite*
- (2) *Middle Levels of Power yang memiliki dua level:*
 - a. *Middle Class in a System,*
 - b. *Middle Class in out of System*
- (3) *Mass Society* (Wright Mills, 1956).

Agak berbeda dengan Mosca dan Pareto, Mills secara tegas menempatkan kelas menengah dalam stratifikasi tersendiri, yaitu dalam middle levels of power, dimana kelas menengah dalam versi Mill's terbagi dua, yakni: Kelas menengah yang berada di dalam sistem kekuasaan, dan kelas menengah yang berada di luar sistem kekuasaan. Menurut Mill's, kelas menengah yang berada di luar kekuasaan inilah yang memegang peranan penting dalam proses penyadaran politik rakyat, dan mereka dianggap paling kritis. Kelompok menengah ini kemudian bergabung dengan kelompok arus bawah yang telah mengalami penyadaran politik untuk membentuk suatu masyarakat *civil society*.

Struktur masyarakat versi Mosca dan Pareto serta skema Mills jika kita gambarkan dalam piramida akan menghasilkan struktur yang menarik, yakni sebagai berikut:



Skema Mill's



Jika kita gabungkan antara skema Mosca & Pareto (Skema I) dengan skema Mill's (Skema II), maka terlihat dalam skema I, bahwa yang dinamakan kelas menengah berada dalam kelas Governing Elite dan Non Governing Elite. Tidak seperti terlihat dalam Skema II, posisi kelas menengah terlihat sangat jelas pada posisi menengah. Tetapi memang ada kesamaan mendasar di antara dua skema tersebut, yakni bahwa kelas menengah secara dikotomis terbelah menjadi dua, yakni mereka yang berada dalam sistem kekuasaan (dalam istilah Mosca & Pareto: Governing elite) dan mereka yang berada di luar sistem kekuasaan (Non Governing elite). Sementara mengenai posisi kelas menengah di Indonesia, dari beberapa pengamat terlihat bahwa mereka bersepakat untuk menempatkan kelas menengah dalam posisi yang berada di dalam kekuasaan atau dalam istilah umumnya sangat *tergantung kepada kekuasaan*. Seperti yang diungkapkan oleh Arief Budiman bahwa: "...kelas menengah Indonesia berada dalam posisi yang dilematis dengan kondisi politik sekarang, mereka sangat tergantung kepada negara. Dan umumnya konsentrasi modal terjadi pada sebagian kelas menengah yang dekat dengan kekuasaan, dalam kondisi demikian mereka tidak mampu memperkuat basisnya, mereka

justru takut kepada kekuasaan negara karena memang negara jauh lebih kuat dari kelompok mereka”. Oleh karena itu menurut Arief Budiman, kelas menengah hanya akan bisa menjadi besar dan luas jika kelompok tersebut menciptakan kekuatan di luar negara dengan cara beraliansi dengan kelas bawah. Karena kelas bawah itulah yang paling berkepentingan dengan perubahan, sebab secara teoritik mereka yang paling menjadi korban¹⁰.

Sebetulnya Arief Budiman dalam kontruksinya tentang kelas menengah mengadopsi teori dari Mill's, dimana disebutkan bahwa kelas menengah yang berada di luar sistem kekuasaanlah yang dapat bersikap kritis dan mereka mampu melakukan pendidikan politik pada arus bawah atau masyarakat akar rumput. Dan bila kelas menengah ini bergabung dengan masyarakat arus bawah yang telah mengalami kesadaran politik maka mereka akan mampu membentuk *civil society*. Kalau pendapat Mill's dan anjuran Arief Budiman diterapkan untuk kasus Indonesia, kelihatannya agak sulit karena kelas menengah di Indonesia tumbuh di dalam kelas elit yang memagang kekuasaan. Seperti diungkapkan oleh Arief Budiman, bahwa: “...mustahil menumbuhkan kelas menengah baru yang lebih besar dan berkualitas untuk dijadikan agen reformasi, jika sistem demokrasi ekonomi yang ada tidak pernah berjalan baik. Kenyataannya sekarang ini, justru melahirkan kelas menengah yang cengeng, konservatif terhadap perubahan, karena takut berbagai keuntungan yang diperoleh melalui akses elit politik hilang”¹¹.

Apa yang takutkan saudara Arief Budiman pada masa lalu (Orba), sekarang ini pasca Orde Baru telah megalami perubahan, kelas menengah walau separuhnya masih tergantung kepada negara baik secara ekonomi dan politik, sebagian besar saat ini mampu mandiri karena mendapat sokongan dana dari lembaga donatur yang berasal dari luar negeri seperti UNDP dan World Bank sehingga

¹⁰ Arief Budiman, 1996, Litbang Kompas dan Pusat Informasi Kompas, Jakarta.

¹¹ Ibid., Arief Budiman, 1996.

mereka mampu bersikap independen. Selain itu ada kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah seperti telah diundangkan UNESCO, dimana pemerintah berkewajiban menjadikan LSM atau NGOs sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan negara. Dukungan kebijakan dan pendanaan itu terbukti telah mampu mendobrak dominasi negara dalam pengelolaan pemerintahan, dan memaksa negara untuk melibatkan kelas menengah terutama dari unsur profesional, akademisi, LSM, mahasiswa dan jurnalis sebagai mitra pendamping pemerintah dalam mengelola negara. Misal dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang pro rakyat, kontrol sosial dan kritik sosial yang disampaikan secara terus menerus. Kelas menengah saat ini memiliki kesetaraan hubungan dengan negara (pemerintah) dalam memajukan demokrasi partisipatoris, bukan lagi sebagai alat kekuasaan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu tetapi menjadi mitra kerja. Dalam iklim politik yang telah berubah, kelas menengah menjelma menjadi agen pembaharu, agen transformasi sosial dan *vokal point* bagi masyarakat ketika berhadapan dengan negara.

2.5. Kepustakaan

- Ariel Heryanto, 2000, *Perlawanan dalam Kepatuhan, Esai-esai Budaya*, ed. Idi Subandy Ibrahim, Penerbit Mizan, Bandung.
- Arief Budiman, 1996, Litbang Kompas dan Pusat Informasi Kompas, Jakarta.
- Basis Susilo (ed.), 1997, *Masyarakat dan Negara: Kado untuk Prof. Soetandyo Wignyosubroto*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya.
- Henny Warsilah, Thung Ju Lan, dan Asvi Marwan Adam, 1999, *Aspek Etnisitas dan Pluralitas Menuju Masyarakat Madani*, dalam Firdausy et.al.: *Sumbangan Ilmu Sosial untuk Pembentukan Masyarakat Madani*, PEP-IPSK, LIPI, Jakarta.

- Henny Warsilah, Thung Ju Lan dan Tine Suartina, 2001, *Kelas Menengah di Tengah Perubahan Sosial*, Penerbit PMB-LIPI, Jakarta.
- Henny Warsilah, Thung Ju Lan dan Widjajanti M. Santoso. dkk, 2003, *Kelas Menengah Déjà Vu*, Penerbit PMB-LIPI, Jakarta.
- Henny Warsilah, Thung Ju Lan dan Soewarsono, 2003, *Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Penerbit PMB-LIPI, Jakarta.
- BPS, Profil Sosial Ekonomi Provinsi NTB tahun 2006/2007.
- BPS Provinsi NTB bekerjasama dengan Bappeda NTB, tahun 2004.
- BPS Provinsi NTB tahun 2003/2004.
- Mataram Dalam Angka, Tahun 2008, Lembaga Pemasarakatan Kota Mataram, 2007/2008.
- Mills, Wright, 1956, *The Power Elite*, New York, Oxfrud University Press.
- Pareto, Vilfredo, 1966, *Scritti Sociologici*, Turin U.T.E.T, dalam Hasyim, PRISMA, Penerbit LP3ES-Jakarta.
- Susenas Tahun 2003, 2004 dan 2008.
- Samuel P. Huntington, 1968, "Political Order in Chaning Societes", New Haven, Conn: Yale University Press, dalam Yahya A. Muhaimin, *Politik, Pengusaha Nasional dan Kelas Menengah Indonesia*, PRISMA No. 3, Maret, 1944 , Penerbit LP3ES-Jakarta.
- Yahya A. Muhaimin, *Politik, Pengusaha Nasional dan Kelas Menengah Indonesia*, PRISMA No. 3, Maret, 1944, Penerbit LP3ES-Jakarta.

BAGIAN TIGA

KELAS MENENGAH MUDA DAN PERUBAHAN SOSIAL POLITIK DI LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT

Henny Warsilah

3.1. Pengantar

Kelas menengah muda terdidik di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tepatnya di Pulau Lombok walau hanya merupakan lapisan tipis dari struktur sosial penduduk namun dapat diibaratkan sebagai sebuah peta kekuatan sosial politik karena mereka adalah salah satu penentu arah dan pola perubahan sosial politik di daerah Mataram-Lombok. Kelas menengah muda ini terbentuk dari dua kutub berbeda: *Pertama*, pemuda terdidik produk dari universitas setempat, seperti Universitas Mataram (UNRAM), FKIP, Universitas Muhamaddiyah dan perguruan tinggi lain. Semenjak mereka masih menjadi mahasiswa telah terlibat secara intens dalam berbagai LSM dan NGOs atau Organisasi Non Pemerintah (Ornop) untuk ikut melakukan kontrol dan kritik sosial kepada Pemerintah Daerah dan ketika mereka selesai kuliah bergabung dengan LSM yang telah memiliki nama atau mendirikan LSM yang cukup bergengsi di Lombok. Pengalaman dan sumbangan gerakan sosial kelompok orang muda terdidik sebagai kelompok kritikal telah berhasil mendorong proses demokrasi di daerah Lombok. Konstruksi terbentuknya gerakan sosial kelompok muda perkotaan, terutama dari unsur mahasiswa telah memberi sumbangan terhadap arah dan pola perubahan sosial di Lombok.

Kedua, kelompok elit pemuda terdidik secara agamis yang melanjutkan ke perguruan tinggi Islam di dalam maupun luar Lombok, seperti ke Pulau Jawa dan Makasar bahkan hingga ke negara Arab Saudi. Sebagian kecil dari mereka adalah kelompok elit yang

masih memiliki akar elit “kedatuan” yang disejajarkan dengan kelompok elit bangsawan keturunan kerajaan. Dan sebagian besar adalah intelektual muda yang berasal dari masyarakat luas, termasuk ke dalam kelompok ini adalah para pemuda santri jebolan pondok pesantren lokal maupun pondok pesantren yang berbasis di Jawa.

Kesadaran dari kedua kelompok pemuda terdidik Lombok baik secara bersamaan, maupun sendiri-sendiri telah ikut terlibat secara aktif dalam meletakkan arah perubahan sosial dan politik dalam berbagai aspek, seperti di bidang kesehatan, hukum, pariwisata, pendidikan, dakwah, ekonomi kerakyatan, revitalisasi budaya, politik praktis, advokasi dan pemberdayaan. Bagaimana gambaran peta kekuatan mereka dan sumbangan apa yang mereka berikan dalam menentukan pola dan arah perubahan sosial politik Lombok tepatnya Provinsi NTB berikut analisa paparannya dimulai dengan mengkonstruksikan sejarah gerakan sosial kelas menengah Lombok, kemudian diteruskan dengan kupasan tentang keberperanan kelas menengah intelektual dari unsur LSM dan Ornop serta dari unsur Ulama muda dalam partisipasinya mendorong perubahan sosial politik ke arah demokratisasi di daerah NTB. Analisa ditutup dengan penjelasan tentang pelibatan kelas menengah muda dari unsur intelektual dalam penentuan arah dan pola perubahan sosial politik di tingkat daerah.

3.2. Gerakan Sosial Kelas Muda Lombok: *Tuan Guru* vs LSM dalam Perspektif Sejarah

Mayoritas masyarakat Lombok-NTB berasal dari Suku Sasak yang memiliki budaya dan adat istiadat sama kuatnya dengan suku-suku lainnya, seperti Bali dan Bugis-Makasar misalnya. Masyarakat Sasak semula memeluk agama Hindu, agama ini masuk bersamaan dengan invasi pertama Kerajaan Majapahit dari Jawa ke Lombok. Pada masa lalu Suku Sasak bukanlah suku yang lemah, karena telah berabad-abad dan terus menerus mereka berperang melawan invasi dari Kerajaan Majapahit dari Jawa, Kerajaan Mataram dari Jawa

(abad ke-16), Kerajaan Bugis dari Makasar (abad ke-17), Kerajaan Karangasem dari Bali (1740), dan kolonialisme Belanda (1894).

Pada masa lalu sekitar abad ke 16 di daerah Lombok-NTB, tepatnya di Lombok Timur telah berdiri kerajaan lokal Sasak yang diberi nama Kerajaan *Selaparang*. Gelar tertinggi bagi kerabat raja disebut “*Lahu*” atau sistem kebangsawanan yang ada disebut “*Kedatuan*”, sementara masyarakat kebanyakan disebut sebagai “*Jajar Karang*” atau “*Jejer Karang*”. Pada masa itu tidak ada yang disebut kelas antara atau kelas menengah seperti sekarang ini, tetapi ada satu strata dalam masyarakat yang menduduki posisi tinggi setelah kaum bangsawan kerajaan, yaitu kelompok para ulama yang berfungsi sama sebagai kelas antara karena menyambungkan antara kelompok kedatuan dengan rakyat bawah. Tetapi sayang sejak abad ke-16 hingga pertengahan abad 18 kerajaan *Selaparang* ini selalu diinvasi oleh kekuatan kerajaan dari luar Lombok, sehingga melemahkan posisi dan peran antara dari para ulama lokal. Invasi pertama dilakukan oleh Kerajaan Majapahit dari Jawa dengan membawa serta agama Hindu, dan sejak itu masyarakat Sasak memeluk agama Hindu padahal sebelumnya mereka memeluk kepercayaan animisme. Kemudian masuk lagi Kerajaan Mataram dari Jawa pada abad ke-16 bersamaan dengan invasi itu Kerajaan Mataram mengembangkan agama Islam dan meruntuhkan kepercayaan Suku Sasak saat itu, yakni agama Hindu, tetapi Islam yang dikembangkan di Lombok bersamaan dengan invasi kerajaan Mataram masih tercampur oleh budaya, sehingga disebut Islam “*wetu telu*”, karena hanya menjalankan shalat dalam tiga waktu saja. Invasi kerajaan-kerajaan luar ke Pulau Lombok diteruskan oleh Kerajaan Islam dari Bugis-Makasar dengan membawa serta agama Islam, dan sejak itulah agama Islam “*waktu lima*” mulai berkembang di Lombok Timur menggantikan islam wektu telu, khususnya Islam suni (Lihat, Budiwanti, 2000: 287-288).

Sementara di daerah Lombok bagian Barat pada abad 1740 berhasil diinvasi oleh Kerajaan Karangasem dari Bali, masuknya Kerajaan Karangasem juga membawa serta kepercayaan mereka

yakni agama Hindu-Bali. Kemudian Kerajaan Bali ini berhasil mengalahkan Kerajaan Makasar di Lombok Timur (idem Budiwanti, 2000:286). Namun, penaklukan Kerajaan Islam di Lombok Timur ini tidaklah serta merta mengharuskan masyarakat Lombok untuk berganti agama, saat itu pemerintahan Kerajaan Karangasem-Bali membiarkan orang Sasak tetap memeluk agama Islam. Politik invasi ala Bali ini ternyata membuahkan hasil positif terbukti dikemudian hari masyarakat Sasak yang Islam dapat hidup berdampingan dan bekerja sama dengan orang Hindu Bali. Sebetulnya setiap kali Lombok diinvasi oleh kerajaan dari luar Lombok bukan diterima secara damai, karena para ulama “*Tuan Guru*” bersama dengan masyarakat telah berperang dengan sengit untuk melawan invasi tersebut. Pada waktu itu tidak sedikit korban yang jatuh untuk mempertahankan Lombok dari dominasi pemerintahan kerajaan dari luar Lombok.

Percampuran kultural antara agama Islam kejawaan dan kepercayaan Hindu ini telah melahirkan agama Islam “*Wetu Telu*” (Waktu Tiga, dimana ibadah shalat hanya dilakukan pada tiga waktu saja: subuh, ashar dan magrib)¹ dan praktek keagamaannya dipengaruhi oleh agama Hindu. Islam *waktu telu* mengacu kepada tiga nilai filosofi berikut “*Tiuk, Menteluk dan Menganak*”. *Tiuk* diartikan sebagai tumbuh bertunas mengacu kepada tumbuh-tumbuhan, sedang *menteluk* berarti bertelur mengacu kepada hewan dan *menganak* berarti beranak mengacu kepada manusia. Filosofi yang termuat dalam pengertian *tiuk, meneteluk* dan *menganak* adalah satu kesatuan kehidupan makhluk hidup yang mengacu kepada alam. Tetapi setelah Islam suni kian berkembang, ikut membawa perubahan dalam perilaku agama hingga pada saat ini hampir semua masyarakat Sasak Lombok telah beralih ke Islam “*Waktu Lima*”, namun praktek Islam *Wetu Telu* masih tetap dapat dijumpai walau hanya dilakukan sembunyi-sembunyi.

¹ Islam *Wetu Telu* adalah ajaran Islam yang diyakini masyarakat Sasak, dimana mereka mengaku sebagai muslim tetapi masih percaya kepada unsur animistik karena pengaruh dari agama Bindu-Bali.

Sejarah sosial panjang yang terkait dengan peperangan dan konsesus damai telah membentuk Suku Sasak menjadi suku yang adaptif, mereka dapat hidup rukun berdampingan dengan Suku Bali yang pada masa lalu pernah menginvasi Pulau Lombok atau Suku Bugis Makasar yang pernah datang untuk mengembangkan agama Islam. Pengakuan atas eksistensi identitas keagamaan dan adat istiadat Suku Sasak inilah yang membuat suku Bali dapat diterima dengan baik oleh Suku Sasak. Selain itu, suku Bali pada umumnya memiliki status ekonomi lebih tinggi dari Suku Sasak maka kebanyakan dari mereka saat ini menjadi pemilik hotel-hotel, perusahaan transportasi dan otomotif. Sementara Suku Sasak dari golongan penduduk muda yang hanya memiliki pendidikan menengah bekerja pada suku Bali maka tercipta hubungan yang saling membutuhkan di antara kedua suku ini. Hubungan harmonis ini tetap dapat bertahan karena ada ikatan historis dan ketergantungan ekonomi yang kuat. Pada saat inipun, banyak pendatang dari Jawa Timur, Jawa Barat, Makasar dan suku-suku lainnya yang hidup dan bekerja di Lombok diterima dengan baik, namun sayang status ekonomi dan sosial Suku Sasak tidaklah seberuntung seperti para pendatang.

Sebagai suku yang terbuka, masyarakat Sasak juga mengakui stratifikasi sosial dalam masyarakat, atau adanya perbedaan status-status sosial dalam masyarakat. Pada masa lalu, status sosial tertinggi atau hormat sosial diberikan kepada kelompok bangsawan kerajaan atau "*Kedatuan*" dan keturunan mereka yang biasa disebut "*Lalu*". Pada saat ini status sosial tertinggi di berikan kepada para pejabat birokrasi dan para ulama atau dalam bahasa setempat disebut *Tuan Guru* yang memiliki Pondok Pesantren. Para ulama *Tuan Guru* inilah yang bekerja keras melakukan perubahan keagamaan Islam dan menstranformasikan nilai-nilai Islam lama *waktu telu* kepada nilai Islam yang hakiki, yaitu Islam *waktu lima*. Namun masih ada pekerjaan besar yang masih harus dijalankan oleh para ulama ini yaitu bagaimana syariat Islam dapat dijadikan sebagai bagian dari kehidupan keseharian masyarakat Lombok, dan bagaimana

mendorong kaum perempuan muslim mengenakan busana muslim, seperti jilbab misalnya. Para *Tuan Guru* telah berhasil menggeser hormat dan status sosial yang semula diperuntukan bagi kelompok bangsawan kepada para ulama melalui jembatan organisasi sosial keagamaan yang dibentuk oleh TGH (*Tuan Guru Haji*) Zainuddin Abdul Madjid² pada tahun 1953, yakni Nahdlatul Wathan (NW). Jadi organisasi NW lahir pada saat masih lemahnya agama Islam di Lombok, dimana masyarakat masih mencampurkan nilai-nilai adat lokal dan norma-norma adat dengan agama. NW berkembang dengan sangat cepat, terutama di bidang pendidikan Islam mulai dari tingkat Madrasah hingga ke Perguruan Tinggi, jumlah santrinyapun mencapai ratusan ribuan dan ratusan pondok pesantren serta ratusan majlis dakwah dan ta'lim. Pola pengajaran Islam yang dilakukan para ulama NW melalui pola dakwah di mesjid-mesjid, pengajian dan sekolah formal di madrasah hingga perguruan tinggi di bawah bendera NW. Sebetulnya pengembangan organisasi NW dapat dikatakan masih melalui jalur pendidikan tradisional jika dibanding dengan perkembangan Pesantren di Pulau Jawa misalnya yang telah memanfaatkan media elektronik.

Hubungan yang tercipta antara TGH dengan pengikutnya merupakan hubungan yang bersifat *patronase* dan kharismatik, karena TGH tidak saja difungsikan sebagai pemimpin agama tetapi juga pemimpin masyarakat yang membantu masyarakat keluar dari persoalan sosial ekonomi mereka. Selain itu para *Tuan Guru* ini difungsikan sebagai agen pembaharu atau kelas antara (antara penduduk biasa, "*jejer karang*" dengan kelompok bangsawan). *Tuan Guru* tidak hanya berperan sebagai mediator di bidang hukum, doktrin agama (Syariat islam), ekonomi, sosial dan adat istiadat, tetapi sekaligus dianggap memiliki kekuatan suci. Loyalitas yang diberikan kepada TGH oleh pengikutnya sangatlah jelas. NW di

² Sebelumnya di Pulau Lombok telah berkembang organisasi Nahdlatul Ulama yang dipimpin Oleh *Tuan Guru* Haji Zainuddin dari daerah Pancor dan dapat berkembang dengan baik, dan organisasi Muhamddiyah yang berkembang secara terbatas.

bawah kepemimpinan TGH menerapkan pola manajemen pesantren modern, dimana hubungan *patronase* antara ulama dan santri masih berlangsung dengan cara TGH merekrut para santri untuk mengajar di ponpes dan sekolah-sekolah yang didirikan NW dengan cara digaji. Namun, jika para santri ini tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan NW, maka tidak jarang mereka juga tidak diperkerjakan kembali.

Beberapa tahun belakangan, terutama setelah pemerintahan Orde Baru runtuh dan digantikan dengan Orde Reformasi berkembang gejala ramai-ramai ulama pada level nasional masuk ke dalam dunia politik praktis, di tingkat regional gejala ini juga semakin menguat. Maka di daerah Lombok kiprah ulama dalam bidang politik juga sangat kuat, terlebih-lebih mereka di dukung oleh kekuatan basis massa pendukung yang tidak sedikit. Para TGH-pun mulai berperan sebagai penggerak aksi-aksi sosial hingga ke aksi politik yang dianggap merugikan masyarakat. Karena itulah, peran dan posisi mereka semakin kuat, tidak hanya berakar pada masyarakat bawah tetapi telah menembus kalangan intelektual, politisi dan birokrat (Baharuddin,2007:67). Bersamaan dengan itu kelompok intelektual yang non ulama mulai tumbuh dan berkembang terutama mereka yang dengan sengaja memilih berada di luar birokrasi. Sebetulnya sejak tahun 70-an kelompok intelektual atau kelompok terdidik di perkotaan telah mengikatkan diri pada gerakan sosial dalam wadah Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Pada awalnya garis kerja mereka hanya terbatas pada upaya pemberdayaan masyarakat karena memang pada tahun 1970 hingga 1980-an yang dibutuhkan adalah pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat terserap dalam proses pembangunan. Namun sejak tahun 1990, seiring dengan semakin kuatnya gerakan LSM dan sering dengan mulai berkembangnya permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat dan adanya gejala penguatan secara sepihak dari Negara sementara masyarakat kapasitasnya cenderung melemah, gerakan sosial LSM sudah meningkat menjadi gerakan sosial politik dengan tujuan untuk memberi bekal pendidikan politik kritis kepada

masyarakat sehingga mereka menjadi paham akan hak-hak mereka sebagai warganegara dan kewajiban yang harus dijalankan³.

3.2.1. Kompetisi Kultural Kelas Menengah dari Kelompok Ulama 'Tuan Guru' dan Kelompok Bangsawan 'Perwangsa'.

Kelompok elit bangsawan di Provinsi NTB biasa diposisikan sebagai bangsawan feodal, mereka adalah kelompok *Perwangsa* dengan gelar *Lalu* bagi kelompok bangsawan laki-laki dan *Baiq* untuk kelompok bangsawan perempuan. Generasi di bawahnya melakukan perkawinan dengan kelompok elit agama, kemudian tumbuh berkembang membentuk kelompok elit agama generasi kedua. Para kelompok elit agama atau ulama dimana dalam istilah setempat biasa disebut "*Tuan Guru*" telah berhasil menggeser status sosial dan gengsi sosial yang semula diberikan untuk kelompok bangsawan. Karena dengan kekayaan modal kapital dan sosial yang mereka miliki berhasil mendirikan pondok pesantren, rumah sakit dan sekolah-sekolah bernuansa Islam hingga ke perguruan tinggi di bawah bendera Nadlatul Wathan. Mereka ini memiliki kekayaan, menguasai pendidikan, memiliki mobilitas fisik dan sosial tinggi sehingga mereka menjelma menjadi agen transformasi sosial dan agen perubahan sosial dan mereka ini dapat dianggap sebagai bagian dari kelas menengah. Gambaran keberperanan ulama dalam perkembangan masyarakat Lombok ini dapat sejajarkan dengan peranan ulama di kota kecil Mojokuto-Jawa yang dengan modal sosial dan kapital yang mereka miliki mampu mendorong perkembangan masyarakat dan menjadi agen perubahan sosial⁴. Sebetulnya agak sulit bila dilakukan identifikasi secara tegas siapa saja yang dapat dikelompokkan sebagai kelas menengah Lombok-NTB ini karena latar belakang struktur sosial masyarakat secara tegas

³ Henny Warsilah, *Kelas menengah Déjà Vu*, 2003.

⁴ Lihat tesis Geertz tentang peranan ulama di Mojokuto.

berdasarkan hasil penelitian kami⁵ terdahulu hanya mampu membedakan dua kelompok kelas yang ada dalam masyarakat, yaitu kelas bangsawan atau *perwangsa* dan kelas bawah atau orang biasa yang biasa disebut sebagai “*jajar karang*” atau “*jejer karang*”.

Kedudukan Ulama atau biasa disebut sebagai *Tuan Guru Haji* atau biasa disingkat TGH diposisikan sejajar dengan kelompok bangsawan, mereka adalah kelompok elit agama terdidik yang kental secara agamis, mereka ini pada umumnya ditinggikan statusnya dalam masyarakat dan mulai masuk ke posisi birokrat Kondisi birokrasi pemerintahan di Lombok, posisi pimpinan birokrat masih cenderung diduduki oleh kelompok bangsawan yang menyandang gelar “*Lalu*”, misal saat penelitian berlangsung jabatan gubernur dipegang oleh bangsawan sasak Lalu Srinate, begitupun pada jabatan-jabatan dibawahnya masih kuat dipegang oleh kelompok bangsawan. Walau sebetulnya kedudukan *lalu* menjadi tidak begitu penting lagi dalam birokrasi modern, namun masyarakat masih memandang status *lalu* merupakan status tertinggi, maka jika pimpinan birokrat atau pamong praja berasal dari kelompok bangsawan, hal itu merupakan kondisi yang ideal buat masyarakat Lombok-NTB.

Sementara kelompok ulama muda terdidik yang struktur puncak elitnya merupakan lulusan universitas luar NTB (negara Arab Saudi) dan dibawahnya lulusan universitas Islam lokal. Mereka ini merupakan bagian dari kelas menengah baru dari unsur kelompok agamis dan berperan sebagai agen pembaharu. Pada umumnya *Tuan Guru Haji* akan menduduki jabatan sebagai pemuka agama dan pemilik pondok pesantren. Setelah era reformasi terjadi perubahan arah politik yang sangat mendasar di NTB, jabatan birokrasi pamong praja tidak lagi didominasi oleh para *lalu*, tetapi sudah dimasuki oleh para pemimpin agama. Hasil pantauan Saudara Thung Ju Lan pada

⁵ Lihat tulisan Thung Ju Lan, “*Kelas Menengah Lombok: Kompetisi Kultural antar Kelas, Suk Bangsa dan Agama*” dalam, Henny Warsilah (ed.): **Kelas Menengah dan Demokrasi**, Penerbit LIPI Press, tahun 2006 Jakarta.

tahun 2006 sudah ada 7 (tujuh) *Tuan Guru* yang berhasil menjadi anggota legislatif (DPRD). Kemudian, pantauan kami pada tahun 2008 ini berhasil menambah kedudukan *Tuan Guru* dalam peta politik NTB, tidak hanya di DPRD tetapi juga di birokrasi pemerintahan daerah dan juga pada lembaga elit seperti KPU misalnya. Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Lombok Barat⁶ di jabat oleh *Tuan Guru*, bahkan *Tuan Guru* Bajang yang merupakan cucu dari pendiri NW berhasil menang pilgub secara langsung atas dukungan penuh masyarakat NTB. Kondisi ini mencerminkan secara sosio politik tokoh agama memegang peran penting dalam perubahan politik lokal, dan dapat dikatakan dalam proses demokratisasi politik lokalitas pemimpin agama menjadi agen pembaharu yang penting dalam perubahan politik, berhasil menggeser kedudukan kelompok bangsawan dari elit politik nomor satu.

Di Lombok, para elit agama Islam membentuk organisasi agama yang bernama Nadlatul Waton atau biasa disingkat dengan NW, dibawah bendera NW ini lahir puluhan bahkan ratusan pondok pesantren (Ponpes). Sistem nilai yang berlaku di lingkungan Ponpes adalah sistem nilai tradisional yang berkiblat ke Timur Tengah. Islam yang berkembang kemudian di NTB bukanlah Islam kultural seperti halnya di Jawa dimana perkembangan Ponpes banyak terjadi melalui kawin campur di antara para anak pendiri ponpes. Di NTB, agak berbeda, tradisi "*mengambil anak*" tidak terjadi di sini, pengembangan ponpes lebih dilakukan secara tradisional mengikuti tradisi Islam Timur Tengah secara ketat, begitupun pendidikan formal yang berbasis agama di Universitas menginduk ke Timur Tengah.

Perbedaan perkembangan agama Islam melalui ponpes daerah Lombok-NTB ini justru berhasil menumbuhkan unsur kompetisi di antara sesama ponpes untuk keluar menjadi ponpes terbaik dan diminati masyarakat. Dan untuk mendapatkan keamanan

⁶ Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat *Tuan Guru* Haji Hasan Main pemilik Ponpes "Putri Haramain" adalah adik dari Ketua KPU Propinsi, *Tuan Guru* Haji Mahan Fitri pemilik ponpes "Narmada".

sebagai elit agama, banyak dari tokoh ponpes yang terjun ke dunia politik untuk mematahkan dominasi '*politik kedatuan*', politik elit bangsawan. Pada posisi ini terjadi transformasi sosial melalui jalur pendidikan tinggi di dunia ponpes, dari pemimpin agama menjadi pemimpin birokrasi. Sementara pengembangan ponpes masih dilakukan secara tradisional, sehingga menjadi stagnan, sebaliknya perkembangan arah politik ponpes berbasis pada modernisasi politik dengan dukungan jalur pendidikan tinggi semakin meningkat.

Status tertingi dan hormat sosial diberikan kepada ulama atau *Tuan Guru* oleh komunitas santri dan masyarakat awam didasarkan kepada dua hal. *Pertama*, sosok *Tuan Guru* dipandang sebagai orang yang memiliki pengetahuan luas dibidang keagamaan, sehingga pola hubungan yang terbentuk antara *Tuan Guru* dan Santri adalah *patronase*, dan merupakan tempat dimana masyarakat awam belajar agama. Karena pengetahuan yang luas itu maka mereka banyak memiliki pengikut setia, baik dari kalangan santri maupun masyarakat luas yang mengikuti pengajian dan ceramah mereka di mesjid-mesjid. *Kedua*, *Tuan Guru* biasanya berasal dari keluarga kaya, posisi ekonomi tersebut menempatkan mereka sebagai elit masyarakat yang paling penting. Sementara santri dan penduduk desa mentaati dan memberikan loyalitas tinggi kepada mereka, para pengikut ini merupakan modal sosial yang penting bagi *Tuan Guru* (Baharuddin, 2007:66-67). Sedang bagi penduduk desa, sosok *Tuan Guru* adalah orang yang dapat membantu kehidupan ekonomi warga desa dan mampu memecahkan persoalan spritual, agama, sosial, ekonomi dan politik yang mereka hadapi. Sehingga hubungan yang tercipta adalah hubungan bersifat *patronase* dan dilandasi emosi dan loyalitas penuh. Jadi peran *Tuan Guru* tidak hanya berkisar pada bidang agama, tetapi juga ekonomi, pendidikan, ideologi dan politik. Dengan peran demikian besar maka para ulama ini dapat dengan cepat mengambialih kekuasaan birokrasi yang semula dipegang oleh kelompok bangsawan, dan posisi *Tuan Guru* dapat dikategorikan sebagai agen pembaharu dalam masyarakat NTB. Dan dimata para penguasa elit birokrasi, ulama diandang sebagai aset penting yang

menguasai intelektualitas bercirikan islam, memiliki banyak pengikut dan memiliki keahlian dalam bidang agama dan sosial kemasyarakatan, sehingga menjadi penting menempatkan mereka pada posisi mitra di dalam politik praktis untuk jabatan Gubernur, Walikota, Bupati atau pimpinan bikrorasi lainnya.

3.2.2. Kompetisi Intelektualitas Kelas Menengah Muda dari Unsur LSM dan Ulama

Seperti telah disebut di atas, segelintir kelompok muda terdidik baik yang masih kuliah di perguruan tinggi maupun yang telah berhasil lulus dengan kesadaran untuk mendorong pembangunan dan demokrasi di Provinsi NTB memutuskan diri untuk tergabung dalam aksi-aksi mahasiswa. Mereka adalah bagian dari masyarakat sipil atau *civil society* NTB. Terdiri dari organisasi mahasiswa KAMI, PMII, dan BEM mahasiswa dari Fakultas Hukum dan Ekonomi Unram serta profesional jurnalis (wartawan) dan dosen. Sejak di bangku kuliah mereka telah terlibat aktif dalam pergerakan sosial dan pemberdayaan LSM, sebagian dari mereka setelah menamatkan studi memutuskan untuk bergabung dengan LSM atau NGO yang telah memiliki nama atau mendirikan LSM baru dengan tujuan untuk terlibat dalam proses demokrasi pada tingkat regional dan lokal sehingga prosesnya dapat menyerupai demokrasi pada level nasional.

Latar belakang pergerakan sosial masyarakat sipil NTB dilatarbelakangi oleh rasa keprihatinan atas kondisi pembangunan NTB yang seolah berjalan ditempat, dimana angka kemiskinan cukup tinggi mencapai 20% lebih dan angka buta huruf mencapai 10%. Ditambah produktivitas yang rendah dari penduduk kelompok usia muda dan tingginya usia kawin muda. Kondisi memprihatinkan itu telah menempatkan angka indeks pembangunan manusia (IPM) NTB berkisar pada angka 63, jauh dibawah angka IPM nasional, bahkan menempati urutan kedua terendah setelah Provinsi Papua yang berada di nomor buncit. Selain itu, pembangunan infrastruktur untuk pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan tersendat akibat maraknya kasus korupsi dana APBD oleh pejabat birokrasi dan legislatif.

Upaya pendirian LSM sebagai bagian dari masyarakat sipil adalah sebagai wadah bagi gerakan sosial yang coba mereka bangun untuk mewujudkan demokrasi di NTB supaya tidak terjebak dalam demokrasi formalitas belaka. LSM dan NGOs didirikan sebagai organisasi yang memiliki otonomi di luar negara, dan aksi-aksi utama dari gerakan sosial mereka bertujuan untuk memajukan demokrasi partisipatoris dan menisbikan demokrasi formalitas. Gerakan sosial LSM ini dapat diidentikan dengan gerakan pro demokrasi yang mempunyai akar luas dan keberadaan mereka secara politik dipandang penting. Seperti yang diungkapkan oleh Tedd Gur (1993:184), bahwa tuntutan akan demokrasi telah mendorong terbentuknya kelompok-kelompok aksi, seperti kelompok pro demokrasi. Selain itu, adanya tuntutan dari dunia internasional bagi terbentuknya kelompok-kelompok aksi, karena konsep "partisipasi rakyat" telah masuk ke-dalam ukuran keberhasilan untuk menilai sebuah pembangunan. Maka sejak tahun 80-an, PBB mengeluarkan resolusi dan deklarasi untuk memasukkan "partisipasi rakyat" dalam penyelenggaraan aktivitas negara.

Gerakan sosial yang dibangun masyarakat sipil ini juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mendorong transformasi negara dari *government* hanya sebagai regulator ke arah *governance* yang berperan juga sebagai administrator, sebagaimana dikonsepsikan Giddens (1999:254-255). Seperti juga dikatakan oleh Gramsci (2000:132-143), kelompok intelektual dapat dikaitkan dengan tumbuhnya kekuatan *civil society*, apakah sebagai juru bicara kelompok internalnya dalam rangka kebebasan mimbar atau lebih sebagai intelektual organik yang bertindak untuk mengartikulasikan kepentingan politik masyarakat dalam gerakan sosial baru yang berwatak emansipatoris dan merupakan agensi dan aktor proses transformasi sosial masyarakat⁷.

⁷ Pemikiran Gramsci bertolak dari uraiannya tentang superstruktur utama dalam masyarakat yang terdiri dari dua tingkat, yang pertama disebut sebagai *civil society* yang merupakan perwakilan organisme yang umum disebut "swasta", dan yang kedua disebut sebagai masyarakat politik atau "negara", keduanya menurut Gramsci memiliki fungsi hegemoni dimana

Gramsci dan Kellner menyebut kaum intelektual seperti yang digambarkan di atas sebagai intelektual yang memiliki orientasi baru, atau disebut sebagai *sub-altern intellectual*, karena dari gagasan gerakan sosial barunya mereka berani melakukan peran sebagai “*artikulator*”. Dalam pengertian, mereka menjalankan peran kritiknya terhadap negara, atau sebagai *critical-oppositional intellectuals* terhadap tatanan yang mapan dalam ketidakadilan⁸. Senada dengan itu, Michael Foucault memandang perlunya *the specific intellectual* dari *the public sphere* yang betul-betul dapat membawa aspirasi mereka yang tertindas dan berasal dari kalangan mereka sendiri, bukan berasal dari mereka yang berbicara atas nama kaum tertindas melalui retorik intelektual. Pada era post-modernism tuntutan Foucault memiliki *echo* yang lebih besar dengan merumuskan perlunya konsep gerakan sosial baru⁹.

Provinsi NTB seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia mengawali proses demokrasi partisipatif pada level daerah setelah pemerintahan Orde Baru digantikan oleh Orde Reformasi pada 1978, dan sejalan dengan dilakukannya politik desentralisasi dan kebijakan Otonomi Daerah, pertumbuhan gerakan sosial yang diwadahi oleh organisasi LSM dan Ornop/NGO mulai tak terbendung lagi. Namun sebetulnya sejak tahun 70-an hingga 80-an geliat gerakan sosial di daerah memasuki tahap pendidikan dan pemberdayaan, kemudian setelah memiliki banyak kader, dukungan atau basis di akar rumput mulailah dilakukan pendampingan atas kasus-kasus yang menimpa masyarakat. Pergerakan LSM di level Pusat maupun daerah sejalan dengan yang diungkapkan Gerard Clarke kontribusi NGOs dan LSM terhadap pembangunan berada pada ruang pemberdayaan politik dan sosial ekonomi (1998:p.4-5). Oleh karena itu sejak tahun 1993 UNDP dalam studinya telah menyebutkan bahwa NGOs sebagai elemen pelengkap Negara yang berupaya ikut menanggulangi kemiskinan,

kelompok dominan menguasai masyarakat dan dilain pihak dengan fungsi dominasi langsung.

⁸ Gramsci (2000) dan Kellner (1997).

⁹ Opcit, Muslim Abdurachman, 1999: 259.

mendorong terpenuhinya pelayanan sosial dan advokasi. Begitupun The World Bank melihat kekuatan politik dari NGOs sebagai kekuatan penting dalam proses pembangunan suatu negara, mitigasi biaya dari pembangunan negara berkembang. Adapun pernyataan lengkap sebagai berikut:

“Non Governmental Organisations (NGOs) have become an important force in the development process, (mitigating) the cost of developing countries, institutional weaknesses which often include administrative shortcomings, and an inability to carry out essential development tasks (World Bank, 1993; 135-136).

LSM yang ada di NTB, khususnya Lombok membedakan gerakan sosial mereka sesuai dengan tujuan utama pendirian LSM masing-masing. Ada yang mengkhususkan perjuangan mereka pada gerakan anti korupsi (LSM SOMASI), yang lain memutuskan untuk memberi bantuan hukum (LSBH dan LBH Apik), sementara yang lain lebih mementingkan nasib petani (LSM Himpunan Tani dan Syarikat Tani), dan pada perjuangan kelompok perempuan (LSM Koalisi Perempuan, Kaukus Perempuan dan LSM Solidaritas Perempuan) dan masih banyak lainnya. Tentu banyak LSM penting yang telah melakukan pemberdayaan politik kritis dan gerakan sosial di Lombok-NTB, tetapi karena keterbatasan peneliti untuk memaparkan semua LSM itu, maka hanya dipilih beberapa LSM yang secara intens diwawancarai.

LSM Somasi NTB didirikan tahun 1998 setelah terjadi proses reformasi di tingkat nasional untuk melengserkan kekuasaan Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto, maka geliat reformasi sampai ke daerah disikapi dengan cara mendirikan LSM Somasi yang difasilitasi oleh Teten Masduki dari ICW Jakarta. Somasi kependekan dari “*Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi*” didirikan oleh 8 unsur masyarakat, antara lain tokoh agama, akademisi, jurnalis, aktivis LSM, mahasiswa, tokoh perempuan, tokoh yang bergerak di bidang hukum dan unsur birokrat. Tujuan pendirian Somasi adalah untuk mengungkap kasus-kasus korupsi, memajukan tranparansi,

pembangunan di bidang sosial politik masyarakat. Sebagai sebuah gerakan sosial Somasi melakukan gerakan transformasi sosial dan gerakan budaya (budaya anti korupsi) termasuk gerakan politik (reformasi politik di tingkat daerah), gerakan hukum (hukum anti korupsi, terutama investigasi kinerja hakim yang menangani kasus-kasus korupsi). Strategi yang dijalankan oleh Somasi adalah dengan cara melakukan pertemuan langsung dengan stakeholders untuk melakukan pemetaan, strategi kerja dan melakukan proses refleksi. Karena perkara korupsi merupakan proses hukum yang harus melibatkan bukti otentik, maka dengan cara menarik garis merah yang tegas dapat dijelaskan kepada masyarakat dan pemerintah bahwa korupsi adalah kejahatan besar dan merupakan kasus pembusukan birokrasi yang harus diminimalkan. Kelembagaan Somasi sejak tahun 2001 hingga tahun 2008 telah memiliki badan pekerja sebanyak 12 orang dan dewan etik sebanyak 5 orang, dan telah membangun jejaring sosial di 9 kota/kabupaten di seluruh NTB.

LSM Somasi dan LSBH Mataram dua diantara banyak LSM penting lain di Lombok pada saat ini berhasil menjadikan pergerakan sosial mereka menjadi pergerakan masyarakat sipil mendasarkan diri pada isu-isu penting berdasarkan kebutuhan masyarakat dan isyunya *day to day* dengan cara membangun jaringan dan rebug masal yang partisipatif sifatnya. Program-program kegiatan LSM telah berhasil mengangkat harkat masyarakat NTB untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan bernegara tetapi juga mendidik mereka untuk paham akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini memang sesuai seperti yang dikonsepsikan oleh Touraine (1993:404) dimana setiap gerakan sosial kelompok NGOs dan LSM akan berkaitan dengan tiga hal pokok berikut: *pertama*, secara kualitatif gerakan ini memang baru, karena berbeda dari yang lama, dan lebih menaruh perhatian pada masalah keadilan sosial ekonomi dan politik. *Kedua*, isu yang diperjuangkan lebih fokus pada isu sosial lokal misal di Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di desa Bagu isu yang muncul adalah masalah kelangkaan air bersih dan ketersediaan prasarana jalan maka LSM melakukan pendampingan dan advokasi,

sementara di Lombok Barat isu yang berkembang adalah ganti rugi tanah petani bagi peruntukan pembangunan bandara internasional NTB yang tidak sepadan, maka LSBH melakukan pendampingan dan bantuan hukum. *Ketiga*, gerakan ini terdiri dari unsur-unsur perorangan, dan kelompok, serta membentuk unsur gerakan yang lebih besar.

Kantor LSM yang di sewa setiap hari selalu ramai didatangi oleh berbagai kalangan. Seperti kantor Somasi, pada jam-jam istirahat selalu diramaikan oleh para jurnalis yang sengaja datang untuk bertukar informasi atau mendiskusikan satu kasus yang sedang menjadi pusat perhatian. Sementara kantor LSBH kerap diramaikan oleh para aktivis mahasiswa dari KAMI, PMII dan aktivis BEM mahasiswa, beragai alasan mereka berkumpul di sana dari mulai merencanakan aksi hingga kepada upaya advokasi bagi penduduk yang sedang bermasalah dengan hukum. Kedua LSM ini berhasil membangun jaringan luas untuk membantu tercapainya program-program yang sedang dikerjakan, mulai dari jurnalis, dosen, tokoh agama, anggota DPRD, Mahasiswa, sesama LSM, birokrat hingga ke tukang ojeg dan penduduk umum. Jaringan sosial ini sengaja dibangun sebagai ujung tombak strategi kerja kelompok LSM. Ini sesuai seperti dikonsepsikan oleh Cohen (1985), gerakan sosial baru dalam upayanya untuk membangun identitas sosial baru, menciptakan ruang demokrasi bagi aksi sosial yang otonom, dan berupaya menafsirkan kembali norma-norma yang berlaku seraya membentuk ulang lembaga-lembaga sosial maka strateginya dengan cara membentuk jaringan kerja.

Pengelompokan para aktivis yang terdiri dari kelompok intelektual ini menurut Gramsci dan Gouldner (1979:256), dapat dikelompokkan sebagai kelas sosial baru yang menguasai ilmu pengetahuan dan dengan pengetahuannya mereka memiliki kapital budaya (*cultural capital*) dan kapital sosial (*social capital*), yang dengan kapasitasnya bisa saja kapital budaya dan kapital sosial itu

dikembangkan menjadi kapital uang atau kapital politik¹⁰. Maka dasar gerakan sosial kelompok-kelompok LSM dan NGOs ini tidak lagi didasarkan pada orientasi ekonomi semata-mata yang menjadi dasar perjuangan gerakan sosial lama, tetapi lebih bersifat *class-based social movement*. Dan sebagai bagian dari *civil society* tentunya mereka mampu membangun aksi sosial kolektif (*The forms of collective action*) dalam perspektif mencari gerakan sosial baru, dengan kekayaan budaya, latar belakang pendidikan intelektualnya, mereka merupakan lapisan paling kritis dalam *civil society*¹¹.

Pada konteks demokrasi lokalitas, berbagai narasumber LSM menyebutkan bahwa sistem politik dan struktur politik NTB sebetulnya belum banyak mengalami perubahan mendasar, walau secara struktur telah dikuasai oleh orang lokal dinamakan putra daerah telah berhasil memimpin dan menjadi penguasa tertinggi. Tetapi, pada tingkat perilaku para penguasa birokrasi dan politisi di legislatif perilakunya tidak mengalami perubahan, dalam pengertian masih mementingkan tujuan pribadi atau partai daripada mengedepankan tujuan masyarakat banyak. Sehingga, walau putra daerah telah mengambil alih kekuasaan, namun sejukurnya pola dan gaya kepemimpinan mereka masih terkooptasi gaya kepemimpinan masa lalu atau lebih tepat gaya Orde Baru, yang mengutamakan konsep “ABS” atau asal bapak senang. Kondisi ini diindikasikan dengan maraknya kasus korupsi pada anggota dewan bahkan hingga ke jabatan gubernur. Perubahan perilaku lembaga masih sebatas paradigma dan ada indikasi perilakunya masih meneruskan pola lama, jadi para anggota dewan ini oleh LSM dianggap belum mampu menjalankan fungsi kontrolnya terhadap eksekutif dan legislatif.

Ada hal yang menarik ketika jaringan sosial dibangun oleh LSM utama Lombok dan harus berhadapan langsung dengan para

¹⁰ Gouldner (1979) dalam Moeslim Aburachman, hal. 256, tahun 1999.

¹¹ Giddens seperti dikutip Moeslim Aburachman, dalam “*Peran Masyarakat Akademis Sebagai bagian Masyarakat Madani*”, dalam *Masyarakat Versus Negara*, penerbit Kompas, tahun 1999, hal.254-255.

Tuan Guru berikut strukturnya seperti: ponpes, santri dan nilai-nilai baku keagamaan. Secara idiologi keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar, jika LSM mengadopsi nilai-nilai demokrasi modern maka *Tuan Guru* menerapkan nilai-nilai agama yang dogmatis sifatnya. Namun para aktivis LSM sadar betul akan kekuatan yang dimiliki para *Tuan Guru*, selain memiliki pengaruh luas mereka juga memiliki dukungan massa yang besar. Sehingga mampu memainkan peran-peran krusial dalam menggerakkan aksi-aksi sosial politik di Lombok. Oleh karena itu, aktivis LSM mencoba menempatkan para *Tuan Guru* sebagai salah satu agen pembaharu dan ujung tombak mitra kerja jaringan LSM sambil mencoba memasukkan nilai-nilai demokrasi modern yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam agama Islam.

LSM memandang upaya pemberantasan korupsi sebagai sebuah gerakan sosial yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, salah satunya berasal dari unsur ulama. Maka salah satu upaya yang dilakukan oleh LSM Somasi adalah dengan cara bekerja bersama dengan beberapa *Tuan Guru* dari kalangan terdidik dan kelompok *Tuan Guru* muda untuk memerangi korupsi. Strateginya dengan cara membicarakan masalah fiqh sebagai salah satu nilai konstruktif untuk mencegah korupsi. Hasil kerja bareng itu telah diterbitkan dalam buku yang berjudul: *Fiqh Korupsi, Amanah vs Kekuasaan*, diterbitkan oleh Somasi NTB tahun 2003 bekerja sama dengan USAID dan The Asia Foundation.

Buku ini diharapkan menjadi lahan bacaan bagi para santri di kalangan pondok pesantren dan aktivis keagamaan dan tentunya masyarakat umum dalam memerangi korupsi. Bagian pertama dari buku membahas tentang diskripsi korupsi di Indonesia, dilanjutkan dengan bagian dua yang membahas pandangan agama Islam tentang keuangan negara, kemudian juga didiskusikan cara pandang Islam terhadap korupsi dari perspektif fiqh. Dimana ditegaskan bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh negara seharusnya didasarkan pada dimensi amanah dari rakyat. Sebetulnya dalam cara pandang Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah Allah yang selain harus

dipertanggungjawabkan kepada-Nya namun juga harus dipertanggungjawabkan secara sosial, akuntabilitas publik. Oleh karena itu, upaya penegasan cara pandang Islam terhadap korupsi diharapkan akan memberikan keyakinan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah sebuah “perang besar melawan kemungkaran”. Dibagian akhir dibahas upaya atau agenda yang dapat dilakukan untuk menjalankan peran ulama dalam pemberantasan korupsi (Somasi, 2003).

Gejala korupsi di tanah air yang semakin merajalela dan cenderung masif telah mendorong para aktivis LSM se-Indonesia untuk membentuk organisasi anti korupsi atau disingkat dengan OAK. Dengan maksud untuk lebih menempatkan diri sebagai OAK yang memiliki peran aktif, kemudian para OAK dipelbagai daerah bergabung dengan jaringan GeRAK atau gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia. Dan sejak tahun 2003, mereka telah berhasil mendeklarasikan Gerakan Sosial Antikorupsi bersama dengan dua organisasi besar Islam, yakni Nadlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (Idem Somasi, 2003). Gerakan anti korupsi di pelbagai daerah ini dapat diparalelkan dengan gerakan demokarsi karena keduanya berkehendak membongkar oligarsi politik yang busuk.

Kasus-kasus korupsi yang terjadi di Provinsi NTB dapat dikategorikan korupsi massif dan besar, seperti kasus korupsi penggunaan dana BUMN untuk koperasi-koperasi sebesar Rp.29,773 milyar sejak tahun 1990 hingga tahun 1999 ternyata tidak dapat dikembalikan, menurut pemantauan Somasi kemacetan pengembalian dana BUMN itu disebabkan koperasi-koperasi yang menerima kucuran dana bukanlah koperasi sesungguhnya, melainkan koperasi “plat merah” yang sengaja dibentuk oleh pegawai di jajaran Departemen Koperasi sendiri dengan tujuan untuk memperoleh dana BUMN. Kasus korupsi lain terjadi di PT Bank NTB (Bank Pembangunan Daerah) berupa kredit macet sebesar Rp.54,4 milyar yang berasal dari kredit kurang lancar, diragukan macet sebesar Rp.35 milyar, kredit yang dihapus bukukan tanpa di register terdaftar

sebesar Rp13,5 milyar dan kredit anggunan yang telah diambil alih sebesar Rp.5,9 milyar. Sedang kasus korupsi di DPRD dari fraksi PDIP berkaitan dengan dana bantuan bencana alam sebesar Rp.16 milyar dari dana APBD tahun 2003 yang tidak jelas peruntukannya. Kasus korupsi di tubuh DPRD NTB hampir sama dengan kasus di daerah lain terutama meningkat sejak era Otonomi daerah dan semakin meningkat intensitasnya menjelang pelaksanaan pemilu, baik Pemilu Presiden (tahun 2004) maupun Pemilu Pilkada dimana korupsi dilakukan oleh dilakukan oleh fraksi tertentu atau atas koalisi partai atau fraksi tertentu. LSM Somasi juga membidik korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Lalu Sri Nate sebesar 1,1 milyar dari dana anggaran APBD yang tidak sesuai peruntukannya, kasus ini telah sampai pada proses peradilan di tingkat pusat.

Hasil pantauan Somasi NTB terhadap beberapa media cetak yang terbit di NTB memberitakan ada 62 kasus korupsi yang terjadi di NTB hingga kurun waktu tahun 2000. Dari data itu dapat diketahui bahwa korupsi di NTB telah menyebar hampir kesemua institusi-institusi penting di pemerintahan, mulai dari birokrasi, DPRD hingga institusi hukum. Di luar itu, korupsi ternyata juga menyebar hingga ke institusi publik seperti Koperasi, Sekolah, LSM hingga ke Kantor Kelurahan beserta aparat terbawahnya. Korupsi juga telah melibatkan koalisi antara pengusaha dari kalangan swasta dengan pemerintah daerah terutama yang menyangkut keikutsertaan tender proyek atau pengadaan barang dan jasa (Somasi NTB, 2003:162-163). Berikut adalah tabel yang menggambarkan penyebaran korupsi di NTB selama kurun waktu tahun 2000.

Tabel 3.1. Penyebaran Korupsi di NTB, Tahun 2000

| Institusi | Locus Korupsi |
|-------------------|--|
| Intitusi Vertical | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan proyek pembangunan pengelolaan inventaris Departemen • Perekrutan tenaga magang ke luar negeri • Pengelolaan ibadah haji |
| BUMN | <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan peralatan RRI |

| | |
|--|---|
| <p>Pemda, Prov, Kab/Kota</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Perekrutan CPNS • Gaji guru • Tender proyek kesehatan • Proyek bantuan LN bidang pertanian (SPL-OECF) • Tender pengelolaan aset daerah • Kontrak pemanfaatan aset daerah • <i>Ruislag</i> inventaris Pemda • Promosi jabatan/kenaikan pangkat |
| <p>Dinas/Dinas Teknis Prov, Kab/Kota</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sekolah • Pengelolaan dana SPP di Dinas PDK • Tender proyek air bersih • Tender proyek irigasi • Tender proyek pengadaan alat dan mesin pertanian • Pengurusan sertifikasi tanah • Pembongkaran kayu tebang hutan/<i>illegal logging</i> |
| <p>Dinas/Dinas Teknis Prov, Kab/Kota</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Perizinan pelayaran kapal angkut • Pengiriman kayu tebang hutan • Tender proyek prasarana pemukiman • Manipulasi proyek pengelolaan air limbah bantuan LN/ADB • Tender proyek PPKM • Proyek bantuan LN Jepang bidang Peternakan • Pengelolaan iuran hutan • Perizinan pengelolaan hasil hutan • Pelaksanaan proyek pemeliharaan rutin |
| <p>BUMD</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan pengelolaan keuangan perusahaan • Pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan • Kewenangan pengelolaan kekayaan perusahaan • Pemasangan pipa air bersih • Manajemen pengelolaan perusahaan |

| | |
|-------------------------------------|---|
| DPRD Prov, Kab/Kota | <ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan Kepala Daerah • Pelantikan Kepala Daerah • Tender rehabilitasi kantor DPRD |
| Kejaksaan | <ul style="list-style-type: none"> • Perekrutan calon pegawai kejaksaan • Penanganan kasus korupsi |
| Pengusaha/Swasta/Asosiasi Pengusaha | <ul style="list-style-type: none"> • Tender proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah • Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah • Penyelesaian kasus di DPRD (Pansus DPRD) • Pelaksanaan proyek bencana alam • Pengelolaan dana reboisasi hutan • Pengelolaan areal hutan • Pengembangan perumahan |
| Sekolah | <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan siswa baru • Bantuan PMTAS • Alokasi dana beasiswa |
| Kantor Kelurahan, Rt/Rw | <ul style="list-style-type: none"> • Proyek KTP masal • Dana bantuan tunai langsung |
| LSM | <ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran bantuan masyarakat (KUT) |
| Koperasi | <ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran bantuan masyarakat • Pinjaman dana BUMN |
| Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan publik |

Sumber: Data Somasi NTB

Jaringan antara LSM dan *Tuan Guru* coba dipertautkan juga oleh LSM Koalisi Perempuan NTB pada saat kampanye pilgub dengan cara mengundang semua calon gubernur untuk memaparkan visi dan misi mereka terutama yang terkait dengan persoalan perempuan NTB termasuk kuota perempuan di legislatif. Satu-satunya calon gubernur yang datang memenuhi undangan LSM Koalisi Perempuan NTB hanyalah *Tuan Guru* Bajang. Seperti diceritakan oleh pengakuan narasumber dari Koalisi Perempuan:

... ”pada saat itu *Tuan Guru* Bajang dengan tenang dan mantap ikut terlibat diskusi, bahkan dia memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan kaum perempuan

NTB dan berjanji jika terpilih nanti tidak akan pernah meninggalkan kaum perempuan dalam setiap aspek pembangunan NTB karena seperti diakuinya dia dibesarkan oleh seorang perempuan-ibunya setelah ayahnya menikah lagi. Jadi menurutnya perempuan adalah sumber kekuatan besar untuk mengelola rumah tangga, negara dan pemerintahan NTB”.

Janji yang diucapkan oleh *Tuan Guru* Bajang ini dianggap sebagai kontrak sosial dan dukungan penuh terhadap pengembangan diri perempuan NTB, dan tentunya bagi pihak *Tuan Guru* jaringan sosial antara dirinya dan kelompok perempuan merupakan dukungan yang ikut menentukan keberhasilannya dalam pilgub nanti. Sebetulnya LSM Perempuan di seluruh Indonesia telah sejak tahun 70-an hingga ke tahun 90-an telah menggunakan demokrasi sebagai pendekatan dalam mengembangkan masyarakat yaitu dengan cara menerapkan azas demokrasi dalam setiap program-program kegiatannya. Pencapaian demokrasi dari sudut pandang LSM perempuan adalah bagaimana masyarakat memiliki kesetaraan dengan pemerintah dalam mengelola negara dan dalam perspektif lebih mikro adalah masalah keterwakilan masyarakat (perempuan) dalam pemilu parlemen dan parpol. Kesadaran politik perempuan tentu terkait dengan upaya pendidikan politik, dan pendidikan politik harus dilakukan secara berkelanjutan dan sangat mendesak karena kuota keterwakilan perempuan di Parlemen sebanyak 30% akan menjadi sia-sia jika tidak ada kesiapan dari kaum perempuan itu sendiri. Keterwakilan perempuan di Parlemen dapat saja terpenuhi, namun karena perempuan terutama mereka yang berada di daerah tidak memiliki kapasitas politik yang memadai maka peran politik perempuan akan tetap termajinalkan. Institusi yang mampu memberikan pendidikan politik perempuan adalah Kementerian Negara pemberdayaan perempuan, Partai politik, Pondok Pesantren, Universitas, LSM, Media Masa cetak dan elektronik dan lembaga lainnya yang memiliki *concern* terhadap perempuan, namun hingga saat ini hasilnya belumlah maksimal.

Pelaksanaan UU Otonomi Daerah tahun 1999 berdampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan perempuan di daerah terutama terhadap penguatan politik identitas perempuan dan revitalisasi adat karena adat cenderung bermakna ganda disatu sisi berupa panglima atas nilai-nilai moral dan pada sisi yang lain berupa pembatasan terhadap peran politik perempuan. Misal seperti adat kawin muda, "*merare*" yakni adat melarikan anak gadis muda untuk dinikahi secara adat oleh pria, juga adat yang mendahulukan anak laki-laki untuk bersekolah daripada anak perempuan, semua perlakuan adat tersebut berimplikasi terhadap pembatasan peran perempuan, untuk itu dibutuhkan revitalisasi adat sesuai dengan UU Otda. Permasalahan kaum perempuan¹² untuk terlibat aktif dalam dunia politik di NTB menghadapi beberapa kendala, terutama kendala keterbatasan pendidikan yang dimiliki perempuan, ada 23,75% perempuan NTB yang buta huruf dan kegiatan ekonomi komersial masih didominasi laki-laki, sementara perempuan diposisikan untuk mengurus rumah tangga. Permasalahan penting lain adalah tingginya angka kematian ketika melahirkan akibat perkawinan usia muda dan tingginya angka perempuan yang bekerja sebagai TKW ke luar negeri. Untuk itu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh LSM Perempuan, seperti LBH Apik, Solidaritas Perempuan, Kaukus Perempuan dan para politisi serta akademisi perempuan adalah meminimalkan kendala-kendala perempuan NTB secara lebih serius sebelum berdebat panjang lebar mengenai pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di parlemen.

LSM perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan adalah lembaga yang telah aktif memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, kesetaraan gender, penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya LBH Apik NTB adalah lembaga yang dipimpin seorang aktivis perempuan telah menyelesaikan kasus-kasus KDRT, perceraian, pendampingan hukum TKW yang bermasalah dengan majikan dan pendidikan hukum dan politik. Gebrakan aktivis

¹² Dewi dan JZ, Gerak Langkah Kartini-kartini NTB, dalam Buletin Bini Perempuan, edisi ke 23, Mei 2008, diterbitkan oleh LBH Apik NTB.

perempuan patut menjadi tauladan dengan cara melakukan Kongres Politik Perempuan pertama di NTB pada april 2008 yang diikuti peserta aktivis perempuan, legislatif, budayawan, akademisi, jurnalis hingga ke ibu-ibu rumah tangga. Beberapa catatan utama dalam kongres politik perempuan itu sebagai berikut:

- (a) Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah untuk semua sub sektor melalui kelembagaan atau wadah yang ada.
- (b) Memperluas kelembagaan penanganan pemberdayaan perempuan sebagai wadah yang mendukung kemajuan dan kemandirian perempuan.
- (c) Meningkatkan komitmen antar lembaga pemerintah, swasta dan independen baik dalam pengembangan kelembagaan, proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

LSM LSBH Mataram didirikan pada tanggal 11 Februari tahun 2000, pasca beberapa aktivis mahasiswa, LSM, akademisi dan tokoh masyarakat mengadakan diskusi pada 26 September tahun 1999 untuk melakukan evaluasi terhadap arah perubahan yang sedang terjadi di tingkat pusat. Dalam proses diskusi itu masih dipercaya bahwa hukum dan demokrasi akan mampu menyelesaikan kemelut sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat Indonesia. Inspirasi diskusi inilah yang memberi dorongan kepada para aktivis gerakan sosial untuk memikirkan sebuah wadah baru untuk melanjutkan perjuangan mereka demi memajukan masyarakat daerah yang demokratis secara politik, partisipatif secara budaya dan adil secara ekonomi. Para peserta diskusi bersepakat membentuk lembaga yang konsen terhadap studi-studi hukum dan advokasi, lembaga ini diberi nama Lembaga Studi dan Bantuan Hukum Mataram atau disingkat sebagai LSBH. Visi yang mereka emban adalah ikut serta dalam mewujudkan masyarakat yang adil secara hukum, makmur dan sejahtera secara ekonomi, demokratis secara politik dan partisipatif secara sosial budaya. Sedangkan misi yang hendak dituju berkaitan dengan lima hal berikut: *Pertama*, mendorong peningkatan partisipasi politik rakyat. *Kedua*, mendorong terwujudnya sistem pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berwawasan kelestarian lingkungan

hidup. *Ketiga*, mendorong sistem hubungan industrial yang adil. *Keempat*, mendorong untuk tetap terpeliharanya pranata-pranata lokal dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. *Kelima*, adalah mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat¹³. Sekarang ini LSM LSBH Mataram dipimpin oleh lima orang dewan pimpinan dan untuk melaksanakan kerja kesehariannya dewan pimpinan membentuk Pimpinan Harian yang diketuai oleh Milta Utami dibantu oleh divisi sipil dan politik (Suhaimi), divisi hukum dan kebijakan (Gayep), divisi perempuan (Titi Suhada) serta divisi bagian umum (Yulian Numaning).

Gerakan sosial yang digagas LSBH dimulai seketika itu pula dalam rangka memperingati hari buruh sedunia yang jatuh pada bulan Mei (tahun 2000) biasa disebut dengan "*May Day*" dengan dikerahkannya sebanyak 2000 massa yang terdiri dari buruh transportasi, TKI, petani, perempuan, pemuda, mahasiswa, LSM, dan lembaga sosial lainnya melakukan aksi panjang (*May Long Day*) yang tergabung dalam aliansi Front Perjuangan Rakyat untuk membela hak-hak buruh. Tahun 2008 ini aksi buruh lebih difokuskan pada memberikan solusi kepada persoalan-persoalan buruh, seperti kenaikan upah buruh, jaminan sosial tenaga kerja, menghentikan kebijakan *outsourcing* dan kontrak kerja karena dua hal terakhir dianggap tidak dapat memberikan jaminan bagi kesejahteraan buruh. Aksi yang dilakukan pada tanggal 2 Mei 2008 dalam rangka memperingati Hardiknas digelar aksi menolak kenaikan harga BBM dan menolak anggaran pendidikan 20% karena dianggap tidak mencukupi untuk meningkatkan dunia pendidikan di daerah. Sebagai solusi pendampingan dan advokasi bagi masyarakat maka didirikan Klinik Hukum *on the spot* sebanyak 52 kali sehingga persoalan hukum yang menjerat rakyat kecil dapat difasilitasi hingga ke pelosok desa. Tema utama klinik hukum pertama adalah pembelajaran tentang hak-hak dasar warga negara (konstitusi) dan bagaimana hak-hak dasar ini dipenuhi oleh negara lewat aparat pemerintah. Tema favorit lain

¹³ Buletin LENTERA, edisi perdana Mei-Juni, LSBH Mataram, tahun 2000.

adalah masalah hukum (konsultasi dan pendidikan hukum) di dua kabupaten, Lombok Tengah dan Lombok Timur yang terkait dengan hukum agraria atau hukum pertanahan. Pada saat ini di Kabupaten Lombok Timur sedang terjadi pengusuran lahan-lahan pertanian untuk pelebaran jalan oleh pemda tanpa pemberian ganti rugi, begitupun ganti rugi yang terlalu kecil untuk pembangunan Bandara internasional NTB kepada para petani.

3.3. Koalisi LSM, Tuan Guru, Pondok Pesantren dan Perubahan Sosial Politik Daerah

Dari data dan fakta penelitian, peran penduduk golongan muda baik yang berasal dari unsur LSM maupun unsur *Tuan Guru* dalam menentukan arah dan pola perubahan sosial politik ternyata sangat signifikan, walau baru dilakukan oleh sebagian kecil elit perwakilan mereka. Ada beberapa kondisi obyektif mengapa hal itu bisa terjadi. *Pertama* LSM yang dapat diasosiasikan sebagai salah satu elemen dari *civil society* Lombok memang bekerja keras untuk melakukan perubahan dengan cara melakukan pemberdayaan dan advokasi baik dibidang pendidikan politik praktis, bidang hukum, lingkungan, kesehatan, sosial budaya, pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Berkat kerja keras LSM maka kasus-kasus ganti rugi tanah misal yang diperuntukkan bagi pembangunan Bandara baru dapat dimediasi dan diselesaikan secara perlahan, sebagian dari petani pemilik yang tanahnya diambil alih telah mendapat ganti rugi. Begitupun proses ganti rugi pada pembangunan daerah wisata di Pulau Gili Trawangan, dimana dengan kegigihan LSM LSBH melakukan pendampingan terhadap penduduk pulau, akhirnya penduduk saat ini menjadi pengelola berbagai resot dan rumah makan dan aktivitas wisata seperti snorkeling dan selam. Padahal dibanyak daerah wisata lain, Bali misalnya, penduduk lokal tergerus oleh kapitalisasi obyek wisata yang sebetulnya milik adat, sehingga mereka hanya mampu menjadi pekerja wisata saja, bukan pemilik usaha jasa wisata. Upaya LSM untuk mengelola konflik potensial dengan baik antara Pemda, penduduk lokal dan pengusaha patut diacungi jempol. Mereka

berupaya tidak tertelan oleh konflik itu sendiri, tetapi melakukan upaya resolusi damai dengan menerapkan prinsip *win-win solution* sehingga pihak-pihak yang berkonflik dapat menerima pembagian peran dengan baik.

Di bidang politik praktis, telah banyak yang dilakukan LSM untuk mendorong perubahan, terutama partisipasi dan keterlibatan masyarakat untuk memposisikan diri menjadi pendamping pemerintah dalam mengelola daerah NTB. Misal upaya yang dilakukan LSM Koalisi Perempuan yang selalu mendorong pendidikan kaum perempuan NTB dan keterlibatan mereka dalam dunia politik praktis, kesehatan, industri tenun dan birokrasi, serta pendampingan hukum bagi para TKW NTB yang bermasalah. Saat ini mereka sedang giat mengupayakan terpenuhinya kuota calon legislatif (caleg) perempuan dalam pemilu sebanyak 30% di DPRD untuk itu pendidikan politik kritis dan kewargaan menjadi agenda rutin yang terus dilakukan terhadap berbagai unsur perempuan NTB.

Begitupun dengan LSM Somasi yang terus menyuarakan pemberantasan korupsi di tingkat daerah telah tampak menuai hasil. Jaringan yang dibentuk Somasi hampir menyentuh berbagai elemen masyarakat, baik di lingkungan mahasiswa, tokoh agama, legislatif, birokrasi sampai para jurnalis lokal yang memiliki kepedulian tinggi untuk terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi melalui tulisan tajam mereka tentang korupsi dan pelaku-pelaku korupsi terhadap dana APBD NTB. Sementara peran *Tuan Guru* sebagai pelaku perubahan sosial politik di NTB juga sangat strategis karena beberapa kekuatan dan kelebihan yang mereka miliki. Dalam perspektif umat Islam di Lombok, *Tuan Guru* adalah individu yang dikaruniai peran sebagai pengganti kehadiran seorang Nabi yang dikasihi tuhan di tengah-tengah masyarakat. Keyakinan mutlak demikian, memunculkan keterikatan moral masyarakat kepada *Tuan Guru*, memungkinkan *Tuan Guru* menanamkan pengaruh besarnya. Kelompok muda yang berasal dari dunia Pondok Pesantren pada saat ini telah berhasil merubah peta perpolitikan NTB, karena salah seorang tokohnya yang juga berstatus ulama atau *Tuan Guru haji*

berhasil terpilih menjadi Gubernur muda pertama dari golongan santri yang akan memimpin NTB selama lima tahun ke depan. Dan tentunya telah ikut menyumbang kepada pola dan arah perubahan sosial politik Provinsi NTB ke depan.

Perubahan mendasar yang terjadi saat ini di tubuh elit agama adalah bahwa mereka harus merebut ‘ruang politik’ sehingga pola relasi agama dan politik menjadi demikian penting. Pada masa lalu, relasi yang berkembang antara NW dengan partai politik lebih memilih ke Golkar sebagai parpol yang paling dominan. Pada era reformasi terjadi pergeseran peta politik NW, mereka tidak lagi menjadi pendukung utama Golkar, tetapi lebih memilih mendukung partai P3 dan pasca reformasi kalkulasi politik kelompok ulama bergeser lagi. Pada pesta pilihan gubernur yang baru saja dimenangkan oleh *Tuan Guru Haji Bajang* (cucu pendiri NW, dari kubu Pancor) yang didukung oleh parpol PBB berpasangan dengan seorang pegawai Bappeda provinsi yang didukung oleh parpol PKS, menunjukkan terjadi afiliasi politik terjadi antara PBB dan PKS karena organisasi Nadlatul Waton berbasis masyumi, sehingga lebih memilih afiliasi ke parpol PBB dan PKS yang memiliki basis yang sama. Sementara lawan politiknya adalah gubernur yang sedang menjabat Lalu Sri Rate yang merupakan keluarga bangsawan dan didukung oleh partai politik Golkar dan PDIP. Ternyata mesin politik Golkar dan PDIP tidak mampu menandingi kekuatan mesin politik parpol Islam untuk lingkup daerah.

Dibalik persaingan politik, tersimpan sejarah konflik panjang dalam tubuh organisasi Nadlatul Waton, sehingga NW terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu Pancor dan kubu Anjani. *Tuan Guru Haji Mohamad Syeh Abdul Majid* pendiri NW memiliki dua anak perempuan, anak pertama *Rauhun* lahir dari istri pertama yang berasal dari golongan rakyat biasa atau *jejer karang* dan yang kedua *Raihan* lahir dari istri kedua yang merupakan keturunan bangsawan. Pada perkembangannya anak kedua, Raihan yang memiliki darah biru menikah dengan seorang bangsawan bernama *Gde Lalu Wira Santana* yang bekerja sebagai birokrat Pemda yakni Sekretaris Daerah

(Sekda). Anak kedua inilah yang paling dekat dengan ayahnya dan diberi kekuasaan lebih untuk mengelola NW. Sikap kurang adil inilah yang menimbulkan konflik di antara kedua anak perempuan TGH, sehingga berujung kepada perpecahan NW menjadi dua kubu, yakni NW kubu *Pancor* dipimpin oleh anak pertama dan NW kubu *Anjani* dipimpin oleh anak kedua. Konflik tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga, tetapi sudah menjalar kepada pengikut masing-masing, sehingga konflik berdarah tidak dapat dihindari karena masing-masing mengklaim sebagai pewaris NW yang syah.

Pada saat kampanye Pilgub NTB, dimana TGH Bajang yang merupakan putra dari anak tertua (NW kubu Pancor) TGH Syeh Abdul Madjid dan didukung oleh parpol PBB dan PKS mencalonkan diri jadi calon gubernur, sementara anak kedua (NW kubu Anjani) mendukung calon gubernur lama *Lalu Sri Rate* yang kebetulan keturunan bangsawan didukung oleh partai Golkar dan PDIP. Tentunya konflik kembali naik ke permukaan dan suhunya semakin meningkat. Serangan bertubi-tubi melalui pemasangan baliho, iklan yang mendeskreditkan dilontarkan oleh kubu Anjani terhadap kubu Pancor, Tetapi benih-benih konflik susulan ini tidak ditanggapi oleh TGH Bajang, bahkan pada setiap kampanyenya justru dia melemparkan upaya konsolidasi antara kubu Pancor dan Anjani. Masyarakat menilai TGH Bajang sebagai pihak yang *dizholimi*¹⁴, dan rupanya kondisi ini justru mampu menguatkan simpati masyarakat dalam bentuk dukungan penuh bagi TGH Bajang sehingga berhasil menang pada pilgub dan dilantik menjadi Gubernur pertama dari kalangan orang muda dan dari kelompok ulama.

¹⁴ Kondisi yang dialami *Tuan Guru* Bajang sebetulnya mirip dengan kondisi sewaktu SBY *dizholimi* oleh Megawati pada saat sebelum Pemilu Presiden tahun 2004, kondisi tersebut justru mampu membangkitkan rasa kasihan, emosi dan empati dari masyarakat luas, dan mereka berbalik memberi dukungan penuh kepada SBY. Begitupun yang dialami oleh *Tuan Guru* Bajang, terbukti eksploitasi emosi "*tertindas*" pada calon presiden maupun gubernur akan menjadi faktor penentu kemenangan bagi mereka.

Kemenangan *Tuan Guru* Bajang sebagai gubernur terpilih juga mengindikasikan masih kuatnya pola hubungan patronase antara *jejer karang* (rakyat biasa) dengan pemimpin agama, dimana pemimpin agama yang memiliki gelar *Tuan Guru Haji* menempati kedudukan yang paling tinggi dalam struktur masyarakat Lombok, maka berhak memperoleh loyalitas penuh dari masyarakat. Kondisi ini memudahkan upaya *Tuan Guru* untuk melakukan perubahan mendasar terutama dalam bidang agama, dari agama Islam yang terpengaruh adat “*wetu telu*” kepada Islam yang benar. Kedua, perubahan sosial ekonomi penduduk dengan cara hidup teratur, sehat dan bekerja di bawah bendera NW maka penduduk dapat merubah nasibnya. Ketiga, di dunia politik praktis, *Tuan Guru* sering menjadi penggerak demonstrasi atau unjuk rasa yang menindas rasa keadilan rakyat, upaya ini membawa perubahan pada masyarakat dari semula tidak peduli kepada negara menjadi ikut terlibat aktif memantau jalannya kebijakan negara terutama untuk daerah NTB.

Sebaliknya, dari sudut negara dan pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah NTB, posisi *Tuan Guru* yang mengakar dalam masyarakat dianggap mampu memberi motivasi kepada masyarakat luas untuk terlibat secara penuh dalam program-program Pemerintah Daerah, misal dalam bidang kesehatan terutama program Keluarga Berencana (KB). Sejak program KB diluncurkan di tahun 80-an, daerah NTB merupakan salah satu daerah yang paling berhasil melaksanakan program KB. Keberhasilan ini berkat dukungan penuh para *Tuan Guru* dalam setiap ceremahnya untuk mengajak masyarakat ikut ber-KB (Somasi,2003:314).

LSM sadar betul akan kekuatan politik yang dimiliki figur *Tuan Guru*, mereka dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, terutama pembangunan sosial, ekonomi dan politik. Maka, beberapa LSM mulai memanfaatkan posisi *Tuan Guru* untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat karena posisi *Tuan Guru* bagi para aktivis LSM dianggap sebagai “*spoke person*” untuk pesan-pesan dan pemberdayaan masyarakat karena akan lebih cepat sampai dan

diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat bila melalui *Tuan Guru* (Idem, Somasi, 2003:314-315).

Dari sisi ranah politik, pilihan politik seorang *Tuan Guru* dianggap memberikan implikasi luas terhadap pilihan politik umatnya dan warga desa sekitar ponpes. Kondisi obyektifnya memang demikian, pilihan politik *Tuan Guru* akan menjadi pilihan politik masyarakat. Jika kita menengok kepada perjalanan politik Orde Baru dimana partai yang berkuasa saat itu Golkar bersama militer secara sadar telah merangkul elit-elit agama sebagai instrumen alat penggalangan massa di Pulau Lombok. Hasil Kajian Ervyn Kaffah dari Somasi menunjukkan bahwa proses penggalangan dukungan politik oleh Golkar melalui *Tuan Guru* ditempuh melalui pendekatan insentif material untuk kepentingan pengembangan kegiatan dakwah dan pendidikan. Selain itu para *Tuan Guru* diberi imbalan kontraprestasi berupa posisi-posisi strategis dalam birokrasi institusi pemerintah, legislatif daerah bahkan hingga ke tingkat nasional (Somasi, 2003:315). Sehingga sejak tahun 1971 hingga 1997 Golkar selalu menjadi partai pemenang nomer satu di Lombok, hal ini dimungkinkan berkat dukungan politik *Tuan Guru*. Tetapi sejak era reformasi, perebutan kekuatan politik *Tuan Guru* tidak lagi bisa didominasi oleh parpol Golkar, seiring terjadinya perubahan peta politik di tingkat pusat, di Lombok parpol Golkar bukan lagi menjadi parpol penentu tunggal karena seiring dengan kenaikan parpol Islam terutama PKS dan PBB di pentas politik nasional maupun regional dan lokal pada akhirnya mampu menggeser dominasi Golkar terhadap ulama *Tuan Guru*.

Beberapa narasumber LSM dan ulama di Lombok memandang arah perubahan sosial politik untuk mencapai demokrasi di daerah harus dilakukan dengan cara mereformasi birokrasi, sistem politik, dan struktur politik daerah karena menurut mereka saat ini proses demokrasi hanya beorientasi pada hasil bukan kepada perubahan nilai-nilai mendasar. Misal seperti perilaku anggota lembaga eksekutif dan legislatif serta yudikatif yang seharusnya

dikontrol oleh kekuatan lebih tinggi dari mereka karena sampai sekarang lembaga-lembaga itu cenderung bersikap eksklusif.

3.4. Penutup: Peran Kelas Menengah Muda dalam Menentukan Arah dan Pola Perubahan Sosial Politik di Daerah

Menjadi jelas posisi dan peran kelas menengah muda yang diwakili oleh unsur LSM dan *Tuan Guru* dalam membentuk pola dan arah perubahan sosial politik di Lombok dan NTB pada umumnya. Jika pada penelitian sebelumnya, saudara Thung Ju Lan masih gamang untuk menunjuk kepada keberadaan dan peran serta kelas menengah Lombok, sehingga hanya sampai pada pembentukan kelas elit bangsawan “*kedatuan*” dan kelas rakyat “*jejer karang*” pada penelitian kali ini tuntas sudah bahwa formasi kelas menengah muda atau biasa dikonsepsikan sebagai *young middle class* terjadi secara solid antara unsur LSM/NGOs dengan Ulama “*Tuan Guru*”. Kedua unsur kelas menengah muda Lombok ini merupakan bagian dari *civil society* Lombok yang berfungsi sebagai agen pembaharu, agen perubahan dan agen transformasi sosial politik. Melalui kelas menengah ini ide-ide tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang sering dikorupsi pihak penguasa birokrasi dan legislatif maupun yudikatif, ide tentang pelibatan partisipasi publik dalam pengelolaan daerah baik dalam bidang pemerintahan, pengelolaan aset wisata, pembangunan infra struktur dan supra struktur daerah dan pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik, ide tentang penyebaran keadilan sosial bagi masyarakat daerah, dan ide tentang keikutsertaan dan keberserikatan dalam lembaga parpol maupun lembaga publik menjadi hal yang mutlak dilakukan.

Kondisi masyarakat Lombok dan NTB pada umumnya yang cukup terpuruk dari berbagai segi (pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, perkawinan, perceraian, pengangguran dan kriminalitas) telah menjadi pemicu bagi kebangkitan kelas menengah muda untuk terlibat ikut dalam penentuan pola dan arah perubahan sosial politik NTB ke arah konsolidasi demokrasi partisipatif melalui berbagai

gerakan sosial. Saat ini peranan mereka dianggap sebagai agen pembaharu dan *vokal point* atau kelompok kritikal yang berbicara menyuarakan problem dan solusi dari dan bagi masyarakat Lombok sangatlah penting.

Gerakan sosial yang digagas kelas menengah Lombok melalui LSM untuk pemberantasan korupsi dan pemantauan pelaksanaan pemerintahan di daerah bertujuan untuk memberikan arah positif bagi pembangunan daerah, sehingga mampu membawa daerah NTB ke arah perubahan sosial politik yang lebih maju dan menguntungkan bagi rakyat. Gerakan sosial untuk pemberantasan korupsi ini terorganisir dengan baik dan mengarah ke gerakan masif dengan cara melibatkan seluruh elemen masyarakat dan didukung oleh peran ulama, mahasiswa dan keterlibatan intens dari para jurnalis. Sehingga, gerakan ini dapat berjalan fungsional, bermula dari terseraknya gerakan sosial ini yang terbungkus dalam berbagai wadah LSM anti korupsi dianggap kurang maksimal dan sangat bersifat personal serta sektoral. Maka atas dasar pemikiran itu LSM Somasi NTB yang sejak awal telah menyoroti korupsi mulai membangun aliansi dan jaringan kerja dalam satu wadah organisasi besar yang diberi nama Organisasi Anti Korupsi NTB (OAK-NTB). Melalui wadah bersama inilah mereka mulai membangun sistem pemantauan penggunaan dana publik (APBD) dengan cara melakukan audit, advokasi publik hingga kepada pengawalan proses peradilan. Secara strukturalpun kinerja OAK didukung oleh ketersediaan fiqh anti korupsi yang dibuat atas kerjasama para ulama *Tuan Guru* dan aktivis LSM. Jaringan sosial (*social networks*) yang senantiasa dibangun oleh kelompok-kelompok LSM di daerah adalah cara utama untuk mengintegrasikan masyarakat kedalam politik dari bawah melalui struktur mobilisasi. Dan struktur mobilisasi yang dijalankan secara kontinuitas untuk membantu gerakan sosial dalam mengkoordinir dan mempertahankan gerakan dengan menghubungkan para pemimpin dengan tindakan-tindakan di lapangan yang didasarkan pada unsur kepercayaan dan kemampuan spontan dari masyarakat untuk melawan represi dan eksploitasi atas kehidupan rakyat.

Gerakan sosial di Lombok-NTB yang direalisasikan oleh berbagai kelompok masyarakat, baik dalam bentuk yang lebih solid dan teroganisir (LSM, Ikatan Mahasiswa, dan ulama) maupun dalam bentuk yang lebih cair (kumpulan temporer masyarakat yang diikat oleh kepentingan yang sama) memiliki peran sangat strategis dalam melakukan kontrol dan kritik terhadap pemerintah (Pemda) dan DPRD. Dalam proses penyelenggaraan demokrasi di daerah, kebutuhan akan keterlibatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan menjadi keharusan yang mutlak karena gerakan sosial berfungsi sebagai elemen sosial bagi proses transformasi peran negara dari perannya sebagai *government* (pembuat regulasi) ke arah peran *governance* sebagai administrator. Begitupun untuk mendorong percepatan demokrasi transisi konsolidasi demokrasi menjadi mutlak, dan konsolidasi itu dapat dilakukan jika masyarakat telah memiliki sikap, kebiasaan dan kondisi demokrasi, kondisi-kondisi inilah yang coba dibangun kelas menengah muda Lombok. Kebangkitan gerakan sosial di Lombok adalah untuk kepentingan membangun identitas sosial baru, menciptakan ruang demokrasi bagi aksi sosial yang otonom, dan berupaya menafsirkan kembali norma-norma yang berlaku seraya membentuk ulang lembaga-lembaga sosial, dalam kerangka membentuk “*core*” untuk memperkuat institusi-institusi sosial dalam masyarakat.

Inti dari demokratisasi adalah pelibatan partisipasi publik, maka seyogianya partisipasi publik haruslah mendapat tempat yang penting dalam manajemen pemerintahan daerah. Karena, penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah memerlukan adanya *checks and balances* dalam bentuk kritik dan kontrol dari warganya demi mewujudkan tanggungjawab kerja secara optimal. Partisipasi publik juga dapat memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan sinergi serta kemitraan dengan pemerintah, dengan demikian pemerintah tidak dibiarkan sendiri mengelola negara tetapi didampingi oleh rakyat. Transformasi negara itu akan terjadi sepanjang tumbuhnya masyarakat sipil atau *civil society* pada

suatu negara karena dengan kekayaan budaya, latar belakang pendidikan intelektualnya, mereka merupakan lapisan paling kritikal dalam *civil society*.

Dalam pandangan kelas menengah muda Lombok selama ini Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Negara belum melakukan usaha maksimal untuk memenuhi hak-hak konstitusional warganegara yang memang merupakan kewajibannya seperti tertuang dalam kontrak sosial dalam Undang-undang dasar 1945. Ada dua kondisi faktual yang membingkai keadaan tersebut, *pertama*, karena negara tidak menempatkan kewajibannya sebagai skala prioritas dan kewajiban tidak menjadi mutlak dan cenderung dapat ditunda dengan berbagai alasan, terutama alasan klasik karena ketidakmampuan anggaran negara untuk memenuhi kewajiban. *Kedua*, negara tidak memiliki alat kontrol yang kuat untuk mengontrol kekuasaan negara yang terlalu kuat dan cenderung terbawa arus kontrol negara adidaya lain, dan cenderung tunduk kepada keputusan politik luar negeri dari pada kepada konstitusi negara sendiri. Oleh karena itu arah yang digagas oleh kelas menengah muda untuk perubahan sosial politik daerah adalah dalam bentuk mewajibkan Negara untuk melakukan pemenuhan hak-hak konstitusional warganegara, menjalankan demokrasi untuk mewujudkan masyarakat yang adil secara hukum, makmur dan sejahtera secara ekonomi, demokratis secara politik dan partisipatif secara sosial budaya. Dan pola perubahan sosial politik daerah yang dikehendaki kelas menengah muda Lombok adalah terwujudnya peningkatan partisipasi politik rakyat, lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan tetap terpeliharanya pranata-pranata lokal dalam kehidupan sosial budaya masyarakat.

3.5. Kepustakaan

Arief Budiman dan Olle Tornquist, 2001, *Aktor Demokrasi, Catatan Tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*, Penerbit Institut Studi Arus Informasi.

- Abdurachman, Muslim, 1999, "Peran Masyarakat Akademis Sebagai Bagian Masyarakat Madani", dalam *Masyarakat Versus Negara*, Jakarta: Kompas.
- Arbi Sanit, pengantar, dalam Ridwan Saidi, 1989, *Mahasiswa dan Lingkaran Politik*, Penerbit Lembaga Pers Mahasiswa Mapussy Indonesia, Jakarta.
- Budiwanti Erni, 2000, *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*, Disertasi diterjemahkan oleh Noor Cholis dan Hairus salim, Penerbit LkiS-Yogyakarta.
- Baharuddin, 2007, *Nahdlatul Whatan dan Perubahan Sosial*, diterbitkan oleh Genta Press.
- BPS, Profil Sosial Ekonomi Provinsi NTB tahun 2006/2007.
- BPS, Mataram Dalam Angka 2007/2008
- BPS, Susenas tahun 2004 dan 2008.
- Buletin LENTERA, edisi perdana Mei-Juni, LSBH Mataram, tahun 2000.
- Cohen, J, 1985, *Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Con temporary Social Movement*, Social Research.
- CESDA-LP3ES, 1996, *The Indonesian NGO Agenda*.
- Dewi dan JZ, *Gerak Langkah Kartini-kartini NTB*, dalam Buletin Bini Parigan, edisi ke 23 Mei 2008, diterbitkan oleh LBH Apik NTB.
- Dawam Rahardjo, 1999, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, penerbit LP3ES Jakarta.
- Fukuyama, Francis, 1992, *The End of History and the Last Man*, London Hamish Hamilton.
- Gerard Clarke, 1998, *The Politics of NGOs in Southeast Asia*, Published by Routledge, London and New York.
- Gurr, Ted Robert, 1991, "Theories of Political Violence and Revolution in the Third World" in *Conflict Resolution in*

- Africa*, edited by F.M. Deng and I.W. Zartman, Washington D.C.: The Brookings Institution.
- Gramsci, Antonio, 2000, *Sejarah dan Budaya*, diterjemahkan dari buku: *Selection from the Prison Notebooks*, 1987, New York: International Publisher, Penerbit Pustaka Prometheus.
- Goudner dalam Muslim Abdurachman, 1999, “Peran Masyarakat Akademis Sebagai bagian Masyarakat Madani”, dalam *Masyarakat Versus Negara*, Jakarta: Kompas.
- Giddens, Anthony, 1995, *Politics, Sociology and Social Theory*, Stanford California: Stanford University Press.
- _____, 1999, *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*, dalam Manuel Kaisiepo: *Antara Negara Kesejahteraan dan Masyarakat Madani*, Diskusi Aktualisasi “The Third Way”, dalam *Masyarakat Versus Negara*, Jakarta: Kompas.
- Henny Warsilah (ed.), 2006, *Kelas Menengah dan Demokratisasi*, Penerbit LIPI Press, Jakarta.
- Henny Warsilah (ed.), 2003, *Kelas Menengah Déjà Vu*, Penerbit PMB-LIPI, Jakarta.
- Laporan Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kota Mataram, 2007/2008.
- Laporan The World Bank, 1993, diterbitkan oleh World Bank.
- LSBH, 2000, Buletin LENTERA, edisi Perdana Mei-Juni, LSBH Mataram.
- Somasi NTB, 2003, *Fiqh Korupsi, Amanah vs kekuasaan*, diterbitkan oleh Somasi NTB bekerja sama dengan USAID dan The Asia Foundation.
- Somasi NTB, 2003, *Mencabut Akar Korupsi*, diterbitkan oleh Somasi NTB bekerja sama dengan USAID dan The Asia Foundation.

- Sri Kusyuniati, 1993, “Nilai-nilai Demokrasi dan Perempuan” dalam buku *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, ed. Fauzie Ridjal dkk, Penerbit PT Tiara Wacana Yogyakarta.
- Sandra Kartika dan Candra Gautama (ed.), 1999, *Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara*, diterbitkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta.
- Thung Ju Lan, “Kelas Menengah Lombok: Kompetisi Kultural antar Kelas, Suku Bangsa dan Agama” dalam, Henny Warsilah (ed.): *Kelas Menengah dan Demokratisasi*, Penerbit LIPI Press, Tahun 2006 Jakarta.
- Taufik Abdullah, 1976, *Agama, Pemuda dan Perubahan Sosial*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Touraine, Alain, 1985, “*An Introduction to The Study of Social Movement*”, Social Research.
- Uhlen, Anders, 1998, “Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia”, Terjemahan dari *Indonesia and The Third Wave of Democratization: The Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World*, Curazon Press, London in 1997, Penerbit Mizan, Bandung.

BAGIAN EMPAT

BURUH MIGRAN, PEMUDA DAN GERAKAN SOSIAL KRITIS DI PERKOTAAN: Advokasi Buruh Migran di Mataram, Lombok dan Transnational Advocacy Networks

Riwanto Tirtosudarmo

4.1. Pengantar

Pemuda selalu mengambil peranan yang penting dalam perubahan sosial dan politik. Pemikir terkemuka yang pernah dimiliki Indonesia, Soedjatmoko (almarhum), dalam *keynote address* yang disampaikan pada *Symposium on Youth and Societ: Viewpoint for the Future* yang diselenggarakan oleh *Association of Asian Social Sciences Research Council (ASSREC)* tahun 1985 di Denpasar Bali telah mengingatkan bakal peliknya masalah-masalah yang akan dihadapi oleh kaum muda di Asia menjelang abad ke-21. Menurut Soedjatmoko,¹ “menurut perhitungan manapun, kaum muda Asia harus menghadapi masa depan yang tidak jelas dan mencemaskan”. Pernyataan Soedjatmoko, 23 tahun yang lalu, terbukti benar. Di Indonesia, menjelang kejatuhan Presiden Suharto pada bulan Mei 1998 dari tampuk kekuasaan yang telah digenggamnya selama 32 tahun, kaum muda terutama yang tinggal di daerah perkotaan dihadapkan pada berbagai pilihan politik yang sulit. Kesulitan itu terutama karena dikekangnya kemerdekaan untuk menyatakan pendapat dan sangat represifnya rejim politik Suharto.

Kita menyaksikan selama 32 tahun Suharto berkuasa kalangan kaum muda beberapa kali mencoba melawan represi politik yang ada melalui berbagai bentuk demonstrasi massa. Pada tahun 1974 mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menentang represi

¹ Dikutip dari Kathleen Newland dan Candrakirana Soedjatmoko (1994), halaman 103.

politik dan sangat dominannya modal asing dalam pembangunan. Aksi demonstrasi ini gagal dan melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa 15 Januari (MALARI) dan dijebloskannya pimpinan mahasiswa ke penjara rejim Orde Baru. Demonstrasi mahasiswa menentang rejim Suharto kembali marak di kota-kota besar di Indonesia pada tahun 1977-1978, namun kembali protes kaum muda ini kembali dibungkam. Represi yang dialami oleh kaum dari rejim Orde Baru semakin menguat karena secara sistimatis dilakukan melalui berbagai kebijakan yang dikenal sebagai Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang digagas oleh Menteri Pendidikan saat itu, Daoed Yosoef. Gelombang demonstrasi kaum muda kembali menguat pada tahun 1977 bersamaan dengan terpaan krisis ekonomi yang menggulung fondasi perekonomian Indonesia yang rapuh. Pada Mei 1998 Suharto harus menyerah pada tekanan-tekanan ekonomi dan politik yang tidak mungkin dibendunginya. Kaum muda kali ini berhasil menumbangkan rejim yang berkuasa.²

Perubahan politik yang cepat setelah tumbangnya rejim Suharto yang dikenal sebagai periode reformasi, membuktikan kebenaran kata-kata Soedjatmoko di tahun 1985, betapa menjelang abad ke-21 kaum muda masih akan dihadapkan pada masalah-masalah yang pelik, meskipun rejim politik yang represif telah ditumbangkan. Kepelikan masalah yang dihadapi pasca penggulingan Suharto terutama dikarenakan reformasi politik tampaknya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Rejim politik pasca Suharto, mulai dari Habibie, Abdurahman Wahid, dan sekarang Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK); terbukti belum banyak merubah kondisi riil masyarakat banyak yang masih dililit oleh rendahnya kesejahteraan ekonomi maupun sosial. Meskipun kebebasan politik dan kemerdekaan pers telah dicapai, kehidupan demokrasi belum

² Untuk memahami peran yang dimainkan kaum muda menjelang kejatuhan Suharto pada Mei 1998, antara lain dapat dibaca pada buku "Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98", yang disunting oleh Muridan S. Widjojo et.al . (1999).

beranjak secara substansial.³ Dalam konteks perubahan politik pasca Suharto yang telah berlangsung hampir 10 tahun ini, kita menyaksikan betapa peran politik kaum muda masih sangat diperlukan, meskipun tantangan yang dihadapi telah banyak berubah dari apa yang dihadapi sebelum jatuhnya Suharto.

Penelitian ini bertolak dari pertanyaan: *“Bagaimana arah dan pola perubahan sosial politik di daerah perkotaan Indonesia pasca Orde Baru? Apa sumbangan mahasiswa sebagai elemen kelompok orang muda dalam pembentukan kelas kritika intelektual dalam mendorong perubahan sosial politik dan proses demokratisasi? – dan dengan cara bagaimana gerakan sosial (social movement) yang mereka gagas dapat ikut menentukan arah dan pola perubahan sosial politik”*.⁴ Proses demokratisasi, meskipun dalam berbagai hal tidak berjalan seperti yang dibayangkan, merupakan proses sosial politik yang tidak mungkin ditarik kembali. Secara nasional arah dan pola yang berkembang telah banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Hampir dapat dipastikan bahwa perubahan yang terjadi terefleksi dalam berbagai bentuk dan ragam gerakan sosial yang berlangsung di masyarakat. Bervariasinya bentuk dan ragam gerakan sosial yang terjadi, sebagai cerminan dari arah dan pola perubahan politik nasional antara lain ditentukan oleh bagaimana kaum muda menanggapi “peliknya masalah-masalah’ yang dihadapi. Tanggapan kaum muda juga akan ditentukan oleh konteks perubahan sosial politik yang terjadi di mana mereka tinggal dan persoalan-persoalan mendesak apa yang dihadapi oleh masyarakat dimana kaum muda itu berada.

³ Syamsuddin Haris (2006), peneliti senior dari LIPI, dalam orasi pengukuhan sebagai profesor riset, secara menarik mempertanyakan arah perubahan politik pasca Suharto “Reformasi untuk demokrasi atau Korupsi dan Anarki? Dilema demokratisasi di Indonesia Pasca-Orde Baru”.

⁴ Lihat proposal penelitian “Pola dan Arah Perubahan Sosial politik: Peran Orang Muda dalam Perubahan Sosial Politik di Daerah Perkotaan Indonesia”, PMB-LIPI, 2007.

Tulisan ini adalah bagian dari penelitian tentang pemuda dan perubahan sosial di daerah perkotaan, yang dilakukan di Kota Mataram, di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa dalam setiap perubahan sosial dan politik yang terjadi, pemuda hampir selalu memiliki peran yang penting karena mereka pada umumnya belum terjebak pada kepentingan yang sempit, dan masih memiliki idealisme untuk merubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik. Asumsi lain yang mendasari penelitian ini adalah bahwa perkembangan politik dan perubahan sosial pasca-Suharto melahirkan ruang publik yang terbuka yang memungkinkan munculnya berbagai isu yang menantang kaum muda untuk mengambil peran sosial kritisnya. Mengingat beragamnya isu yang dijadikan bidang garapan para pemuda, penelitian ini sengaja memilih sebuah isu yang banyak menarik perhatian di Lombok, yaitu isu buruh migran yang bekerja di luar negeri. Lombok yang sangat terkenal dengan kemiskinan penduduknya merupakan sebuah daerah pengirim buruh migran yang penting ke luar negeri. Mengalirnya buruh migran ke luar negeri merupakan fenomena sosial yang mulai dikenali sejak awal tahun 1970an. Meskipun demikian, persoalan buruh migran baru mulai mendapatkan perhatian masyarakat pada pertengahan tahun 1980-an ketika media mulai melaporkan berbagai pengalaman buruk yang menimpa buruh migran Indonesia. Ketika itulah publik mulai menyadari bahwa isu buruh migran merupakan isu sosial yang sarat dengan persoalan- yang pada gilirannya menarik perhatian para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat – dan menjadikan isu buruh migran sebagai sasaran advokasi mereka.⁵

⁵ Di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, penelitian yang berhubungan dengan persoalan buruh migran telah beberapa kali dilakukan. Lihat misalnya: “Buruh Migran Perempuan dan Perebutan Ruang Publik”, semula merupakan laporan penelitian oleh Riwanto Tirtosudarmo (2002) kemudian diterbitkan dalam jurnal *Analisis-CSIS*, 2003, tahun XXXII, No. 2, pp. 228-255; “Perlindungan Hukum; Terhadap Pengiriman Buruh Migran Perempuan Indonesia ke Malaysia”, editor Jaleswari Pramodhawardani (2007).

Persoalan buruh migran di Lombok sengaja dipilih karena persoalan ini merupakan sebuah isu yang strategis. *Pertama*, sebagai sebuah isu sosial persoalan buruh migran mencerminkan persoalan yang sangat mendasar, yaitu persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang terjadi di sebuah masyarakat di wilayah tertentu bahkan di sebuah negara. Membicarakan persoalan buruh migran mau tidak mau mengharuskan kita untuk melihat persoalan yang lebih mendasar yaitu pembangunan ekonomi. *Kedua*, persoalan buruh migran, yang sebagian besar adalah perempuan, mengharuskan kita untuk melihat persoalan ketimpangan gender yang bersifat mendasar di masyarakat kita. *Ketiga*, buruh migran selain merupakan isu yang bersifat lokal dan nasional, juga menjadi isu yang bersifat global karena lokasi tempat bekerja buruh migran ada di luar negeri, di negeri-negeri yang mempekerjakan buruh migran Indonesia.

Fokus dari penelitian ini adalah peran pemuda dalam transformasi sosial dan politik, serta kaitannya dengan gerakan sosial yang bersifat transnasional. Seperti telah dikemukakan, para pemuda yang tergabung dalam berbagai LSM di Lombok, dan melakukan advokasi untuk perbaikan nasib buruh migran, merupakan kelompok yang akan diteliti. Beberapa aspek yang akan disinggung dalam penelitian ini antara lain: perkembangan LSM di Lombok dan gerakan advokasi terhadap buruh migran, bagaimana advokasi dilakukan, apa saja bentuk kegiatannya, sejauh mana gerakan advokasi buruh migran di Lombok telah mencapai sarannya, dan bagaimana jaringan gerakan advokasi buruh migran terbentuk, sejauh mana pengaruh dan kerjasama LSM nasional dan internasional.

Laporan ini disusun terutama berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari penelusuran literature dan melalui wawancara mendalam dengan para narasumber yang merupakan aktifis LSM dan kalangan akademisi di Mataram Lombok. Sistematika laporan ini adalah dikembangkan sebagai berikut. Setelah bagian pengantar akan dikemukakan secara umum tentang penduduk Lombok, yang mayoritas adalah Orang Sasak dan fenomena kemiskinan yang telah lama menjadi karakteristik masyarakat di Lombok dan Nusa

Tenggara Barat pada umumnya. Dua bagian selanjutnya akan mengupas secara garis besar tentang persoalan mendasar yang dihadapi oleh buruh migran di Indonesia, khususnya yang menyangkut absennya jaminan sosial dan perlindungan. Fenomena buruh migran juga akan dilihat dalam konteks perubahan global dan bagaimana buruh migran seharusnya dilihat dan tidak mungkin hanya dipandang sebagai sekedar isu lokal atau nasional. Setelah diulas secara panjang lebar isu pokok buruh migran, bagian selanjutnya mengupas perkembangan LSM sebagai representasi gerakan kritis pemuda di perkotaan, khususnya yang terlihat di Mataram Lombok. Pada bagian ini akan dikemukakan keterkaitan gerakan advokasi buruh migran yang bersifat lokal dengan gerakan *civil society* yang bersifat transnasional dan global. Bagian terakhir adalah kesimpulan dan temuan-temuan dari penelitian ini.

4.2. Lombok: Penduduk dan Kemiskinan

Lombok, dan provinsi Nusa Tenggara Barat, telah lama menjadi ikon dari kemiskinan dan keterbelakangan. Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Bappenas, BPS dan UNDP (2004) – yang diterbitkan sebagai National Human Development Report 2004 (The Economics of Democracy: Financing Human development in Indonesia), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Nusa Tenggara Barat menempati posisi yang terbawah dari seluruh propinsi (30) di Indonesia, berdasarkan data-data yang dikumpulkan pada tahun 2002.⁶ Posisi Nusa Tenggara Barat dalam peringkat IPM berada dibawah Nusa Tenggara Timur (urutan ke 28) dan Papua (urutan ke 29). Ternyata tingkat keterbelakangan masyarakat di provinsi Nusa

⁶ IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan indikator gabungan dari (1) Angka Harapan Hidup, (2) Tingkat Melek Huruf, dan (3) Tingkat Pendapatan. IPM dianggap sebagai ukuran yang terbaik untuk memantau sejauhmana penduduk di suatu wilayah telah mencapai kemajuan-kemajuan dalam pembangunan manusianya. Lihat Figure 2.2. Range of HDI values within provinces, 2002; dalam National Human Development Report, 2004.

Tenggara Barat tidak beranjak dari keadaan yang dialami pada tahun 1999 – tetap terendah dari seluruh propinsi di Indonesia.⁷ Antara tahun 1999 sampai dengan 2002 IPM di Nusa Tenggara Barat mengalami sedikit peningkatan meskipun dibandingkan provinsi lain masih tetap terendah tingkat IPMnya. Jika dilihat perkembangan IPM pada tingkat kabupaten, dari 10 kabupaten yang tergolong rendah IPMnya pada tahun 1999, dua kabupaten berada di Pulau Lombok, yaitu Lombok Tengah dan Lombok Barat. Ternyata pada tahun 2002, Lombok Tengah dan Lombok Barat masih termasuk dalam kelompok 10 kabupaten yang memiliki IPM rendah. Selain kedua kabupaten ini, Kabupaten Lombok Timur juga termasuk dalam 10 kabupaten yang memiliki IPM rendah. Jadi pada tahun 2002, 3 dari 10 kabupaten yang memiliki IPM rendah berada di Pulau Lombok.

Tabel di bawah ini memperlihatkan variasi IPM menurut kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat, dimana terlihat bahwa Kota Mataram selalu memiliki IPM tertinggi, dibandingkan kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Barat (2004-2005-2006). Sementara juga jelas terlihat peringkat IPM yang terendah di Nusa Tenggara Barat tahun 2004-2005-2006 adalah di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Secara keseluruhan Pulau Lombok memiliki tingkat pembangunan manusia yang terendah dibandingkan Pulau Sumbawa.

⁷ Lihat Figure 2: HDI by province, 1999-2002.

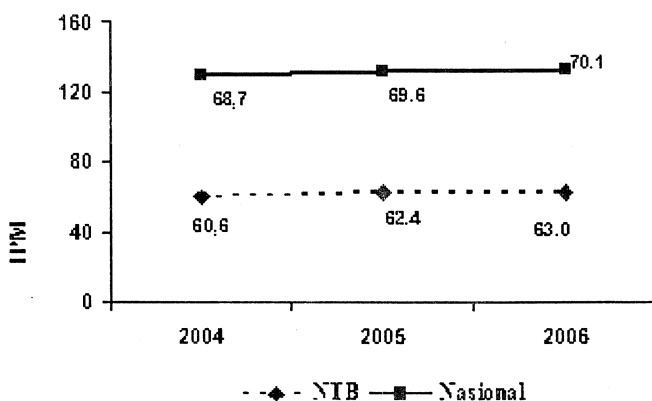
Tabel 1 IPM Menurut Kabupaten/Kota dan Peringkat IPM Provinsi NTB Tahun 2004-2006

| Kabupaten/Kota | IPM (0-100) | | | Peringkat IPM | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Lombok Barat | 57,0 | 57,8 | 58,7 | 431 | 432 | 445 |
| Lombok Tengah | 56,9 | 57,9 | 58,5 | 432 | 431 | 446 |
| Lombok Timur | 58,7 | 59,6 | 60,3 | 428 | 429 | 441 |
| Sumbawa | 63,2 | 64,0 | 64,8 | 391 | 389 | 408 |
| Dompu | 62,3 | 63,3 | 63,9 | 400 | 398 | 418 |
| Bima | 60,2 | 61,7 | 63,1 | 419 | 413 | 424 |
| Sumbawa Barat | 61,9 | 63,4 | 65,0 | 403 | 397 | 404 |
| Mataram | 68,8 | 69,4 | 69,8 | 188 | 192 | 209 |
| Kota Bima | 63,5 | 64,2 | 65,9 | 383 | 385 | 379 |
| NTB | 60,6 | 62,4 | 63,0 | 33 | 32 | 32 |

Sumber: BPS Provinsi NTB

Dalam Figure di bawah terlihat selama periode 2004-2006, IPM Provinsi NTB terus mengalami peningkatan, namun nilainya selalu jauh lebih kecil jika dibandingkan peningkatan IPM secara nasional.

IPM Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2004 -2006



Tabel 2 dibawah ini memperlihatkan tingkat pengangguran terbuka di provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Secara umum terlihat tingginya tingkat pengangguran di Pulau Lombok dengan pengangguran tertinggi justru di Kota Mataram. Sementara pada tabel 3 memperlihatkan perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Secara umum terlihat relative rendahnya PDRB per kapita dari kabupaten-kabupaten di Pulau Lombok dibandingkan dengan kabupaten di Pulau Sumbawa, meskipun penghasilan dari migas telah dikeluarkan. Angka-angka statistik tentang Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat pengangguran dan PDRB perkapita memperlihatkan dengan jelas masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Pulau Lombok di era pembangunan pasca Orde Baru sekarang ini. Dapatlah disimpulkan bahwa masyarakat Pulau Lombok merupakan masyarakat yang seolah-olah tidak mengalami perubahan yang berarti meskipun berbagai rejim pembangunan telah silih berganti di negeri ini.

Tabel 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Tahun 2008

| Kabupaten/Kota | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Lombok Barat | 8.62 | 8.13 | 9.53 | 6.07 |
| Lombok Tengah | 3.93 | 7.44 | 6.80 | 6.49 |
| Lombok Timur | 10.09 | 6.09 | 8.80 | 5.02 |
| Sumbawa | 7.05 | 6.64 | 9.61 | 5.49 |
| Dompu | 5.14 | 10.21 | 7.31 | 5.22 |
| Bima | 4.72 | 5.95 | 8.21 | 4.99 |
| Sumbawa Barat | xx | 16.95 | 18.88 | 4.81 |
| Kota Mataram | 10.50 | 15.45 | 11.57 | 13.58 |
| Kota Bima | 14.23 | 15.35 | 12.26 | 12.76 |
| NTB | 7.48 | 8.93 | 8.90 | 6.48 |

Table 3 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi NTB Tahun 2005– 2006 (Rupiah)

| Kabupaten/Kota | Termasuk Migas | | Tanpa Migas | |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Lombok Barat | 3.883.882 | 4.186.192 | 3.883.882 | 4.186.192 |
| Lombok Tengah | 3.149.322 | 3.382.146 | 3.149.322 | 3.382.146 |
| Lombok Timur | 3.310.612 | 3.608.386 | 3.310.612 | 3.608.386 |
| Sumbawa | 5.328.318 | 5.805.133 | 5.328.318 | 5.805.133 |
| Dompu | 5.394.814 | 5.978.197 | 5.394.814 | 5.978.197 |
| Bima | 4.049.302 | 4.491.920 | 4.049.302 | 4.491.920 |
| Sumbawa Barat | 104.020.748 | 104.615.721 | 5.286.996 | 5.598.184 |
| Mataram | 6.425.777 | 7.362.484 | 6.425.777 | 7.362.484 |
| Kota Bima | 4.394.960 | 4.637.663 | 4.394.960 | 4.637.663 |
| NTB | 6.217.419 | 6.672.867 | 4.080.459 | 4.443.864 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi NTB

Meskipun kemiskinan dan pengangguran yang tinggi di Pulau Lombok berpengaruh terhadap banyaknya Orang Lombok menjadi buruh migran di luar negeri, ada berbagai faktor lain yang berperan yang menyebabkan mengalirnya tenaga kerja dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari studi yang dilakukan oleh Hamzah (2000) di Desa Jago, Lombok Tengah, keengganan kaum muda untuk bekerja di desanya sebagai petani merupakan faktor yang ikut berpengaruh dari tingginya kemauan untuk bekerja sebagai buruh di luar negeri. Temuan lain yang menarik dari Hamzah adalah banyaknya mereka yang memilih menjadi buruh migran – umumnya ke Malaysia – tanpa melalui jalur resmi. Para pencari kerja ini menganggap jalur resmi terlalu lama dan memakan ongkos yang lebih banyak dibandingkan melalui jalur yang tidak resmi. Salah satu faktor juga yang menjadi sangat penting adalah adanya jaringan atau *network* yang menjadi semacam jembatan dari aliran tenaga kerja ini. Dalam berbagai kajian tentang migrasi buruh migran, agen, calo atau tekong – baik

yang resmi maupun yang tidak resmi - biasanya menjadi bagian penting dari jaringan yang menciptakan aliran buruh itu terjadi.⁸

Menurut Dinas Tenaga Kerja NTB, minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri cukup besar, hal ini terlihat dari jumlah calon TKI yang berangkat setiap tahun lebih dari 30.000 orang. Puluhan ribu calon TKI yang bekerja di luar negeri berkontribusi terhadap ekonomi keluarga di daerah mereka. Hal ini terbukti dengan jumlah uang yang dikirim ke keluarganya di NTB lebih dari Rp 2 miliar per hari. Calon TKI NTB bekerja di luar negeri antara lain di perkebunan kelapa sawit, pabrik, penjaga toko, tukang, dan pembantu rumah tangga.

4.3. Buruh Migran: Absennya Jaminan Sosial dan Perlindungan

Membicarakan persoalan buruh migran tidak mungkin melepaskannya dari konteks sejarah perkembangan buruh migran – yang mayoritas adalah perempuan. Dalam cara pandang seperti ini, sejak awal harus disadari bahwa persoalan absennya perlindungan terhadap buruh migran sesungguhnya hanyalah salah satu ujung dari keseluruhan persoalan ketenagakerjaan kita di Indonesia. Kita tidak mungkin menyelesaikan sebuah ujung persoalan tanpa membenahi keseluruhan dari persoalan yang ada. Dengan catatan seperti ini, tulisan ini dengan demikian jauh dari pretensi telah memahami persoalan ketenagakerjaan di Indonesia secara komprehensif dan karena itu harus dilihat sebagai salah satu sudut pandang yang berupaya mencari jalan keluar dari salah satu persoalan ketenagakerjaan, yaitu rendahnya perlindungan terhadap buruh migran, yang sedang kita hadapi bersama.

Buruh migran adalah salah satu jenis pekerjaan dari apa yang kita kenal selama ini sebagai sektor informal. Sebelum berkembang

⁸ Kajian tentang “taikongs” dan “calos” dalam bisnis buruh migran, lihat misalnya tulisan dari Spaan (1994) “Taikongs and Calos: The Role of Middlemen and Brokers in Javanese International Migration”.

menjadi buruh migran – yang beroperasi meliwati batas negara – jenis pekerjaan ini telah lebih dahulu berkembang di dalam negeri – yang kemudian dikenal sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Kehadiran PRT di Indonesia, adalah bagian dari sejarah sosial yang secara perlahan-lahan tumbuh sejak masa kolonial sampai masa pasca-kolonial sekarang ini. Sebagai bagian dari sejarah sosial akan bisa dimengerti mengapa PRT umumnya adalah perempuan. Sistem sosial yang didominasi oleh laki-laki telah menjadikan perempuan berada dalam posisi yang rendah dan kehilangan posisi tawar dalam lapangan pekerjaan. Ketidakadilan jender merupakan sebuah tantangan yang tidak bisa dilepaskan (*embedded*) secara tersendiri ketika kita membicarakan absennya perlindungan bagi buruh migran.

Perkembangan PRT mengalami percepatan dan mencapai bentuknya yang sekarang bersamaan dengan berkembangnya struktur perekonomian Indonesia yang pada awal tahun 1980-an disebut sebagai '*urban bias*'. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa sektor ekonomi modern-kapitalistik berkembang di daerah perkotaan seperti pulau-pulau ditengah lautan sektor tradisional-pertanian. Berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan sejak awal tahun 1970-an hingga sekarang, secara umum, melanggengkan proses-proses sosial yang didasarkan oleh struktur perekonomian yang bersifat dualistik tersebut diatas. Perubahan demografis yang masih ditandai oleh besarnya pertumbuhan penduduk yang memasuki usia kerja – dalam situasi pasar kerja yang tumbuh secara timpang – sebagaimana kita lihat, telah mengelembungkan sektor ekonomi yang bersifat informal – yang tumbuh secara tak terkendali dan diam-diam dibiarkan karena menjadi 'bantalan pengaman' dari kemungkinan merebaknya kersesahan sosial dan politik.

PRT, yang sampai pertengahan tahun 1980an hanya beroperasi di dalam negeri – mulai beroperasi melewati batas negara ketika permintaan akan jenis pekerjaan ini muncul di seberang lautan – di Malaysia, di Singapura, di Hongkong dan di negara-negara Teluk (Timur Tengah). Tampaknya '*urban bias*' tidak hanya berlaku di dalam negeri tetapi telah merupakan gejala global. Ketimpangan

desa-kota (*rural-urban economic disparities*) yang terjadi di dalam negeri tampaknya juga terjadi bersamaan dengan ketimpangan antar negara (*global inequalities*). Sejak awal tahun 80-an kita mulai melihat pergerakan PRT menjadi BMP (Buruh Migran Perempuan). Sebuah '*cross-border movement*' dari pekerja-pekerja perempuan Indonesia mulai berlangsung ke negara-negara yang membutuhkan PRT, '*house maid*', '*domestic workers*' – mungkin dengan latar belakang dan alasan sosial-ekonomi-budaya yang berbeda-beda. Kitapun harus secara hati-hati tidak melakukan generalisasi tentang situasi sosial-politik, sistem hukum, maupun 'kadar demokrasi' yang dimiliki oleh negara-negara pengimport buruh migran perempuan dari Indonesia – yang berimplikasi besar terhadap sistem perlindungan, proteksi dan jaminan sosial yang akan diterima oleh buruh migran. Sebagai contoh, BMP di Hongkong diakui haknya sebagai buruh sementara di Malaysia, Singapura, Timur Tengah dan di Indonesia sendiri tidak. Dalam konteks pembicaraan kita tentang jaminan sosial BMP – kasus Hongkong menjadi sebuah fenomena yang menarik – dan menimbulkan pertanyaan mengapa Hongkong berbeda, dan apakah Hongkong bisa menjadi model?⁹

Dari pembahasan singkat tentang genesis BMP diatas mudah-mudahan menjadi agak jelas tali-temali antara BMP dan persoalan ketenagakerjaan di negeri ini, maupun dengan persoalan ketidakadilan yang bersifat global. Jika PRT merupakan refleksi dari ketidakadilan ekonomi dan sosial yang bersifat nasional-domestik, BMP merupakan refleksi dari ketimpangan dan ketidakadilan yang bersifat lokal dan sekaligus global. Menurut pendapat saya, PRT dan BMP harus dilihat sebagai sebuah kontinum dari sebuah fenomena sosial-ekonomi antara yang lokal, nasional dan global dimana ketimpangan

⁹ Meskipun Hongkong bisa dikatakan sebagai model terbaik dari sebuah negara yang telah memberikan jaminan sosial bagi BMP namun dari studi yang dilakukan oleh Asian Migrant Centre, Oxfam dan beberapa LSM Buruh Migran Indonesia, masih banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh BMP Indonesia antara lain adalah soal 'underpayment'. (Lihat: Asian Migrant Centre, 2005)

jender (*gender inequalities*) melekat (*embedded*) di dalam fenomena dan proses sosial ekonomi yang terjadi. Persoalan BMP oleh karena itu merupakan sebuah persoalan ketidakadilan yang struktural sifatnya pada tingkat lokal maupun global.

Mengupas persoalan jaminan sosial BMP tidak akan tuntas tanpa mengupas sistim politik dimana perkembangan sistim ekonomi yang bersifat dualistik dan '*urban bias*' berkembang. Sejak awal tahun 70-an hingga menjelang akhir tahun 90-an kita berada dalam sebuah rejim politik yang bersifat otoriter di satu sisi namun secara perlahan-lahan mengadopsi sistim ekonomi yang bersifat kapitalistik di sisi lain. Dalam lingkungan politik-ekonomi seperti ini, kita tahu yang tumbuh adalah sektor ekonomi modern yang hidup karena ditopang oleh sistim KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) sementara demokrasi dan hak-hak sipil dihambat perkembangannya. Buruh sebagai lapisan masyarakat yang seharusnya merupakan elemen penting untuk berkembangnya sebuah masyarakat ekonomi-politik yang sehat justru diberi stigma politik negatif dan dimarginalisasi. Bahkan kita tahu istilah 'buruh' tidak boleh dipakai dan diganti dengan istilah 'pekerja'. Dalam konteks ini, buruh sengaja dihilangkan hak-hak sipil dan politiknya demi berjalannya sistim politik otoriter yang diperlukan untuk menjaga stabilitas agar sistim ekonomi yang semi kapitalistis berjalan.

Reformasi politik – dimana didalamnya termasuk usaha untuk mengamandemen konstitusi - yang berlangsung sejak akhir tahun 90an hingga sekarang tampaknya belum berhasil membangun format politik-ekonomi yang sesuai dengan cita-cita yang tertuang dalam konstitusi. Meskipun demikian, perubahan yang digulirkan harus diakui telah berhasil melokalisir permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Indonesia. Berbagai UU telah dihasilkan antara lain UU tentang Pemilu, UU tentang Partai Politik, UU Tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah dll. – yang mengindikasikan telah bergesernya rejim politik otoriter kearah rejim politik demokrasi. Pemerintah pasca-Suharto juga telah bergerak untuk memerangi musuh bersama yang bernama KKN. Perubahan

sistim politik yang terjadi juga telah memaksa perubahan sistim ekonomi yang menempatkan transparansi, akuntabilitas dan 'good governance' sebagai prinsip-prinsip yang utama. Lembaga-lembaga internasional yang beroperasi di Indonesia seperti UN, Bank Dunia, dan IMF disamping berbagai bentuk bantuan bilateral yang diberikan oleh negara-negara donor juga telah mengganti irama dan pendekatan yang selama ini dilakukan dengan menekankan berbagai prinsip baru sesuai dengan perubahan politik yang sedang berlangsung.

Bagaimanakah nasib buruh dalam arus perubahan politik-ekonomi yang sedang bergulir? Kita menyaksikan, meskipun secara normatif, telah dipulihkannya hak-hak politik dan hak-hak sipil buruh, dalam kenyataan nasib buruh belumlah banyak beranjak dari keadaan sebelum reformasi – bahkan kita tahu dampak krisis ekonomi tahun 1997 masih belum sepenuhnya pulih bagi sebagian buruh yang terkena PHK. Dalam konstelasi perubahan sistim politik-ekonomi yang sampai saat ini masih belum mencapai ekuilibrium inilah persoalan jaminan sosial bagi buruh – termasuk didalamnya BMP - menjadi sesuatu yang sebetulnya "sulit dipegang" dan dengan demikian memerlukan kesabaran dan analisis yang jernih terhadap duduk persoalan yang ada. Persoalan jaminan sosial bagi BMP adalah sebuah ujung saja dari berbagai ujung persoalan ketenagakerjaan yang sangat semrawut di negeri ini.

Jika kita lihat secara khusus dari perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang saat ini ada, jaminan sosial bagi BMP tertuang dalam beberapa perundang-undangan, antara lain seperti berikut ini: (1) UU RI No. 40, 2004, tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional.¹⁰ Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 ayat 1,

¹⁰ Sebelum sistim jaminan nasional ini disetujui DPR, SMERU melakukan analisis terhadap draft rancangan UU ini, berikut adalah penilaian SMERU: *Dari analisis ini, ditemukan bahwa dalam RUU ini terdapat banyak permasalahan, contohnya: program jaminan sosial dalam RUU ini kurang menguntungkan pasar tenaga kerja dan iklim usaha, kemungkinan dapat memperburuk defisit anggaran belanja kita, dan kurang memperhitungkan peranan sektor swasta dalam mengadakan*

dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pasal 1 ayat 11, disebutkan bahwa "pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pada Bab VI (Program Jaminan Sosial) Bagian Kesatu (Jenis Program Jaminan Sosial), Pasal 18: disebutkan bahwa jenis program jaminan sosial meliputi: a. jaminan kesehatan, b. jaminan kecelakaan kerja, c. jaminan hari tua, d. jaminan pensiun, dan e. jaminan kematian. (2) UU RI, No. 39, 2004, tentang "Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri". Tentang perlindungan tercantum dalam Bab VI: Perlindungan TKI. Pada pasal 77 Ayat 1: Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2: Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Dari dua UU diatas dapat kita katakan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum untuk membuat kebijakan dan program pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi BMP. Persoalannya, kebijakan dan program itu tampaknya belum ada. Kalau toh ada, kebijakan dan program itu tampaknya belum berjalan seperti yang diharapkan.¹¹ Berbagai bentuk penderitaan yang dialami oleh para

program jaminan sosial kepada masyarakat. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pengadaan program jaminan sosial oleh negara sudah bukan merupakan model yang cocok untuk memberikan manfaat jaminan sosial kepada pekerja dan keluarganya. Karena itu pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan pengadaan manfaat jaminan sosial bagi masyarakat oleh sektor swasta yang akan menggantikan sistem yang ada sekarang (Lihat Alex Arifianto, 2004)

¹¹ Perlu dicatat disini bahwa sebelum lahirnya UU diatas berbagai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, tahun 2002; juga beberapa keputusan yang dikeluarkan pada tahun 2002 dan 2003 oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tentang penunjukan beberapa lembaga swasta sebagai penyelenggara perlindungan TKI informal,

buruh migran kita adalah bukti belum berjalannya mekanisme perlindungan dan jaminan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pengiriman Tenaga Kerja Keluar Negeri Departemen Tenaga Kerja, I Gusti Made Arka, di atas. Apa yang dialami oleh para BMP adalah sebuah realitas akan lebarnya jurang antara UU dan kenyataan di lapangan.¹² Sebagai komoditas, buruh migran telah berkembang menjadi industri migrasi (*migration industry*) yang sangat menguntungkan para pengusahanya. Kepentingan pengusaha industri buruh migran yang hendak mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya mendorong mereka memperlakukan buruh migran sekedar sebagai barang dagangan. Komodifikasi dan dehumanisasi buruh migran adalah refleksi dari tidak adanya pengakuan akan hak-hak yang melekat pada buruh migran sebagai manusia. Selama buruh migran masih menjadi korban berbagai bentuk ketidakadilan dimana ketidakadilan itu juga berasal dari sikap dan tindakan pemerintah sendiri, tampaknya para buruh migran itu sendirilah yang selama ini berusaha melindungi dirinya sendiri dengan sedikit bantuan dari lembaga-lembaga non-pemerintah.

Beberapa waktu yang lalu, berita *Kompas* yang berjudul “Benahi Total TKI”, dan Berita Antara berjudul “Presiden Tegaskan Akan Reformasi Pengiriman TKI ke LN” - yang merupakan laporan dialog antara presiden dan para TKI di Timur Tengah yang banyak mengeluhkan sikap dan perlakuan Depnakertrans; kembali menegaskan kita bahwa ada persoalan-persoalan yang bersifat mendasar yang membutuhkan pemikiran serius dalam kebijakan pemerintah tentang buruh migran.¹³ Oleh karena itu, sebelum kita

maupun sebagai penyelenggara program asuransi – terutama di Arab Saudi.

¹² Situasi BMP dapat dibaca secara lengkap pada laporan yang dibuat oleh Komnas Perempuan bersama KOPBUMI dan Solidaritas Perempuan (2003) *Indonesian Migrant Domestic Workers: Their Vulnerabilities and New Initiatives for the Protection of Their Rights*.

¹³ Lihat *Kompas*, Selasa 2 Mei 2006, halaman 15: “Benahi Total TKI”.

sampai kepada pembicaraan yang lebih teknis dan programatis, antara lain tentang jaminan sosial bagi BMP, berbagai persoalan yang bersifat mendasar (struktural) terhadap buruh migran tampaknya harus diselesaikan terlebih dahulu.¹⁴

4.4. Buruh Migran dan Ketidakadilan Global

Isu buruh migran sebagaimana telah dikemukakan dalam pengantar laporan ini, merupakan sebuah isu lokal sekaligus nasional dan transnasional, bahkan global. Buruh migran menjadi isu yang bersifat transnasional dan global karena migrasi buruh migran tidak lagi hanya dilakukan didalam batas-batas wilayah sebuah negara melainkan telah menembus batas-batas wilayah atau teritori sebuah negara. Migrasi buruh migran adalah migrasi yang bersifat internasional yang karena itu melibatkan yudikusi antar negara, dan arena itu bersifat trans-nasional dan global. Migrasi atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya – terutama untuk mencari penghidupan yang lebih baik sama tuanya dengan umur manusia. Migrasi merupakan bagian dari dan yang ikut membentuk sejarah umat manusia dan sejarah dunia. Mobilitas penduduk karena itu sudah ada sebelum lahirnya sistim negara (*nation-states*) – yang justru menimbulkan persoalan bagi migrasi karena bersamaan dengan lahirnya negara muncul batas-batas wilayah negara (*state's boundaries*) yang merupakan penghalang bagi mobilitas penduduk yang sebelumnya bebas. Dalam kaitan ini menarik sekali apa yang dikeluhkan oleh David Ludden tentang terminologi '*cross-border*' yang seolah-olah menunjukkan bahwa '*border*' itu sudah lebih dahulu ada sebelum migrasi (*crossing the border*). Padahal yang benar

¹⁴ Lihat kendala-kendala yang dihadapi Indonesia dalam meratifikasi UN Convention on Migrant Workers and Their Families (Iredale and Paper, 2003).

adalah bahwa migrasi telah berlangsung berabad-abad sebelum apa yang dinamakan ‘border’ itu lahir.¹⁵

Persoalan migrasi internasional banyak terkait dengan hadirnya ‘nation-state’ dan ‘state’s border’ serta persoalan-persoalan keimigrasian yang mengikutinya. Migrasi internasional yang sedang kita bicarakan ini bersifat spesifik yaitu migrasi dari negara miskin ke negara kaya – secara lebih spesifik lagi dadalah arus migrasi dari Indonesia ke Singapura, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Jepang, Korea Utara, negara-negara Arab (Timur Tengah) dan sedikit ke negara-negara Eropa Barat, Amerika dan Kanada, dan Australia. Ke negara-negara yang lebih kaya dari Indonesia inilah buruh-migran kita mengalir untuk bekerja – terutama di sektor perkerjaan yang tidak memerlukan keahlian (sebagai pembantu rumah tangga untuk perempuan dan buruh perkebunan untuk laki-laki) atau pekerjaan yang membutuhkan keahlian rendah (misalnya buruh bangunan, perawat, sopir dan awak kapal). Sedikit sekali pekerja Indonesia yang pergi keluar negeri untuk dipekerjakan sebagai tenaga ahli atau yang disini disebut sebagai ‘expatriate’ yang biasanya berkulit putih.

Seperti telah dikemukakan, perpindahan penduduk dalam arti yang luas merupakan bagian dari dan yang ikut membentuk sejarah dunia. Mengalirnya orang-orang Eropa ke benua Amerika, Kanada dan Australia – yang kemudian melahirkan negara-negara imigran itu (Kanada, Amerika Serikat, Australia, New Zealand) – adalah hasil dari mobilitas penduduk ke wilayah-wilayah yang oleh orang Eropa dianggap ‘tidak berpenghuni’. Anggapan semacam ini sangat tidak benar karena wilayah-wilayah yang sekarang menjadi Australia telah sejak lama dihuni orang-orang Aborijin, sementara Amerika Serikat, Amerika Selatan dan Kanada telah sebelumnya dihuni oleh orang-orang Indian, begitu juga New Zealand adalah tanah-tanah yang telah dimiliki oleh orang Maori. Anggapan bahwa benua-benua itu kosong

¹⁵ Lihat David Ludden, 2003, ‘Presidential Address: Maps in the Mind and the Mobility of Asia’, *The Journal of Asian Studies* 62, No. 4 (November), pp. 1057-1078.

adalah sebuah legitimasi politik yang tidak berdasar dan semakin kuat bukti-bukti sejarah telah terjadinya pembantaian oleh orang-orang kulit putih itu terhadap penduduk asli yang tidak mampu menghadapi *genosida* yang dilakukan oleh orang-orang Eropa.

Jika migrasi orang-orang Eropa ke benua Amerika, Australia dan New Zealand kemudian melahirkan negara-negara imigran yang sebagian besar penduduknya berkulit putih (meskipun saat ini mulai tergeser jumlahnya oleh imigran baru yang tidak berkulit putih) migrasi mereka ke benua Afrika dan Asia serta Amerika Selatan melahirkan negara-negara jajahan. Baru setelah berakhirnya Perang Dunia ke II proses dekolonisasi terjadi – sebagian karena perlawanan dari penduduk yang dijajah – yang kemudian melahirkan negara-negara merdeka pasca-kolonial. Negara-negara pasca-kolonial di Afrika dan Asia inilah yang pada tahun 1955 mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang melahirkan Gerakan Non-Blok (*Non Aligned Movement*) yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Sukarno - Indonesia, Nehru - India, Nkrumah - Ghana, Chou En-Lai - Cina dan Nasser - Mesir. Negara-negara Non-Blok inilah yang saat ini sebagian besar masih merupakan negara-negara miskin dan dikenal sebagai Dunia Ketiga, Negara Selatan atau Negara Berkembang (*developing countries*) bahkan negara terbelakang (*underdeveloped countries*).

Dalam 50 tahun terakhir ini posisi negara-negara berkembang di Asia dianggap lebih baik ketimbang mayoritas negara-negara di benua Afrika – yang dianggap sebagai *'the lost continent'* karena tingkat kemelaratannya yang hampir-hampir tidak tertolong disamping banyaknya konflik komunal yang menyengsarakan rakyatnya.¹⁶ Hampir seluruh Afrika, seperti juga Asia dan Amerika

¹⁶ Untuk menolong negara-negara Afrika belum lama ini pemimpin negara-negara industri-kaya dari utara (g-8) berkumpul di Gleneagle di Skotlandia dan memutuskan untuk menghapus hutang dari negara-negara melarat di Afrika ini. Juga usaha-usaha caritas dari para selebritis dunia seperti Bob Geldof dan Bono-U2 yang melakukan konser amal untuk menggalang dana dan menyadarkan dunia tentang masalah berat yang dihadapi rakyat

Latin adalah wilayah-wilayah yang telah dikeruk kekayaan alamnya oleh penjajah-penjajah mereka dari benua Eropa. Kemiskinan yang dialami oleh negara-negara pasca-kolonial di Afrika, Asia dan Amerika Latin meskipun tidak bisa disangkal telah diakibatkan oleh berbagai salah urus dan pertikaian terus-menerus antar elit politiknya, juga merupakan warisan dari kolonialisme. Orang-orang Afrika juga telah dijadikan budak yang dipekerjakan di perkebunan-perkebunan yang baru dibuka oleh imigran-imigran Eropa di Amerika Utara – yang keturunannya saat ini disebut sebagai Afro-American. Dalam konteks ini kolonialisme dan perdagangan budak adalah sisi-sisi gelap dari apa yang kita kenal sekarang sebagai globalisasi.¹⁷

Migrasi dan kolonialisme menjadi bagian penting dalam proses globalisasi yang melahirkan negara-negara imigran yang kaya, disatu pihak, dan dipihak lain, menghasilkan negara-negara pasca-kolonial yang sebagian besar miskin bahkan semakin terbelakang dan tidak sedikit yang kemudian menjadi ‘gagal-negara’ (*failed state*). Saat ini semua negara telah menjadi negara yang berdaulat. Negara jajahan terakhir yang merdeka adalah Timor Leste yang sebelumnya dijajah oleh Indonesia. Sebagai negara merdeka mereka tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan lembaga pemerintahan antar-bangsa tertinggi dimana berbagai konvensi dan perjanjian dirumuskan dan diputuskan untuk dipatuhi oleh negara-

Afrika. Yang menarik bersamaan dengan diselenggarakannya pertemuan G-8, termasuk George Bush, pada tanggal 7 Juli 3 buah bom bunuh diri dari militan Muslim meledak di pusat kota London. Terorisme telah menjadi sisi gelap dari globalisasi yang justru memperlebar jurang antara kelompok-kelompok manusia yang berbeda latar belakang ideologi dan kebudayaannya. Teror dan kekerasan yang terjadi diberbagai tempat saat ini tampaknya menjadi pilihan terhadap solusi ketidakadilan global (*global injustices*).

¹⁷ Andre Gunder Frank mungkin salah seorang yang secara sangat kritis menulis tentang globalisasi dengan menempatkannya dalam pespektif sejarah jangka panjang. Tentang ini lihat Andre Gunder Frank, 1989, *ReOrient: Global Economy in the Asian Age*. Berkeley: University of California Press.

negara yang meratifikasinya. Ada paling dua konvensi yang berkaitan dengan migrasi. Yang pertama adalah konvensi tentang pengungsi (yang dijaga pelaksanaannya oleh UNHCR) dan kedua adalah konvensi tentang buruh migran (yang diawasi oleh ILO). Meskipun semua negara menjadi anggota PBB tidak ada jaminan bahwa negara-negara itu akan mematuhi peraturan atau resolusi yang dibuat oleh PBB. Dalam kenyataan dunia sangat ditentukan oleh segelintir kecil negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB (*UN Security Council*) yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Rusia. Namun penyerangan Amerika Serikat terhadap Irak yang tidak didukung oleh *Security Council* memperlihatkan bahwa PBB ternyata tidak bisa membatasi tindakan sepihak yang dilakukan oleh negara adi-kuasa seperti Amerika Serikat terhadap kedaulatan negara lain seperti Irak.

Mobilitas penduduk antar negara setelah Perang Dunia ke II secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang-orang yang pindah ke negara lain karena alasan politik – sebagian merupakan pengungsi dan pencari suaka (*asylum seekers*). Yang kedua adalah orang-orang yang melakukan migrasi karena alasan-alasan ekonomi – yang miskin disebut buruh migran (*migrant workers*) yang kaya dan berkeahlian disebut sebagai ekspatriat. Fenomena pengungsi dan buruh migran tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonialisme yang menghasilkan negeri-negeri pasca-kolonial yang telah dimiskinkan dan menderita penyakit sosial-politik yang ditandai oleh berkembangnya regim-regim politik undemocratic dan otoriter; disamping tidak terkendalinya perang saudara (*civil wars*) konflik komunal (etnik maupun agama). Proses '*nation building*' dari negara pasca kolonial terbukti tidak mudah dan kegagalan dalam proses '*nation building*' inilah yang melahirkan banyak pengungsi dan '*asylum seekers*' yang dewasa ini sangat menghantui negara-negara kaya; atau menjadi persoalan domestic akibat banyaknya

'*internally displaced persons*' jika pengungsi itu masih berada dalam batas-batas negara yang bersangkutan.¹⁸

Jika pengungsi '*asylum seekers*' dan '*internally displaced persons*' merupakan dampak dari '*forced migration*', buruh migran dianggap dari migrasi yang bersifat '*voluntary*', sukarela dan bukan merupakan sebuah '*forced migration*'. Penjelasan semacam ini sebetulnya agak menyederhanakan persoalan. Benarkah buruh migran bukan sebuah hasil dari '*forced migration*' bukan merupakan sebuah 'migrasi yang terpaksa'? Ada sebuah wilayah abu-abu (*grey areas*) dalam studi-studi migrasi (*migration studies*) yang sudah saatnya kita periksa dengan teliti. Dalam konteks migrasi internasional dan globalisasi tenaga kerja (*globalised labour movement*) mengalirnya buruh migran selalu berasal dari negara miskin ke negara kaya. Kenyataan ini tidak bisa tidak menunjukkan adanya ketimpangan dalam tingkat kemakmuran (diukur dengan tingkat pendapatan perkapita) dari negara penerima (*receiving countries*) dengan negara pengirim (*sending countries*).¹⁹ Migrasi buruh dari negara miskin ke negara kaya menegaskan semakin menguatnya ketidakadilan global (*global injustices*) – ketidakadilan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan lembaga-lembaga internasional mengendalikan

¹⁸ Menurut Stephen Castles jumlah '*internally displaced persons*' ini mengalami peningkatan yang drastic sejak berakhirnya Perang Dingin. Jumlah mereka mencapai 20 juta jiwa sementara jumlah pengungsi hanya sekitar 9 juta. Lihat Stephen Castles, 2004, '*Global Perspectives on Forced Migration*'. makalah seminar Forced Migration in Southeast Asia, Jakarta 25-26 November 2004. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa negara-negara pasca kolonial tidak saja semakin miskin tetapi semakin tidak mampu memelihara rasa aman dari penduduknya. Indonesia sekitar tahun 2000 termasuk penyumbang jumlah '*internally displaced persons*' yang cukup besar dengan jumlah yang mencapai 1,2 juta orang – akibat konflik komunal maupun konflik politik yang terjadi di Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua.

¹⁹ Tentang hal ini lihat makalah Gavin Jones, 2005, '*Asean Migration: Development and Demographic Influences*', disampaikan pada UNHCR Roundtable on Migration and Refugee Issues, Kuala Lumpur, 13-14 June.

berlangsungnya prinsip hanya yang kuat yang mampu bertahan dan meningkatnya ketidakamanan global.²⁰

Melihat gejala membludaknya buruh migran dalam perspektif ketidakadilan global memaksa kita untuk masuk kedalam proses-proses yang terjadi di seputar globalisasi. Berbagai studi memperlihatkan bahwa dibalik jargon globalisasi sebetulnya bekerja prinsip-prinsip kapitalisme yang tujuan akhirnya adalah akumulasi kapital. Kapitalisme yang berada di balik globalisasi bekerja melalui mekanisme-mekanisme yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational corporation*) dan didukung oleh negara-negara industri kaya²¹ Disinilah jargon ‘pasar bebas’ mencuat kepermukaan yang berlindung dalam berbagai lembaga perdagangan dan keuangan internasional seperti WTO, IMF dan Bank Dunia. Gerakan anti globalisasi – yang juga merupakan refleksi dari globalisasi itu sendiri – pada hakekatnya adalah gerakan anti kapitalisme dan pasar bebas yang bersifat eksploitatif terhadap negara-negara miskin yang lemah. Inilah ironi dari globalisasi yang mengandaikan setiap orang memiliki akses yang sama terhadap pasar dimana lalu-lintas uang, barang dan jasa antar negara mengalami liberalisasi dan harus sekecil mungkin hambatannya namun pada saat yang sama lalu-lintas tenaga kerja harus mengalami hambatan yang sangat tinggi. Perdagangan diliberalisasi (*trade liberalization*) dengan dibuatnya ‘*Free Trade Zones*’ namun lalu lintas pekerja dirintangi – tidak ada ‘*labor liberalisation*’, tidak ada ‘*Free Labor Zones*’.

Pada titik inilah kita masuk kedalam problematika sistim negara yang masih berpegang pada model negara Westphalian yang

²⁰ Sebagai respon upaya mencari solusi dari meningkatnya ketimpangan global ini UNDP dalam laporan tahunannya tentang pembangunan manusia yang terakhir (2005) berusaha mengupas masalah ini. Lihat Human Development Report 2005 yang mengambil tema *International cooperation at a crossroads: Aid, trade and security in an unequal world*.

²¹ Tentang seputar isu ini antara lain bisa dibaca dari tulisan dua tokoh kritis terhadap globalisasi Asia Tenggara: Marthin Khor dari Malaysia dan Walden Belo dari Filipina.

dikembangkan di Eropa yang didasarkan pada prinsip kedaulatan negara (*sovereign state*). Apa yang dikhotbahkan oleh Kenichi Ohmae tentang luntarnya negara-bangsa (*nation-states*) ditengah gempuran globalisasi (baca kapitalisme) hanya benar untuk dunia perdagangan dan bisnis tetapi tidak untuk buruh migran maupun pengungsi dari negara-negara miskin.²² Kontradiksi-kontradiksi yang terus berlangsung antara prinsip-prinsip globalisasi (baca kapitalisme) dan prinsip-prinsip negara bangsa (*nation-states*) hanya akan memperluas ketidakadilan global yang terutama harus ditanggung oleh buruh migran dan penduduk miskin di negeri miskin seperti Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa globalisasi juga telah dinikmati oleh sebagian (kecil) warga negara Indonesia yang beruntung menjadi bagian dari kapitalisme global. Tekanan globalisasi mendorong sebagian warga negara Indonesia untuk menjadi bagiannya melalui berbagai lembaga bisnis dan perdagangan, tetapi juga melalui korupsi dan sistim politik domestic yang tidak memihak kepada penduduk miskin yang lemah.

Indonesia adalah negara bangsa yang memiliki sistim politik yang belum mampu memberikan keadilan pada sebagian besar penduduknya yang miskin. Meskipun secara jelas dicantumkan dalam konstitusi negara bahwa negara berkewajiban menjamin kesejahteraan warganegaranya, dan warganegara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak, namun dalam kenyataan sampai hari ini kita melihat bahwa cita-cita konstitusi itu semakin sayup-sayup dan menjauh dari kenyataan. Fenomena membengkaknya buruh migran di negeri ini adalah refleksi atau cermin dari ketidakberpihakan negara terhadap mayoritas penduduk yang miskin. Reformasi politik yang berlangsung sejak lengsernya Suharto meskipun secara formal telah menghasilkan amandemen terhadap konstitusi dan melahirkan berbagai perubahan perundangan dan peraturan yang tampaknya mencerminkan terjadinya proses demokratisasi, dalam praktek terbukti masih jauh dari harapan.

²² Lihat Kenichi Ohmae, 1995, 'The End of the nation State', The 1995 Panglaykim Memorial Lecture, CSIS, Jakarta.

Melihat gelagat dan perkembangan politik yang ada, pengamatan Olle Tornquist tentang demokrasi kaum penjahat (*bad guy democracy*) janganjangan benar terjadi di Indonesia.²³

Jika demokrasi telah dibajak oleh kaum penjahat tidak ada cara yang lain selain melakukan perlawanan terhadap pembajakan itu. Inilah yang mungkin perlu dirumuskan oleh kalangan yang masih serius membela penduduk miskin di Indonesia – termasuk didalamnya buruh migran. Jika ada yang telah berubah dalam *'playing field'* tidak lain adalah momentum globalisasi itu sendiri yang tidak saja melahirkan kekuatan kapitalisme global yang hanya mementingkan tercapainya akumulasi kapital, namun globalisasi juga membuka kemungkinan terbentuknya jaringan aliansi-aliansi global dari aktor-aktor non-negara (*non-state actors*) yang berasal dari negara maupun miskin. Agenda demokrasi dari para aktor demokrasi di Indonesia oleh karena itu harus didasarkan oleh pemahaman akan eratny persoalan ketidakadilan lokal (*domestic injustices*) yang diakibatkan oleh dibajaknya reformasi oleh para penjahat, dengan ketidakadilan global (*global injustices*) yang melanda ke seluruh pelosok dunia. Fenomena buruh migran Indonesia adalah tantangan yang paling sempurna dari kombinasi kedua ketidakadilan ini.

4.5. Pembangunan, LSM dan Jaringan Gerakan Kritis

Sebagaimana telah didiskusikan dalam laporan penelitian tentang gerakan sosial sebelumnya (Tirtosudarmo, 2007), berbeda dengan gerakan-gerakan sosial yang berkembang pada era sebelumnya – yang dalam beberapa hal memiliki kaitan dengan gerakan yang bersifat ideologis dan atau keagamaan – gerakan sosial yang muncul setelah era tahun 1970an lebih bersifat sekular-developmentalistic dan tidak memiliki basis massa yang luas.²⁴

²³ Lihat Olle Tornquist, 2001, 'The Indonesia Lesson', dalam R. William Liddle (ed.) *Crafting Indonesian Democracy*. pp. 61-66. Bandung: Penerbit Mizan.

²⁴ Menurut Yesmil Anwar (2006) cikal-bakal LSM di Indonesia telah ada sejak pra kemerdekaan. Lahir dalam bentuk lembaga keagamaan yang

Gerakan sosial yang mulai muncul sejak era tahun 1970-an merupakan gerakan-gerakan yang bersifat sangat terbatas – sebagai reaksi dari represi politik yang mulai menanamkan kuku kekuasaannya yang bersifat sentralistis-hegemonis ditangan rejim birokratik-militer Orde-Baru Soeharto. Gerakan sosial yang bersifat terbatas dan umumnya dimotori oleh para aktifis-intelektual di daerah perkotaan ini secara institusional kemudian dikenal sebagai “organisasi non pemerintah” atau disingkat ornop yang merupakan translasi dari Non Government Organisation atau disingkat NGO. Istilah NGO adalah istilah yang diimport dari barat – sejalan dengan munculnya gerakan-gerakan non-pemerintah sejenis di negara barat yang menganut demokrasi liberal, seperti di Eropa Barat dan Amerika Utara. NGO yang mulai muncul di era tahun 1970-an di Indonesia

sifatnya sosial/amal (dapat dikategorikan generasi pertama). Tahun 50-an muncul LSM yang kegiatannya bersifat alternatif terhadap program pemerintah, dua pelopornya misal LSD (Lembaga Sosial Desa) dan Perkumpulan Keluarga Kesejahteraan Sosial. Tahun 60-an lahir beberapa lembaga yang bergerak terutama dalam pengembangan pedesaan. Pendekatan dengan projek-projek mikro menjadi ciri utama masa ini, terutama yang menyangkut aspek sosial ekonomi pedesaan. Pada kurun waktu ini pula lembaga2 ini merintis jaringan kerjasama nasional misal lahir Yayasan Sosial Tani Membangun yang kemudian berkembang menjadi Bina Desa, Bina Swadaya. Ciri LSM yang muncul dan berkembang pada tahun 1970-an merupakan fenomena yang unik. Ini dipengaruhi oleh Orde Baru. LSM merupakan reaksi sebagian anggota masyarakat atas kebijakan pembangunan yang ditempuh saat itu. Dasar penggeraknya adalah motivasi untuk mempromosikan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Meski juga berorientasi pada projek mikro, mereka juga mengaitkan persoalan kebijaksanaan pada tingkat makro. Contohnya LSM yang lahir pada generasi ini adalah Lembaga Bantuan Hukum, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penertangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Sejak masa itu sampai kini, perkembangan LSM di Indonesia sangat pesat. Visi, misi, pendekatan dan isu beragam. Perkembangan LSM tidak bisa lagi dilihat secara linier dan mengikuti urutan waktu generasi.

tidak bisa dilepaskan dari pengaruh NGO yang muncul di dunia barat – bahkan bisa dikatakan bahwa kemunculan NGO di Indonesia – dan juga di negara-negara berkembang di belahan dunia yang lain – merupakan kepanjangan tangan dari NGOs yang berkembang di dunia barat yang kemudian melebarkan sayap dan kegiatannya di negara-negara berkembang.²⁵ Persoalan ketergantungan dana dari *funding agencies* memang sebuah problem structural yang masih harus dihadapi oleh LSM di Indonesia. Menurut Sangkoyo (2004: 5): “dari sisi kepentingan rakyat di negeri-negeri Selatan, siasat menggandeng perhimpunan-perhimpunan non-pemerintah tersebut harus dibaca dalam konteks bangunan kemasyarakatan masing-masing negeri. Di Indonesia, organisasi non-pemerintah sampai saat ini masih didominasi oleh lapisan tipis kelas menengah yang sebagian besar berpangkalan di perkotaan, dengan jarak sosial yang cukup besar dengan rakyat kebanyakan. Peran sosial-politik yang baru beserta cara pembiayaan bagi perhimpunan-perhimpunan tersebut, walaupun telah ikut memperkenalkan perubahan-perubahan penting

²⁵ Kemunculan NGO di Indonesia tidak mungkin jika tidak difasilitasi (baca didanai atau disponsori) oleh NGO yang berasal dari negeri maju di barat yang tidak sedikit memiliki kaitan dengan kelompok-kelompok agama tertentu (terutama Protestan dan Katolik). Paralelisme antara gerakan NGO di Indonesia dan di barat terlihat dengan jelas dengan dibentuknya INGI (Inter-NGO Conference on IGGI Matters) pada tahun 1985 yang merupakan koalisi antara NGO nasional maupun internasional yang agenda utamanya adalah melakukan kritik – sebagai watchdog - terhadap pembangunan di Indonesia yang dananya merupakan hutang dari negara-negara barat yang koordinasinya dilakukan oleh IGGI (The Inter-Governmental Group on Indonesia) Pada tahun 1990 IGGI yang selalu dipimpin oleh Belanda dibubarkan karena Presiden Soeharto tidak senang dengan kebijakan Jan Pronk – Perdana Menteri Belanda dan sekaligus Ketua IGGI – dan diganti dengan lembaga baru yang bernama CGI (Consultative Groups on Indonesia). Tidak lama kemudian INGI juga menyusul dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk INFID (International NGOs Forum on Indonesian Development) sampai sekarang.

dalam pengurusan negara, belum terbukti menguatkan kemampuan rakyat untuk bersuara dan bertindak kolektif". Longgena Ginting (2004: 189), seorang pimpinan WALHI, berpendapat bahwa "... sudah lebih dari tiga decade sejarah Ornop Indonesia, belum banyak inovasi pendanaan untuk mengurangi kerentanannya terhadap ketergantungan tersebut sekaligus mengurangi kerentanannya terhadap ketersediaan dan keberlanjutan dana. Kalaupun ada, inovasi tersebut masih terbatas berupa pendirian unit-unit usaha (penjualan buku, penyediaan jasa, dll) atau masih secara konvensional menggalang dana dari pihak lain seperti perusahaan-perusahaan (corporate fund raising). Untuk cara yang pertama, usaha tersebut kenyataannya tidak akan pernah mencukupi kebutuhan Ornop secara penuh, dan untuk cara yang kedua, tetap tidak akan menjawab masalah ketergantungan dengan pihak luar, karena hanya memindahkan ketergantungannya kepada pihak lain".

Perkembangan LSM di Lombok tidak dapat dilepaskan dari perkembangan LSM di Indonesia yang berpusat di Jakarta dan yang pertumbuhannya terkait dengan pertumbuhan NGOs di tingkat internasional. Oleh karena itu, adalah sebuah fenomena sosial politik yang sangat menarik, terutama setelah tahun 1970an, betapa eratnya gerakan sosial kaum muda kritis di perkotaan, terutama yang berbentuk LSM, dengan gerakan sosial dan *civil society* yang bersifat transnasional dan global. LSM lokal, yang beroperasi di daerah, terutama di kota-kota propinsi dan kabupaten, bisa dilihat sebagai sebuah entitas sosial yang kelahiran, pertumbuhan dan perkembangannya tidak mungkin dilepaskan dari jaringan sosial (*social networks*) yang bersifat nasional dan global. Eksistensi sebuah LSM lokal karena itu seringkali sangat tergantung dari ada atau tidaknya fasilitasi dan dukungan dari jaringan LSM yang bersifat nasional dan global. Ketergantungan sebuah LSM lokal pada jaringan sosial dari LSM yang bersifat nasional dan global tidak saja dalam bentuk dana untuk melakukan kegiatan namun juga pilihan isu yang akan diadvokasikannya. Sejalan dengan itu, peningkatan kapasitas LSM lokal, baik dari segi pengorganisasian maupun pemahaman

kritis terhadap bidang atau isu sosial yang menjadi garapannya juga ikut ditentukan oleh sejauh mana *transfer of knowledge* baik berupa pelatihan atau pendidikan pada umumnya, diterima dari LSM nasional atau internasional yang menjadi patronnya.²⁶

Seperti telah dikemukakan, perkembangan LSM di Indonesia terjadi bersamaan dengan naiknya rejim Orde Baru yang menekankan pentingnya pembangunan ekonomi terutama melalui upaya mengontrol laju pertumbuhan penduduk dan mengurangi kemiskinan. Awal tahun 1970-an dan 1980-an pembangunan diarahkan ke daerah pedesaan dimana mayoritas penduduk berada dan masih meluasnya berbagai masalah pembangunan, seperti rendahnya produktifitas pertanian, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Oleh karena tidaklah mengherankan jika generasi pertama LSM di Indonesia banyak melakukan kegiatan yang juga bersifat developmentalistik dengan fokus di pedesaan dan daerah miskin pada umumnya. Melihat tingginya tingkat kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat di Pulau Lombok tidaklah terlalu mengherankan jika masyarakat Lombok menjadi sasaran dari berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang bermaksud meningkatkan

²⁶ “Patron-client relationships” antara LSM lokal dan LSM besar di Jakarta – yang sering disebut juga sebagai “Bingo”, merupakan gejala yang wajar terjadi karena memang didukung oleh struktur kelembagaan yang dikembangkan oleh para aktifis LSM itu sendiri. “Bingo” yang umumnya memiliki kantor di Jakarta, secara resmi disebut sebagai LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat). Sejak tahun 1970an beberapa nama “Bingo” bisa disebutkan disini: LP3ES (Lembaga Pendidikan Penerangan Penelitian Ekonomi Sosial), LSP (Lembaga Studi Pembangunan), Bina Desa, Bina Swadaya, WALHI (Wahana Lingkungan hidup), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), YAPPIKA, P3M (Perhimpunan Pendidikan Pesantren dan Masyarakat), INFID (sebelumnya bernama INGI), ELSAM, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Kalyanamitra. Belum lama ini Benny Subianto (2008) menulis makalah yang menyinggung isu “patron-klien” di kalangan LSM pasca-Suharto, yang diberi judul “The Prince as the Merchant: The Rise of the NGO Industry in the Post-Suharto Era”.

kesejahteraan masyarakat. Orde Baru dengan ideologi pembangunan dan berbagai kebijakan memerangi kemiskinan, selalu menempatkan Lombok sebagai tempat untuk untuk mengimplementasikan program-program pembangunan, terutama yang berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.²⁷

Sejak awal tahun 1980, dibandingkan dengan isu perburuhan yang ada di dalam negeri sendiri, isu buruh migran yang bekerja di luar negeri atau TKI tampaknya sedikit lebih banyak mendapat perhatian publik terutama sejauh dapat dibaca dari laporan pers dan media massa audio-visual. Mungkin, sifat apolitik dari persoalan TKI memunculkan persepsi di kalangan penguasa bahwa persoalan TKI bukan merupakan sesuatu yang dapat mengganggu kestabilan politik nasional yang sangat dijaga ketat oleh Orde Baru. Hanya pada 1985 waktu Sudomo menjadi Menaker TKI dilarang berbicara dengan pers tentang pengalaman dan penderitaan mereka selaku TKI di Timur Tengah. Dalam perkembangan selanjutnya, melalui pemberitaan pers dan media massa kemudian isu-isu TKI berhasil mendapatkan

²⁷ Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di Desa Segenter, Kabupaten Lombok Barat, pada tahun 1984 dan 1985, masyarakat Sasak, yang merupakan mayoritas penduduk Pulau Lombok dikenal “terbelakang”. Hasil penelitian penulis bisa dibaca di Tirtosudarmo (1991) “Dampak Sosial Pembangunan Kesehatan”. Sebagai contoh, di Segenter, salah satu dusun dimana “penduduk Asli yang menganut Islam Wektu Telu” tinggal, tidak mengenal lilin, dan penerangan masih menggunakan minyak jarak. Dalam kunjungan ke Segenter bulan Juni 2008 yang lalu, dusun ini telah diubah menjadi semacam cagar budaya, karena dianggap merupakan contoh masyarakat yang masih asli, untuk menarik para turis asing. Bentuk desa dengan rumah-rumahnya yang beratap ilalang masih dipertahankan, sudah ada listrik dan air bersih, dan telah berdiri sekolah dasar dan mesjid. Pada saat melakukan penelitian tahun 1984 -1985 penulis sempat berkenalan dengan Peter dan Ertien, warganegara Belanda, yang saat itu memimpin program-program bantuan dari HIVOS. Salah seorang staf junior adalah Tatiek Krisnawaty, yang pada era tahun 2000an dikenal sebagai aktifis perempuan dan salah seorang pimpinan Solidaritas Perempuan.

perhatian yang lebih besar dari publik terutama yang menyangkut berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang mereka alami ketika bekerja di luar negeri. Pemberitaan pers yang cukup gencar tentang nasib yang dialami TKI, terutama dari mereka yang bekerja di Timur Tengah dan Malaysia, berhasil mengangkat masalah TKI menjadi isu nasional. Tentang TKI yang bekerja di Timur Tengah, isu yang banyak dilaporkan pers adalah tentang pelanggaran HAM, sementara tentang TKI di Malaysia, selain soal pelanggaran HAM, berbagai musibah dan kecelakaan yang dialami oleh para TKI dalam menyeberang ke Malaysia maupun pengalaman mereka dideportasi oleh pihak imigrasi Malaysia cukup banyak dilaporkan oleh pers. Peran LSM dalam merebut ruang publik dan arena politik yang lebih besar, terutama dalam advokasi buruh migran perempuan yang mengalami berbagai pelanggaran HAM, sangatlah besar.

Artikulasi kepentingan TKI melalui LSM bisa dipahami karena atmosfer politik di masa Orde Baru sangat dipenuhi oleh berbagai kekangan yang tidak memungkinkan adanya saluran politik resmi yang bisa menampung aspirasi para TKI. Pada awalnya peran LSM lebih dititik beratkan pada pelayanan hukum bagi para TKI yang hendak menuntut diberikannya kompensasi bagi perlakuan tidak adil yang mereka alami dari para agen tenaga kerja (PJTKI) yang mengurus kepergian dan kontrak kerja mereka. Pelayanan dan uluran tangan para aktivis LSM berhasil mengambil hati para TKI dan keluarganya yang selanjutnya berkembang sebagai bentuk *mutual trust* di antara keduanya. Dalam perkembangan selanjutnya, LSM mengupayakan adanya semacam forum bagi para TKI untuk membangun komunitas-komunitas jaringan yang tidak saja menyediakan bantuan hukum namun juga berbagai bentuk pelatihan dalam hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya sosial maupun ekonomi. Melalui forum kekeluargaan yang dibangun bersama inilah selanjutnya berkembang berbagai inisiatif untuk mengorganisir diri dan memperkuat jaringan di antara TKI dan keluarganya serta para aktivis LSM.

Sejumlah organisasi buruh migran kemudian berhasil dibentuk di beberapa kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara, yang merupakan daerah-daerah kantong pengirim TKI ke Timur Tengah dan Malaysia. Berbagai bentuk program pelatihan disediakan oleh pihak LSM, tidak saja tentang hal-hal yang menjadi kebutuhan sehari-hari para TKI dan keluarganya, tetapi juga berbagai bentuk pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sosial maupun politik buruh migran, khususnya dalam hubungan TKI dengan pemerintah, PJTKI maupun calon majikan mereka di luar negeri. Proses pelatihan dan penyadaran yang berlangsung secara teratur dalam waktu yang relatif cukup lama memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pemberdayaan buruh migran, yang antara lain tercermin dalam kemampuan mengartikulasikan aspirasi politik buruh migran dalam berbagai bentuk “demo” dan protes kepada pihak pemerintah, khususnya Depnaker. Para aktivis TKI ini juga mulai menyadari akan pentingnya peran pers dan media massa yang akan memberitakan aksi “demo” maupun protes yang mereka lakukan. Dengan adanya pemberitaan pers dan media massa, permasalahan yang mereka tuntut biasanya memperoleh perhatian dari pemerintah.

Di Lombok, kemiskinan selain melahirkan buruh migran rupanya juga mendorong berkembangnya LSM.²⁸ Perkembangan LSM di Lombok tidak dapat dilepaskan dari formasi sosial yang terutama terjadi di daerah perkotaannya, terutama di Mataram. Dalam formasi sosial yang berlangsung sejak awal tahun 1970-an ini tidak dapat dipungkiri munculnya “kelas menengah baru” sebagai hasil transformasi pendidikan yang terjadi pada masa Baru. Dalam laporannya tentang “kelas menengah” di Lombok, Soewarsono

²⁸ Ulasan tentang sejarah perkembangan LSM dan gerakan sosial di Indonesia, selengkapnya bisa dilihat di Tirtosudarmo (2007) “Gerakan Masyarakat Sipil dan Transisi Demokrasi di Aceh”, bab 3 dalam buku *Pemetaan Gerakan Sosial: Masyarakat Sipil di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Guna menuntut Hak-hak Sosia, Budaya, Ekonomi dan Politik* (Henny Warsilah, editor).

(2006) melihat hubungan antara berkembangnya perguruan tinggi yang pesat dengan pertumbuhan LSM. Soewarsono (2006:84), misalnya, menulis: “Adalah tiga puluh tiga perguruan tinggi tersebut yang bukan hanya melahirkan kelompok akademisi tetapi juga berperan sebagai pengisi kebutuhan tenaga birokrasi di pemerintahan daerah, penyedia kebutuhan akan tenaga-tenaga terlatih dunia usaha dan tempat perekrutan kader-kader partai politik yang menjamur sejak 1998, serta dari mana lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan mendapatkan para aktivisnya”. Menurut Soewarsono: “...sejak tahun 1980-an, muncul berbagai LSM di Lombok. Beberapa merupakan, dalam istilah seorang responden, “papan atas”: LBH-APIK, Somasi (Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi, Koslata, PPK, YKCSI, Annisa, PSP, Konsepsi (LP3ES-NTB), dan Mitra Samya”.

Adalah sangat menarik eratnya pertumbuhan LSM di Lombok dengan kiprah LSM besar – atau biasanya disebut sebagai “Bingo”, yang berada di Jakarta. Salah seorang narasumber memperlihatkan hampir selalu berperannya LSM besar di Jakarta dalam pembentukan LSM di Lombok sejak tahun 1980-an. LSM besar di Jakarta seperti LP3ES, LSP, YLBH, PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) hampir semuanya seperti membentuk LSM cabang di Lombok. Gejala ini bisa dimengerti karena awal tahun 1980-an adalah periode dimana pemerintah Orde-Baru memang sedang gencar-gencarnya melakukan berbagai program pembangunan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, koperasi, nelayan dan keluarga berencana. Lombok sebagai daerah yang masyarakatnya miskin dan dari berbagai indikator sosial ekonomi selalu berada di papan bawah telah menjadi semacam laboratorium pembangunan sosial Orde Baru. LSM pada periode tahun 1980-an berkembang sebagai reaksi terhadap gencarnya pembangunan yang dilancarkan oleh pemerintah. LSM baik di Jakarta maupun di daerah berkembang selain sebagai “partner” pemerintah dalam pembangunan, juga menjadi semacam “*watch dog*” yang

berusaha untuk melakukan kontrol sosial terhadap program-program pemerintah.

4.6. Advokasi Buruh Migran di Lombok dan Gerakan Sosial Transnasional

Menurut salah seorang narasumber yang telah aktif di LSM sejak awal tahun 1980an, sejarah berkembangnya LSM di Lombok barangkali diawali karena adanya peristiwa gempa yang cukup mengakibatkan banyak korban pada tahun 1983 di daerah Tanjung yang terletak di pantai di Lombok Barat bagian utara. Untuk membantu para korban gempa yang mayoritas adalah keluarga nelayan, HIVOS (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking-Humanist Institute for Development Cooperation) sebuah LSM Belanda mulai melakukan kegiatan dan membuka kantor di Lombok. Dalam melakukan kegiatannya – terutama untuk membantu para korban gempa di Tanjung, HIVOS merekrut tenaga relawan – yang umumnya terdiri dari kaum muda dan mahasiswa - untuk menjalankan program-program HIVOS. Program bantuan HIVOS berupa bantuan modal bagi ibu-ibu nelayan untuk berjualan (bakulan) di pasar, sementara untuk kelompok laki-laki, HIVOS membantu membuat kapal nelayan. Pada intinya program-program yang dijalankan oleh HIVOS bersifat pemberdayaan terhadap masyarakat miskin melalui kegiatan ekonomi rakyat. Sebagai organisasi di dalam kantor HIVOS di Mataram dibentuk biro-biro, antara lain Biro Wanita dan Biro Pertanian. Program HIVOS di Mataram secara resmi berakhir pada tahun 1987. Untuk menampung dan melanjutkan berbagai program yang telah dirintis dan dijalankan oleh HIVOS para relawan dan staf HIVOS yang berasal dari Lombok mendirikan YLKMB (Yayasan Lembaga Kemanusiaan Masyarakat Pedesaan). Inilah barangkali LSM lokal pertama yang didirikan di Lombok. Menurut salah seorang narasumber, karena adanya ketidaksepakatan dalam penanganan kegiatan yayasan, pada bulan Maret 1988 sebagian staf yayasan keluar dari YLKMB, dan mendirikan

Yayasan Panca Karsa (YPK), dan pada bulan Desember berganti nama menjadi Perkumpulan Panca Karsa.

Sejak awal – ketika masih bernama YLKMB, fokus kegiatan yang dipilih selalu berkaitan dengan isu-isu ekonomi perempuan. Oleh karena itu, ketika persoalan-persoalan yang menyangkut buruh migran perempuan di Lombok mulai mencuat ke permukaan, para activist YPK – yang telah lama menangani masalah perempuan, secara otomatis tergerak untuk melakukan kegiatan membantu masalah-masalah yang dihadapi oleh buruh migran perempuan yang banyak berasal dari daerah miskin di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Menurut narasumber yang sekarang menjabat sebagai pimpinan YPK persoalan buruh migran di Lombok dan Sumbawa meningkat dengan pesat sejak tahun 1995. dalam perkembangannya, para aktivis YPK yang mayoritas adalah perempuan dalam melakukan berbagai kegiatan yang bersifat pemberdayaan terhadap perempuan, banyak melakukan interaksi dan kerjasama dengan berbagai “LSM Perempuan” dari Jakarta, antara lain dengan LBH APIK dan solidaritas Perempuan. Dana-dana untuk melakukan kegiatan sebagian besar merupakan dana-dana yang diperoleh karena bekerjasama dengan LSM yang berasal dari Jakarta yang telah lebih dahulu menjalin kerjasama dengan LSM internasional, antara lain ILO, DAAD, TDH, USAID, FES, DAP, New Zealand, TIFA dan lain-lain. YPK dapat dikatakan sebagai representasi dari LSM Perempuan yang pertama dan terbesar di Lombok.

Jalur perkembangan LSM di Lombok juga dipengaruhi melalui kiprah salah seorang tokoh LSM Jakarta yang sempat menjadi “direktur” HIVOS di Mataram pada masa peralihan sekitar tahun 1987. Tokoh ini adalah bekas aktivis mahasiswa dari Universitas Indonesia yang cukup terlibat aktif dalam gerakan-gerakan protes mahasiswa tahun 1973-1974, yang meletus dalam apa yang kemudian terkenal sebagai Peristiwa Malari 1974. Ketika menjabat sebagai “direktur” HIVOS tokoh ini melakukan banyak kegiatan “pembinaan” terhadap kaum muda dan mahasiswa yang banyak berpusat di Universitas Mataram. Seorang narasumber yang saat ini menjadi

dosen di Fakultas Hukum Universitas Mataram mengingat besarnya peranan tokoh ini dalam mempengaruhi meningkatkan sikap kritis dari para mahasiswa di Mataram. Dengan dukungannya, beberapa LSM mulai dibentuk untuk menampung meningkatnya kesadaran kritis dari kaum muda di Mataram. Pada bulan Desember misalnya dibentuk FKMM (Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram) yang bisa disebut sebagai embryo dan organisasi dari gerakan kritis kaum muda di Lombok. Salah seorang narasumber misalnya menyebutkan salah satu yang menjadi penggerak gerakan protes dari para mahasiswa adalah adanya kenaikan SPP di Universitas Mataram. Kenaikan SPP ini mendorong lahirnya aktivis-aktivis mahasiswa yang kritis dan melakukan berbagai demonstrasi menentang kenaikan SPP. Organisasi yang dibentuk setelah FKMM adalah LSBH (Lembaga Studi dan bantuan Hukum) yang menurut salah sorang yang tetrlibat dalam proses pendiriannya merupakan semacam “kapal dagang” bagi para aktivis mahasiswa dan pemuda saat itu.

Gerakan mahasiswa di Universitas Mataram juga menjadi representasi dari gerakan sosial kritis yang menentang upaya-upaya pembangunan yang dinilai merugikan masyarakat Lombok. Mulai awal tahun 1990-an kegiatan pariwisata di Lombok mulai mengalami pasang naik, sebagai imbas dari meningkatnya kegiatan pariwisata di Pulau Bali yang lebih dahulu telah berkembang dengan pesat. Potensi pariwisata di pantai-pantai Pulau Lombok yang masih perawan mulai dilirik oleh para investor besar yang umumnya telah memiliki usaha di Pulau Bali. Yang menarik adalah telah terlebih dahulu berkembangnya usaha-usaha pariwisata yang dilakukan oleh penduduk setempat – yang oleh seorang narasumber disebut sebagai “Pariwisata Kerakyatan”, umumnya di pesisir barat Pulau Lombok seperti Senggigi dan Gili Terawangan.

Pembangunan industri pariwisata di Lombok yang telah dimulai sejak masa Orde-Baru memang sejak awal telah menimbulkan berbagai konflik kepentingan, antara disatu pihak pengusaha dan pemerintah, dan dipihak lain masyarakat dan petani yang tanahnya dipergunakan untuk pariwisata. Selain bersifat lokal

dan nasional, industri pariwisata juga melibatkan kepentingan yang bersifat internasional dan global. Sebagaimana dikatakan oleh Fallon (2001) yang melakukan penelitian di Lombok 1999-2000: *“Tourism development on Lombok, the island east of Bali, has often involved disputes about land and the right to build tourism establishments”*. Berdasarkan data tentang konflik dalam pembangunan industri pariwisata di Lombok, Fallon, menemukan bahwa lokasi konflik antara lain terjadi di: Senggigi dan Sire, pantai barat-utara dari Kabupaten Lombok Barat; Kute, di pantai selatan Kabupaten Lombok Tengah; Gili Trawangan, pulau-pulau kecil yang terletak di pantai barat-utara Lombok, dan di Rowok, sebelah barat Kute. Salah satu hal yang menarik dalam laporan Fallon adalah keterlibatan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram yang cukup intensif dalam melakukan studi dan advokasi menyangkut aspek hukum, misalnya dari konflik yang terjadi dalam proses pembebasan tanah untuk industri pariwisata di Lombok. Dikatakan oleh Fallon, misalnya, bahwa: *“UNRAM Law Faculty & Alumni (1996) recommended the simultaneous implementation of several policies. These include an obligation to protect the living standard of the community; to consult with the community on development issues; to halt forced acquisition of land; and to ensure that a fair market price is paid if land is acquired for development purposes”*. Salah seorang narasumber, saat ini menjadi dosen di Fakultas Hukum UNRAM, membenarkan pengamatan Fallon, dan menceritakan pengalamannya terlibat dalam gerakan advokasi petani yang menjadi korban penggusuran pembangunan pariwisata di Lombok.

Mengalirnya wisatawan mancanegara ke Pulau Lombok yang banyak memberikan keuntungan bagi penduduk setempat yang membangun dan mengelola bungalow dan “home stay” rupanya menjadi awal dari terjadinya “konflik pariwisata” di Lombok. Konflik ini dipicu oleh tindakan aparat keamanan (polisi, bahkan militer, yang melakukan pembakaran dan penghancuran usaha “Pariwisata Kerakyatan” di pantai barat Lombok yang terkenal masih asli dan indah. Pada tahun 1993-1994, menurut penuturan seorang narasumber,

saat itu umpamanya terjadi konflik antara penduduk setempat dan aparat keamanan yang melakukan penghancuran 113 *bungalow* dan *home stay* yang oleh pemerintah daerah dianggap liar. Peristiwa inilah yang mendorong para mahasiswa dan pemuda di Mataram melakukan aksi-aksi pembelaan terhadap para penduduk yang umumnya adalah petani dan nelayan. Salah satu LSM yang sangat aktif melakukan gerakan pembelaan adalah KOSLATA (Kelompok Studi Lingkungan, Anak dan Pariwisata), yang dibentuk oleh para aktifis kampus pada tahun 1990. Setelah KOSLATA, kemudian para aktifis juga memprakarsai berdirinya Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) yang banyak melakukan advokasi di bidang lingkungan dan pariwisata.

Dalam melakukan advokasi terhadap buruh migran terdapat dua sikap di kalangan aktifis LSM di Mataram yang berbeda, antara disatu pihak yang memandang bahwa LSM harus melakukan advokasi yang bersifat langsung terhadap kasus dan korban, dan di pihak lain LSM yang beranggapan bahwa penanganan kasus dan korban adalah menjadi tanggung jawab dari pemerintah, tugas LSM adalah melakukan advokasi publik sehingga kasus dan korban diketahui oleh publik. Dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan di Mataram pandangan pertama yang menganggap bahwa LSM harus turun tangan langsung menangani kasus dan korban, mungkin paling jelas terlihat pada YPK; sementara pandangan kedua yang menganggap bahwa kewajiban LSM adalah pada advokasi publik dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menangani kasus dan korban, terefleksi pada KOSLATA. Perbedaan sikap dan pandangan di kalangan LSM di Mataram dalam melakukan advokasi terhadap buruh migran juga terlihat ketika LSM memperoleh “proyek” baru berupa penyusunan berbagai draft rancangan perda (peraturan daerah) terkait dengan perlindungan dan jaminan sosial terhadap buruh migran, yang sejak lima tahun terakhir ini marak, sejalan dengan maraknya desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Berbeda dengan YPK yang menginginkan adanya pasal-pasal yang memberikan kewenangan kepada LSM untuk terlibat

secara lebih langsung terhadap perlindungan buruh migran; KOSLATA tetap berpendapat bahwa adalah menjadi kewajiban dari pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap buruh migran. LSM dalam pandangan KOSLATA haruslah tetap menjaga jarak dengan pemerintah, dan mempertahankan posisi LSM sebagai "watch dog" dan kontrol sosial dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam istilah seorang aktivis LSM di Mataram, "LSM bukan berperan sebagai pemadam kebakaran".

Kegiatan LSM dalam advokasi buruh migran di Lombok digambarkan secara menarik dalam tulisan salah seorang aktivisnya, Muhammad Shaleh dari KOSLATA, yang berjudul: "Membongkar Persekongkolan Dibalik Paspor Ganda".²⁹ Dalam tulisan yang merupakan salah satu bab dalam buku yang merupakan kumpulan pengalaman advokasi dari berbagai tempat di Indonesia, Shaleh, menggambarkan persoalan buruh migran melalui kasus ketidakadilan yang dialami oleh Surain, seorang buruh migran asal Desa Dames, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, yang bekerja sebagai buruh di Malaysia, 1999-1990, tanpa dokumen resmi. Dalam tulisannya Shaleh menceritakan bagaimana dia terlibat dalam persoalan ini, dan tercermin disitu bekerjanya jaringan advokasi buruh migran lokal dengan yang nasional: "*Faksimiei terlantarnya 89 Buruh Migran Lombok dari Mulyadi adalah awal bagaimana Yayasan Koslata dan teman-teman pemerhati Buruh Migran NTB tahu persoalan Sur'ain dan kawan-kawannya. Saat itu Mulyadi yang bekerja di sebuah lembaga SARI yang juga menangani persoalan. Buruh Migran. Lembaga SARI saat itu pula bersama para pemerhati Buruh Migran Lombok menjadi anggota KOPBUMI yaitu Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia*". Shaleh selain menunjukkan bagaimana proses persekongkolan yang terjadi di balik bisnis TKI di Lombok yang melibatkan kalangan birokrasi maupun para pengusaha, juga menunjukkan strategi yang dilakukan oleh LSM untuk membawa isu ini ke publik melalui mass media, dan akhirnya

²⁹ Lihat Shaleh (2001) dalam buku *Kisah-Kisah Advokasi*, yang diterbitkan oleh INSIST Press.

menyusun langkah-langkah agar kasus semacam ini tidak terulang lagi. Di akhir tulisannya, Shaleh, menyimpulkan "gerakan strategis" apa yang harus dilakukan untuk membela nasib buruh migran: "*Gerakan strategis yang perlu dibangun bersama oleh para pemerhati Buruh Migran adalah bagaimana para pemerhati bersama para Buruh Migran dan calon Buruh membangun dan memperkuat aliansi guna bersama-sama menekan penguasa untuk menyetop pengerahan Buruh Migran, membubarkan para pengerah beserta persekongkolannya, dan menekan penguasa untuk melakukan penguatan rakyat di setiap tempat*".

Jaringan advokasi LSM selain memperlihatkan eratnya kerjasama antara LSM lokal dan nasional, juga sangat erat kaitannya dengan jaringan advokasi yang bersifat lintas bangsa (transnasional). Di Hongkong misalnya, sebagai tempat dimana banyak sekali buruh migran perempuan bekerja sebagai PRT, berdasarkan penelitian Sim (2002) terdapat 16 NGOs yang melakukan advokasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para buruh migran yang berasal dari negara-negara di asia tenggara, termasuk Indonesia, yang mungkin memiliki buruh migran lebih dari 100 ribu orang. Para aktivis NGOs ini sangat aktif dalam memberikan pendidikan tentang hak-hak buruh migran dan melakukan advokasi atas nama buruh migran tentang penghapusan berbagai peraturan perundang-undangan yang sangat diskriminatif terhadap buruh migran.³⁰ Di Hongkong gerakan advokasi transnasional buruh migran dikoordinir oleh para aktivis yang umumnya berwarganegara Filipina dibawah payung organisasi yang bernama AMC (*Asian Migration Center*), sementara itu sebuah payung organisasi lain, MFA (*Migration Forum in Asia*) berpusat di Manila, Filipina. Dominasi para aktivis NGO yang berasal dari Filipina dalam gerakan advokasi transnasional buruh migran tidak mengherankan karena besarnya buruh migran yang berasal dari Filipina dan kuatnya tradisi gerakan sosial kritis disana.

³⁰ Lihat Piper, 2005: 99.

Gerakan advokasi terhadap buruh migran, berbeda dengan gerakan-gerakan sosial kritis yang lain, mencerminkan dengan jelas apa yang disebut sebagai *“transnasional advocacy networks”*. Menurut Nicola Piper (2003) yang banyak meneliti tentang gerakan advokasi buruh migran transnasional, *“...empowerment of migrant labor is an area to be filled by enhanced transnational NGO (Non Government Organization) activism, particularly in view of the lack of will or ability of various Asian governments to take responsibility for either sending or receiving foreign workers. One aspect of the ‘politization’ of labor migration through NGO is the framing of a migrant’s right agenda”*. Persis seperti dikatakan oleh Piper diatas, advokasi buruh migran yang tampaknya bersifat sangat lokal sesungguhnya muncul sebagai imbas dari advokasi yang bersifat internasional karena isu buruh migran muncul pertama kali sebagai isu internasional yang mendorong para aktivis yang tergabung dalam jaringan advokasi transnasional (transnasional advokasi networks) memberikan responnya. Keterlibatan LSM di Indonesia dalam gerakan buruh bukan tidak memiliki persoalan. Ford (2005) yang melakukan pengamatan terhadap organisasi buruh di Indonesia pasca-reformasi, menunjukkan meningkatnya keterlibatan LSM dalam persoalan-persoalan buruh, namun demikian dia melihat bahwa: *“NGOs’ contribution to campaigns around labor issues may be increasingly acknowledged, but labor NGOs are seldom considered to be labor movement organizations in their own right because they are not organizations ‘by, for and of’ workers*. Dalam kaitan ini menarik apa yang dikatakan oleh Ford (2005) tentang NGO yang melakukan advokasi tentang persoalan-persoalan buruh di Indonesia, yang dikatakannya memiliki tingkat akuntabilitas public yang rendah. Berikut pendapat Ford, *“...the non-governmental organizations (NGOs) who have challenged, even undermined, unions’ monopoly on worker representation in emerging economy contexts in recent decades are inherently private organizations which are not directly bound to the workers they serve. NGOs’ growing engagement with labor issues is thus portrayed as bringing with it a shift away from the electoral mode of accountability considered synonymous with unions*

towards the inferior modes of accountability adopted by NGOs".³¹ Dari sini kita mengetahui bahwa gerakan advokasi untuk perbaikan nasib buruh, baik buruh pada umumnya, maupun buruh migran – yang menjadi fokus penelitian ini, tidaklah sederhana, namun sangat kompleks. Niscaya diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk dapat memahami kompleksitas hubungan-hubungan ini.

4.7. Penutup

Penelitian kecil ini memperlihatkan bahwa dalam periode politik pasca-Suharto tantangan yang dihadapi oleh kaum muda di perkotaan menjadi semakin beragam dan apa yang dihadapi oleh daerah perkotaan tertentu bisa berbeda dengan daerah lain. Kondisi kemiskinan, pengangguran dan rendahnya pendapatan masyarakat di Lombok ikut mendorong mengalirnya penduduk ke tempat lain di luar Lombok untuk mencari pekerjaan. Sejak awal tahun 1970-an mencari pekerjaan di luar negeri, terutama ke Malaysia dan timur Tengah, berkembang sebagai pilihan bagi sebagian penduduk Lombok. Meningkatnya aliran penduduk yang bekerja sebagai buruh migran di luar negeri, selain dipicu oleh sempitnya lapangan kerja di tempat asal, juga disebabkan meningkatnya ketidakadilan yang bersifat global yang berupa ketimpangan pendapatan yang semakin lebar antara negara kaya dan negara miskin. Sayangnya, buruh migran yang telah memberikan sumbangan pada devisa nasional ini belum memperoleh jaminan sosial dan perlindungan hukum yang memadai.

Perlakuan yang tidak adil dan pelanggaran hak-hak buruh migran telah mencuat ke publik dan menjadi sebuah isu sosial yang menjadi perhatian banyak pihak. Dalam konteks perubahan sosial seperti inilah kita menyaksikan munculnya gerakan sosial kaum muda di perkotaan berusaha mengambil peran untuk meringankan

³¹ Lihat Michele Ford, "Accountable to whom? Trade unions, labour NGOs and the question of accountability in Indonesia". *Working Paper Series* No. 8, December 2005, Southeast Asia research center, City University of Hongkong.

penderitaan yang dialami oleh buruh migran, baik di luar negeri maupun di daerah asalnya. Di Mataram, seperti juga terjadi di daerah perkotaan lain, kaum muda yang menjadi aktivis LSM pada umumnya adalah mahasiswa dari perguruan tinggi setempat. Para mahasiswa aktifis kampus inilah yang terbukti menjadi elemen utama dari gerakan sosial kritis di Mataram. Kegiatan advokasi buruh migran yang mereka lakukan adalah salah satu bentuk ekspresi keprihatinan sosial kaum muda dan upaya kongkrit mereka untuk melakukan perubahan sosial dari tingkat akar rumput.

Keterlibatan kaum muda dalam gerakan sosial kritis melalui advokasi buruh migran tidak saja terlihat dari keikutsertaan secara langsung dalam membantu korban-korban perlakuan tidak adil yang dialami buruh migran tetapi juga melalui upaya melakukan perubahan yang bersifat kelembagaan dan struktural, antara lain melalui upaya mereka dalam ikut serta dalam penusunan Perda dan berbagai perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan jaminan sosial dan perlindungan hukum bagi buruh migran. Persoalan rentannya nasib buruh migran, terutama disebabkan oleh absennya sarana dan mekanisme perlindungan terhadap mereka.³² Pertumbuhan LSM yang ada di Mataram dan perkembangan kiprahnya selain merupakan tanggapan dari kaum muda setempat terhadap berbagai isu yang bersifat lokal juga terbukti adanya pengaruh yang besar dari jaringan LSM yang bersifat nasional dan global.

Dalam kaitan dengan jaringan gerakan sosial yang bersifat global isu buruh migran dan advokasi terhadap buruh migran memiliki keunikan karena sejak awal telah merupakan sebuah persoalan yang bersifat internasional. Persoalan buruh migran adalah sebuah persoalan yang telah mendorong berkembangnya gerakan advokasi yang bersifat transnasional (transnasional advokasi

³² Tentang minimnya perlindungan hukum terhadap buruh migran ini bisa dibaca dari laporan PMB-LIPI, 2007, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengiriman Buruh Migran Perempuan Indonesia ke Malaysia".

networks atau TANs). Pemuda yang terlibat dalam gerakan-gerakan kritis di daerah perkotaan, sebagaimana diperlihatkan oleh advokasi yang dilakukan terhadap buruh migrant di Mataram, menunjukkan meningkatnya peranan kaum muda dalam upaya-upaya transformasi sosial untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) yang tidak saja merupakan problem lokal tetapi juga bersifat nasional dan memiliki kaitan yang sangat erat dengan ketimpangan dan ketidakadilan yang bersifat global.

4.8. Kepustakaan

- Castles, Stephen, 2004, 'Global Perspectives on Forced Migration'. makalah seminar Forced Migration in Southeast Asia, Jakarta 25-26 November .
- Fallon, Fleur, 2001, "Conflict, Power and Tourism on Lombok", *Current Issues in Tourism*, Vol. 4, No.6, pp. 481-502. (diakses melalui *Web Site*:<http://www.commerce.otago.ac.nz/tourism/current-issues/homepage.htm>)
- Frank, Andre Gunder, 1989, *ReOrient: Global Economy in the Asian Age*. Berkeley: University of California Press.
- Hamzah, Any Suryani, 2000, "Bekerjanya Peraturan Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dalam Hubungannya Dengan Tenaga Kerja Ilegal: Studi Mengenai Tenaga Kerja illegal Di Desa Jago, Lombok Tengah". Tesis S2, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jones, Gavin, 2005, 'Asean Migration: Development and Demographic Influences', disampaikan pada UNHCR Roundtable on Migration and Refugee Issues, Kuala Lumpur, 13-14 June.
- Ludden, David, 2003, 'Presidential Address: Maps in the Mind and the Mobility of Asia', *The Journal of Asian Studies* 62, no. 4 (November), pp. 1057-1078.

- Newman, Kathleen dan Kamala Candrakirana Soedjatmoko (penyunting), 1994, *Menjelajah Cakrawala: Kumpulan Karya visioner Soedjatmoko*. Jakarta: PT Gramedia dan Yayasan Soedjatmoko.
- Ohmae, Kenichi, 1995, 'The End of the nation State', The 1995 Panglaykim Memorial Lecture, CSIS, Jakarta.
- Piper, Nicola, 2005, "Global Norms, Transnational Advocacy Networks and Female Migrant Labor in Asia", in Timothy J. Scrase et.al. (eds.), *Globalization, Culture and Inequality in Asia*, pp. 48-67. Melbourne: Trans Pacific Press.
- Pramodhawardani, Jaleswani (editor), 2007, "Perlindungan Hukum; Terhadap Pengiriman Buruh Migran Perempuan Indonesia ke Malaysia". Laporan Penelitian: PMB-LIPI.
- Syamsuddin, Haris, 2006, "Reformasi untuk Demokrasi atau Korupsi dan Anarki? Dilema demokratisasi di Indonesia Pasca-Orde Baru". Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, desember 2006.
- Sangkoyo, Hendro, 2004, "Pengerahan Menuju Demokrasi: Politik Pembiayaan Tindakan Kolektif di Indonesia. Pengantar". *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Transformative*, Edisi 16, tahun 2004.
- Shaleh, Muhammad, 2001, "Membongkar Persekongkolan Dibalik Paspor anda", dalam *Kisah-Kisah Advokasi*, pp. 401-432. Yogyakarta INSIST Press.
- Subianto, Benny (2008) "The Prince as the Merchant: The Rise of the NGO Industry in the Post-Suharto Era". Makalah dipresentasikan pada UC Berkeley / ULCA Joint Conference on Southeast Asian Studies "Ten Years After: Reformasi & New Social Movements in Indonesia, 1998-2008", April 25-26.

- Soewarsono, 2006, "Klas Menengah dan Politik Lombok Paska-Orde Baru", dalam Henny Warsilah, editor, *Kelas Menengah dan Demokratisasi: Partisipasi Kelas Menengah dalam Kontrol Sosial terhadap Pelaksanaan Pemerintahan yang baik dan Bersih*". Laporan Penelitian: PMB-LIPI.
- Tirtosudarmo, Riwanto, 1991, "Dampak Sosial Pembangunan Kesehatan: Studi Kasus di Dusun Segenter, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat, NTB". Laporan Penelitian Dinamika Masyarakat Tahun 1985/1986. Jakarta: Leknas-LIPI.
- Tirtosudarmo, Riwanto, 2003, "Buruh Migran Perempuan dan Perebutan Ruang Publik", *Analisis-CSIS*, 2003, tahun XXXII, No. 2, pp. 228-255.
- Tirtosudarmo (2007) "Gerakan Masyarakat Sipil dan Transisi Demokrasi di Aceh", bab 3 dalam buku *Pemetaan Gerakan Sosial: Masyarakat Sipil di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Guna menuntut Hak-hak Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik* (Henny Warsilah, editor). Laporan Penelitian PMB-LIPI.
- Tornquist, Olle, 2001, 'The Indonesia Lesson', dalam R. William Liddle (ed.) *Crafting Indonesian Democracy*. pp. 61-66. Bandung: Penerbit Mizan.
- UNDP, 2004, *The Economics of Democracy: Financing Human development in Indonesia*. National Human Development Report 2004. Jakarta: BPS, Bappenas, UNDP.
- UNDP, 2001, *Towards a new Consensus: Democracy and human development in Indonesia*. Indonesia Human Development Report 2001. Jakarta: BPS, Bappenas, UNDP.
- Widjojo, Muridan S. et.al., 1999, *Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

